



DEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

LAPORAN CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 merupakan laporan tahun Pertama dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Presiden dimaksud mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya.

Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 ini disusun melalui pendekatan sistem perencanaan strategis yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 yang terdiri dari 15 (lima belas) sasaran strategis dan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja.

Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 ini pada dasarnya merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian visi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan selama periode APBD Tahun Anggaran 2020.

Keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat didalamnya yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka dan swasta serta seluruh masyarakat Kabupaten Bangka. Keberhasilan yang telah dicapai menjadi motivasi untuk berbuat lebih inovatif dan kreatif demi perbaikan kinerja ke depan. Demikian pula dengan kekurangan yang dialami menjadi bahan introspeksi konstruktif sehingga



dapat menjadi sumber *input* yang berharga bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka di masa mendatang.

Harapan kami semoga Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 ini dapat dijadikan :

- Bahan informasi bagi *stakeholders* terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun 2020;
- Bahan evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka untuk memberikan umpan balik (*feed back*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- Media untuk membangun kebersamaan dan sinergitas berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, transparan dan efektif.

Akhirnya semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Ridho, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. *Amin*.

Sungailiat, Maret 2021

BUPATI BANGKA,



MULKAN, SH, MH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
I. Pendahuluan	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Kondisi Umum Wilayah	I-2
C. Struktur Organisasi.....	I-20
D. Permasalahan Pembangunan	I-22
E. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bangka	I-27
F. Maksud dan Tujuan	I-34
II. Perencanaan Kinerja	II-1
A. Visi.....	II-3
B. Misi	II-4
C. Tujuan dan Sasaran	II-8
D. Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	II-12
E. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran (Indikator Kinerja Utama).....	II-13
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	II-15
III. Akuntabilitas Kinerja	III-1
A. Capaian Kinerja Organisasi	III-1
B. Realisasi Anggaran	III-135
C. Efisiensi Anggaran.....	III-137
IV. Penutup	IV-1
Lampiran – Lampiran	
I. Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Tahun 2020	
II. Matrik Formula Pengukuran Kinerja Tahun 2020	
III. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2020	
IV. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 (<i>Un Audited</i>)	
V. Pernyataan Telah Direviu atas Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020	
VI. Prestasi/Penghargaan yang Diterima Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2020	
VII. Pohon Kinerja (<i>Cascading</i>) Pemkab Bangka Tahun 2020	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nama Kecamatan, Luas Wilayah dan Jarak Ke Sungailiat.....	I-2
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Luas Daerah (Km ²) Kepadatan per Km ² di Kabupaten Bangka Tahun 2020.....	I-3
Tabel 1.3	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun 2020.....	I-4
Tabel 1.4	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bangka Tahun 2020 (%).....	I-5
Tabel 1.5	Struktur Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Tahun 2018-2020.....	I-6
Tabel 1.6	Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Dusun/Lingkungan di Kabupaten Bangka Tahun 2020.....	I-7
Tabel 1.7	Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bangka Menurut Golongan Tahun 2020 (Orang).....	I-8
Tabel 1.8	Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bangka Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020.....	I-8
Tabel 1.9	Jumlah Sarana dan Prasarana di Kabupaten Bangka Tahun 2020.....	I-9
Tabel 1.10	Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020.....	I-11
Tabel 1.11	Perkembangan Core Business Perekonomian Kabupaten Bangka.....	I-12
Tabel 1.12	Perkembangan PDRB Kabupaten Bangka dengan Timah Tahun 2016 – 2020.....	I-16
Tabel 1.13	PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Bangka Tahun 2016 – 2020.....	I-17
Tabel 1.14	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020.....	I-19
Tabel 2.1	Rumusan Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2019-2023.....	II-10
Tabel 2.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bangka 2019-2023.....	II-12
Tabel 2.3	Rumusan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran (Indikator Kinerja Utama) Tahun 2020.....	II-14
Tabel 2.4	Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020.....	II-16
Tabel 3.1	Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran.....	III-1
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Tahun 2020.....	III-2
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Atas Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Tahun 2020.....	III-5
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Terhadap Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah.....	III-6
Tabel 3.5	Rincian Perkembangan Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Bangka Tahun 2016–2020.....	III-7
Tabel 3.6	Rincian Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2020.....	III-8
Tabel 3.7	Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Tahun 2020.....	III-8
Tabel 3.8	Capaian Indeks SPBE Pada Kabupaten/Kota di Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.....	III-9
Tabel 3.9	Capaian Indeks SPBE Kabupaten Bangka Berdasarkan Rataan Indeks SPBE Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia Tahun 2020.....	III-10
Tabel 3.10	Rincian Capaian Indeks SPBE Kabupaten Bangka Tahun 2020.....	III-10
Tabel 3.11	Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Tahun 2020.....	III-12
Tabel 3.12	Komposit Unsur Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Tahun 2019 dan 2020.....	III-13
Tabel 3.13	Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah.....	III-16
Tabel 3.14	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020.....	III-20
Tabel 3.15	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020.....	III-21
Tabel 3.16	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	III-21
Tabel 3.17	Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah.....	III-23
Tabel 3.18	Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah.....	III-25
Tabel 3.19	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020.....	III-26
Tabel 3.20	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020.....	III-27
Tabel 3.21	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	III-27
Tabel 3.22	Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah.....	III-29
Tabel 3.23	Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah.....	III-32



Tabel 3.24	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020.....	III-32
Tabel 3.25	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020	III-33
Tabel 3.26	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	III-34
Tabel 3.27	Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah.....	III-36
Tabel 3.28	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dengan Standar Nasional.....	III-37
Tabel 3.29	Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah.....	III-39
Tabel 3.30	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020.....	III-40
Tabel 3.31	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020	III-40
Tabel 3.32	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	III-42
Tabel 3.33	Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah.....	III-45
Tabel 3.34	Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah.....	III-49
Tabel 3.35	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020.....	III-50
Tabel 3.36	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020	III-51
Tabel 3.37	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	III-53
Tabel 3.38	Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah.....	III-54
Tabel 3.39	Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah.....	III-55
Tabel 3.40	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020.....	III-56
Tabel 3.41	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020	III-57
Tabel 3.42	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	III-59
Tabel 3.43	Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah.....	III-61
Tabel 3.44	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020.....	III-63
Tabel 3.45	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020	III-63
Tabel 3.46	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	III-65
Tabel 3.47	Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah.....	III-66
Tabel 3.48	Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah.....	III-69
Tabel 3.49	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020.....	III-70
Tabel 3.50	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020	III-71
Tabel 3.51	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	III-72
Tabel 3.52	Perbandingan indikator sasaran dengan Target Jangka Menengah	III-77
Tabel 3.53	Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah.....	III-78
Tabel 3.54	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020.....	III-79
Tabel 3.55	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020	III-79
Tabel 3.56	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	III-81
Tabel 3.57	Objek Wisata di Kabupaten Bangka.....	III-83
Tabel 3.58	Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah.....	III-84
Tabel 3.59	Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah.....	III-85
Tabel 3.60	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020.....	III-87
Tabel 3.61	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020	III-88
Tabel 3.62	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020.....	III-89
Tabel 3.63	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bangka Tahun 2015-2020	III-90
Tabel 3.64	Pertumbuhan Luas Panen dan Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020	III-92
Tabel 3.65	Pertumbuhan Luas Panen dan Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan Kabupaten Bangka Tahun 2016-2019	III-93
Tabel 3.66	Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Sektor Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020	III-94
Tabel 3.67	Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Sektor Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020	III-94
Tabel 3.68	Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah.....	III-95
Tabel 3.69	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	III-97
Tabel 3.70	PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2020	III-97
Tabel 3.71	Koefisien Disparitas Pendapatan Kabupaten Bangka Tahun 2015– 2020	III-98



Tabel 3.72	Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah	III-99
Tabel 3.73	Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah.....	III-101
Tabel 3.74	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2020	III-102
Tabel 3.75	Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah	III-104
Tabel 3.76	Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah.....	III-105
Tabel 3.77	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020.....	III-107
Tabel 3.78	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020	III-107
Tabel 3.79	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2020	III-109
Tabel 3.80	Klasifikasi Desa Berdasarkan Pekembangannya Di Kabupaten Bangka Tahun 2017 – 2020	III-110
Tabel 3.81	Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Bangka Tahun 2017 – 2020	III-111
Tabel 3.82	Daftar Bumdes dan Unit Usaha Bumdes Di Kabupaten Bangka Tahun 2020	III-115
Tabel 3.83	Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah.....	III-121
Tabel 3.84	Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah.....	III-122
Tabel 3.85	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020.....	III-123
Tabel 3.86	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020	III-123
Tabel 3.87	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2020	III-125
Tabel 3.88	Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah.....	III-131
Tabel 3.89	Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah.....	III-132
Tabel 3.90	Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020.....	III-133
Tabel 3.91	Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020	III-134
Tabel 3.92	Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020.....	III-135
Tabel 3.93	Alokasi Anggaran Belanja Menurut Sasaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020.....	III-136
Tabel 3.94	Efisiensi Anggaran dan Efektifitas Sasaran Strategis Kabupaten Bangka Tahun 2020.....	III-138



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bangka Tahun 2016 – 2020	III-30
Grafik 3.2	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat” Tahun 2020.....	III-33
Grafik 3.3	Perkembangan Angka Rata – Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2020	III-35
Grafik 3.4	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas” Tahun 2020	III-41
Grafik 3.5	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2020	III-42
Grafik 3.6	Perkembangan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018 – 2020	III-44
Grafik 3.7	Rekap Faktor Determinan Balita Stunting berdasarkan Kabupaten Bangka menurut Aplikasi E PPGBM (1 Februari -31 Agustus 2020).....	III-46
Grafik 3.8	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian Sasaran “Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat” Tahun 2020.....	III-51
Grafik 3.9	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2020	III-54
Grafik 3.10	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Kesetaraan Gender” Tahun 2020	III-57
Grafik 3.11	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2020	III-60
Grafik 3.12	Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas”	III-65
Grafik 3.13	Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah.....	III-67
Grafik 3.14	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi Yang Berkualitas” Tahun 2020.....	III-71
Grafik 3.15	Perkembangan indikator kinerja sasaran Tahun 2018-2020	III-76
Grafik 3.16	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian Sasaran “Meningkatnya infrastruktur Sosial yang berkualitas” Tahun 2020	III-80
Grafik 3.17	Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bangka Tahun 2017 – 2020.....	III-81
Grafik 3.18	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata Berbasis Sport Tourism, Kearifan dan Budaya Lokal serta Sumber Daya Alam Pariwisata” Tahun 2020.....	III-88
Grafik 3.19	Koefisien Disparitas Pendapatan dan Pemerataan Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2020	III-99
Grafik 3.20	Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2020	III-103
Grafik 3.21	Persentase Desa Swasembada Tahun 2019 – 2020	III-109
Grafik 3.22	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Sasaran “Meningkatnya Peran Serta Desa Dalam Mendorong Perekonomian Daerah” Tahun 2020	III-124
Grafik 3.23	Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2019-2020	III-126
Grafik 3.24	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Upaya Pelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup” Tahun 2020.....	III-134



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Visi Misi Bangka Bermartabat RPJMD Kabupaten Bangka 2019 - 2023	II-4
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir Perencanaan Integrative Misi 1 RPJMD Kabupaten Bangka 2019 – 2023	II-5
Gambar 2.3	Kerangka Berpikir Perencanaan Integrative Misi 2 RPJMD Kabupaten Bangka 2019 – 2023	II-6
Gambar 2.4	Kerangka Berpikir Perencanaan Integrative Misi 3 RPJMD Kabupaten Bangka 2019- 2023	II-7
Gambar 2.5	Kerangka Berpikir Perencanaan Integrative Misi 4 RPJMD Kabupaten Bangka 2019 – 2023	II-7
Gambar 2.6	Kerangka Berpikir Perencanaan Integrative Misi 5 RPJMD Kabupaten Bangka 2019 – 2023	II-8
Gambar 2.7	Rumusan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka 2019 – 2023	II-9
Gambar 3.1	Peta KEK Pariwisata Sungailiat Kabupaten Bangka	III-86
Gambar 3.2	Pola Rencana Ruang Kabupaten Bangka	III-130



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 disusun berdasarkan Sistem Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) Pemerintah Kabupaten Bangka.

Pengukuran pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Bangka dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*Performance Plan*) yang ingin dicapai dengan realisasi kinerja (*Performance Result*) yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun 2020. Metode komparasi pengukuran ini diharapkan



dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi Pemerintah Kabupaten Bangka.

Berdasarkan Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian strategik sebaga berikut :

- 1) Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian 15 (lima belas) sasaran yang mencakup 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja setingkat *outcome* diperoleh hasil : (i) 15 (lima belas) indikator kinerja utama atau sebesar 55,56 persen masuk dalam kategori *melebihi target*, (ii) 8 (delapan) indikator kinerja utama atau sebesar 29,63 persen termasuk dalam kategori *tercapai*, dan (iii) 4 (empat) indikator kinerja utama atau sbesar 14,81 pesen termasuk kategori *tidak tercapai*.



2) Tingkat keberhasilan terhadap pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tingkat capaian sasaran "**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi**" mencapai tingkat kinerja sebesar **101,00%** atau termasuk dalam kategori melebihi target.
- b. Tingkat capaian sasaran "**Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel**" mencapai tingkat kinerja sebesar **100,00%** atau termasuk dalam kategori mencapai target.
- c. Tingkat capaian sasaran "**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat**" mencapai tingkat kinerja sebesar **104,95%** atau termasuk dalam kategori melebihi target.
- d. Tingkat capaian sasaran "**Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat**" mencapai tingkat kinerja sebesar **100,10%** atau termasuk dalam kategori melebihi target.
- e. Tingkat capaian sasaran "**Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**" mencapai tingkat kinerja sebesar **130,42%** atau termasuk dalam kategori melebihi target.
- f. Tingkat capaian sasaran "**Meningkatnya Kesetaraan Gender**" mencapai tingkat kinerja sebesar **119,74%** atau termasuk dalam kategori melebihi target.
- g. Tingkat capaian sasaran "**Meningkatnya Perlindungan Pemenuhan Hak-hak Anak**" mencapai tingkat kinerja sebesar **100,00%** atau termasuk dalam kategori mencapai target.
- h. Tingkat capaian sasaran "**Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas**" mencapai tingkat kinerja sebesar **101,64%** atau termasuk dalam kategori melebihi target.
- i. Tingkat capaian sasaran "**Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas**" mencapai tingkat kinerja sebesar **100,60%** atau termasuk dalam kategori melebihi target.



- j. Tingkat capaian sasaran **"Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata Berbasis Sport Tourism, Kearifan dan Budaya Lokal serta Sumber Daya Alam Pariwisata"** mencapai tingkat kinerja sebesar **88,68%** atau termasuk dalam kategori melebihi tidak mencapai target.
 - k. Tingkat capaian sasaran **"Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto"** mencapai tingkat kinerja sebesar **107,88%** atau termasuk dalam kategori melebihi target.
 - l. Tingkat capaian sasaran **"Meningkatnya Pendapatan Masyarakat"** mencapai tingkat kinerja sebesar **105,80%** atau termasuk dalam kategori melebihi target.
 - m. Tingkat capaian sasaran **"Menurunnya Angka Kemiskinan"** mencapai tingkat kinerja sebesar **104,90%** atau termasuk dalam kategori melebihi target.
 - n. Tingkat capaian sasaran **"Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah"** mencapai tingkat kinerja sebesar **93,75%** atau termasuk dalam kategori tidak mencapai target.
 - o. Tingkat capaian sasaran **"Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup"** mencapai tingkat kinerja sebesar **99,33%** atau termasuk dalam kategori tidak mencapai target.
- 3) Tingkat capaian kinerja akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 yang dituangkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :
- a. Target Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.140.955.837.297,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.136.647.395.404,40 atau mencapai 99,62%.
 - b. Target Belanja Daerah sebesar Target Belanja Daerah sebesar Rp.1.270.841.728.698,23 dengan realisasi sebesar Rp.1.152.653.865.431,02 atau mencapai 90,70%.
 - c. Efisiensi belanja langsung tahun 2020 sebesar 15,99 % dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan



bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka atas hasil pengukuran kinerja sasaran sebagai bentuk upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) **Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi** melalui upaya: (i) Penyempurnaan seluruh unsur-unsur kunci dalam perencanaan (tujuan, sasaran dan indikator kinerja) seluruh Perangkat Daerah serta keberlanjutan implemetasi manajemen kinerja, (ii) Perlu dilakukan terobosan-terobosan baru serta pembiasaan bekerja secara daring guna melaksanakan seluruh kerja dalam mencapai target kinerja serta menghambat penyebaran Covid-19, (iii) Memperdalam analisis refocusing program dan kegiatan yang telah disusun sehingga tidak hanya menghilangkan program dan kegiatan yang berulang tapi juga menggabungkan program-program dan memastikan fokus alokasi sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia hanya untuk program dan kegiatan yang secara langsung berpengaruh dalam pencapaian kinerja, (iv) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengolah data kinerja (SILAKIP) yang telah dibangun sehingga terpantau capaian kinerja atas tiap-tiap Perangkat Daerah yang diikuti dengan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian kinerja tersebut, (v) Pengintegrasian Indikator Kinerja Individu dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang dikelola dengan baik dan diimplementasikan dalam laporan harian kinerja yang menggunakan aplikasi yang memerlukan validasi oleh atasan langsung masing-masing individu, sehingga monitoring kinerja bisa dilakukan setiap hari dan setiap bulan. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam kinerja maka pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja bulanan, (vi) Melakukan review peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ sinkron, dan (vii) memanfaatkan proses bisnis untuk melakukan restrukturisasi Perangkat Daerah dan evaluasi struktur organisasi yang efektif dan efisien, (viii) Arsitektur SPBE kedepan akan diperbaiki. Penjelasan tentang visi misi akan ditambahkan dan Kebijakan internal perencanaan dan penganggaran TIK akan disesuaikan dengan muatan rencana induk SPBE serta menyertakan kebijakan aplikasi umum berbagi pakai akan dilakukan guna meningkatkan nilai indeks domain tata kelola



Kabupaten Bangka, dan (ix) Penerapan integrasi sistem aplikasi pada seluruh unit kerja/PD.

- 2) **Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel** melalui: (i) Mengintegrasikan sistem aplikasi pencatatan dan pengelolaan aset daerah dengan sistem pengelolaan keuangan yang sudah ada agar dapat bekerja secara optimal, (ii) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi siskeudes dan Festival Anggaran Desa, dan (iii) Melakukan *recruitment* intern APIP untuk memperkuat pengawasan intern pemerintah daerah.
- 3) **Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat** melalui : Meningkatkan transparansi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, baik prosedur dan persyaratan pelayanan agar memudahkan masyarakat mengakses layanan publik.
- 4) **Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat** melalui : (i) Mengoptimalkan kembali program perburuan anak putus sekolah (Bunaktuslah) dalam rangka menekan angka putus sekolah sampai ke level desa dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pendidikan yang dikoordinir langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, (ii) Melakukan pola kerjasama dengan pihak terkait terutama terkait upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan miskin, (iii) Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat melalui pemberdayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), (iv) Menyekolahkan semua tenaga pengajar ke jenjang pendidikan Strata I, (v) Bagi tenaga pengajar mata pelajaran prioritas yang telah berjenjang Strata I dilanjutkan dengan Strata II, (vi) Memberikan pelatihan kepada tenaga pengajar, (vii) Melakukan pengawasan secara berkala kepada tenaga tenaga pengajar dalam melaksanakan kurikulum sekolah,, (viii) Redistribusi tenaga pengajar antar wilayah, (ix) Pemberian insentif tenaga pengajar dengan pertimbangan jarak dan/atau daerah terpencil, dan (x) Pembukaan rute jalur transportasi umum menuju sarana pendidikan
- 5) **Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat** melalui upaya-upaya: (i) Penguatan pelaksanaan 3 T (Terlambat Mendeteksi, Terlambat Merujuk dan



Terlambat Penanganan/Pemberian Pelayanan yang Adekuat) mulai dari level pelayanan di Bidan desa, Puskesmas PONE D dan RS Rujukan, peningkatan Kompetensi tenaga Kesehatan bidan baik di desa maupun di puskesmas, (ii) Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Bangka, (iii) Melakukan kerjasama dengan aparat desa setempat sehingga dapat menginformasikan melalui kantor desa maupun layanan publik pemerintahan terdekat, (iv) Peningkatan kapasitas layanan SPGDT, (v) Pendampingan ibu hamil oleh petugas kesehatan dan kader dapat menekan angka kematian ibu melahirkan, (vi) Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penyediaan gizi keluarga untuk mengurangi angka balita gizi buruk, (vii) Menggiatkan peran ibu-ibu PKK di desa dalam penyuluhan kesehatan ibu dan anak, (viii) Pemantapan implementasi inovasi SMS Bunda Cerdas, SI RESTI CIKAR dan SI DORA, (ix) Penambahan sarana NICU pada fasilitas kesehatan rujukan, dan (x) Penambahan tenaga dokter spesialis.

6) **Meningkatnya kesetaraan gender** melalui upaya: (i) Optimalisasi Program Perburuan Anak-anak putus sekolah ke sekolah kependidikan non formal pendidikan kesetaraan, (ii) Memperbanyak Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di setiap desa/ kelurahan, (iii) Peningkatan Akses dan pelayanan Pendidikan bagi perempuan salah satunya dengan mencanangkan sekolah perempuan, (iv) Melakukan pelatihan keterampilan khusus perempuan, (v) Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga baik melalui usaha ekonomi mikro maupun dengan cara membuka peluang dan kesempatan kerja khusus perempuan, dan (vi) Mengoptimalkan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di setiap desa / kelurahan.

7) **Meningkatnya perlindungan pemenuhan hal-hak anak** melalui upaya: (i) Melakukan MoU Antara Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Kementerian Agama untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya untuk tidak menikah dalam usia anak, (ii) Mengembangkan Lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga, (iii) Sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat yang rentan, terkait dampak negatif pernikahan pada usia anak, (iv) Memperkuat peraturan terkait penyediaan Ruang Laktasi baik di fasilitas umum instansi pemerintah maupun dunia usaha, (v) Sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya ruang laktasi dan area bermain anak, (vi) Optimalisasi penyelenggaraan



Sekolah Ramah anak, mulai dari tingkat PAUD, SD/MI, SMP/Mts, SMA/MAN di Kabupaten Bangka, (vii) Menyediakan fasilitas konseling di disekolah penanganan permasalahan anak, (viii) Menyediakan sarana yang dapat digunakan sebagai wadah anak berkumpul dan melakukan kreatifitas, (ix) Mengoptimalkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA), (x) Peningkatan pembentuk Forum Anak di setiap kecamatan dan Desa serta kelurahan, dan (xi) Sosialisasi dan edukasi terkait peran dan fungsi forum anak dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

- 8) **Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas** melalui upaya: (i) Memetakan kegiatan pembangunan infrastruktur yang memiliki daya ungkit ekonomi yang baik dari sekian kegiatan yang sebelum refocusing telah ditetapkan, (ii) Memanfaatkan kerjasama dengan private sektor terkait pembangunan infrastruktur jalan khususnya pembangunan jalan di sentra pertanian, (iii) Tim Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) menjalankan fungsinya melalui pertemuan-pertemuan yang berkesinambungan untuk memastikan dan menyelesaikan permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan, (iv) Khusus untuk pembangunan yang didanai dari DAK, mengingat kewenangan penetapan anggaran DAK ada pada Pemerintah Pusat maka harus disikapi dengan persiapan yang sangat baik untuk SDM teknis, jadwal kegiatan serta koordinasi antar PERANGKAT DAERAH yang intensif agar pembangunan dapat tepat waktu dan penyerapan DAK mencapai 100%, dan (v) Memastikan mulai dari tingkat perencanaannya bahwa lokasi pembangunan tidak pada kawasan hutan dan memastikan lahan *clean and clear* (C & C) dan atau memastikan kegiatan penyediaan lahan dilakukan setahun sebelumnya.
- 9) **Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas** melalui upaya: (i) memperbanyak akses perpipaan SPAM IKK di pedesaan dan membebaskan biaya pemasangan bagi masyarakat yang kurang mampu, dan (ii) Melakukan pemeliharaan terhadap sumber air minum agar bisa tetap terjaga volume maupun kualitas airnya serta keberlanjutannya.
- 10) **Meningkatnya pengembangan kepariwisataan berbasis *sport tourism*, kearifan dan budaya lokal serta sumber daya alam pariwisata** melalui upaya: (i) Inovasi layanan pariwisata yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat,



(ii) Melakukan promosi wisata daerah secara intensif baik melalui pendekatan teknologi informasi maupun pendekatan tradisional (pameran, expo, dsb), (iii) Melakukan pola kerjasama dengan pihak terkait terutama terkait event pariwisata tahunan yang berskala internasional (triathlon) sehingga lebih berdampak luas, (iv) Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan keterampilan/kerajinan, pementasan seni budaya daerah sebagai representasi daya saing lokal, dan (v) Mendorong pengembangan produk –produk UKM berbasis kepariwisataan.

11)Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap Profuk Domestik Regional Bruto melalui: (i) Intensifikasi, ekstensifikasi dan penguatan teknologi budidaya untuk komoditas strategis daerah (lada, karet, dan ubi casesa) dan (ii) Memperbaiki tata niaga pertanian dalam rangka mengoptimalkan pasar domestik dan memperkuat daya saing produk pertanian.

12)Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui: (i) Pemberian stimulus ekonomi sektor unggulan daerah, (ii) Refocussing dan realokasi anggaran, dan (iii) Pemberian insentif dan relaksasi pajak dan retribusi.

13)Menurunnya angka kemiskinan melalui (i) Kebijakan bantuan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, (ii) Pemulihan ekonomi sektor unggulan daerah, dan (iii) Pemberian insentif dan relaksasi pajak dan retribusi terhadap sektor pariwisata dan UMKM.

14)Meningkatnya peran serta Desa dalam mendorong perekonomian daerah melalui: (i) Pengembangan jaringan pemasaran produk dari desa berbasis online, (ii) Mendorong program *one village one product (OVOP)* sehingga setiap desa memiliki produk unggulan, (iii) Membuat jaringan pemasaran tingkat kecamatan maupun kabupaten untuk menampung produk-produk unggulan dari desa, (iv) Pelatihan kemampuan serta keterampilan (*soft skill*) yang sesuai dengan potensi ekonomi di desa tersebut, dan (v) Penggunaan dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan peningkatan ekonomi pedesaan.



- 15) **Meningkatnya upaya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup** melalui: (i) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terutama izin lingkungan dan izin PPLH terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Bangka, (ii) Meningkatkan luas areal tutupan lahan terutama di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lokasi eks tambang, (iii) Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk menjalankan amanah Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal sebesar 30% dari luas wilayah, (iv) Sosialisasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan dan tidak membuang sampah di daerah aliran sungai, (v) Mencegah dan memberikan informasi kepada masyarakat agar waspada terhadap kebakaran lahan dan hutan serta menghimbau tidak membuka lahan kebun dengan cara dibakar.



BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi telah menjadi isu terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Upaya pencapaian reformasi birokrasi didasari pada transparansi dan akuntabilitas pada setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas publik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Perubahan-perubahan dalam manajemen publik senantiasa dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam proses pembangunan. Perbaikan manajemen pembangunan yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur diharapkan mampu membangun komunikasi, mengakomodasi berbagai gagasan dan kebutuhan dari para *stakeholders* serta mengikuti tuntutan perubahan yang ada.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkan kepada setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyelenggarakan SAKIP yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam konteks akuntabilitas ini, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran. Disebut laporan kinerja karena memberikan informasi yang terukur melalui perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya sehingga dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*) dan strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*).

Laporan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.



B. Kondisi Umum Wilayah

1. Geografis

Secara formal-legal, pembentukan Kabupaten Bangka ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), dan merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka menjadi salah satu kabupaten dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kabupaten Bangka memiliki luas wilayah 2.950,68 Km², terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dengan Sungailiat sebagai ibukota kabupaten, serta dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: (i) sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna; (ii) sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna; (iii) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang; dan (iv) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat.

Selengkapnya nama-nama kecamatan, luas wilayah dan jaraknya dari ibukota kabupaten tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Nama Kecamatan, Luas Wilayah dan
Jarak Ke Sungailiat

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jarak ke Sungailiat (Km)
		(Km ²)	%	
1	Belinyu	546,50	18,52	54
2	Merawang	164,40	5,57	21
3	Mendo Barat	570,46	19,33	33
4	Puding Besar	383,29	13,00	32
5	Bakam	488,10	16,54	38
6	Riau Silip	523,68	17,75	42
7	Pemali	127,87	4,33	15
8	Sungailiat	146,38	4,96	0

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bangka



2. Demografi Ketenagakerjaan

Penduduk dan tenaga kerja merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi suatu wilayah karena menjadi salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk dan tenaga kerja yang lebih besar, maka suatu wilayah memiliki pasar yang lebih besar pula, apalagi jika ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai. Dengan kemampuan dan sumber daya penduduk dan tenaga kerja yang baik, maka kemungkinan suatu wilayah berkembang akan lebih baik jika dibandingkan dengan wilayah yang berpenduduk lebih sedikit dan sumber daya manusia yang lebih rendah. Dari aspek lain, makin besar jumlah penduduk dan tenaga kerja di suatu wilayah dapat dinyatakan bahwa wilayah tersebut memiliki faktor penarik yang lebih besar.

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk Kabupaten Bangka, jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 320.552 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk menurut kecamatan, luas daerah (Km²) dan kepadatan per Km² di Kabupaten Bangka tahun 2020 sebagaimana tertera pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Luas Daerah (Km²)
Kepadatan per Km² di Kabupaten Bangka Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Daerah Km ²	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan per Km ² (jiwa)
1.	Sungailiat	146,38	92.408	631
2.	Bakam	488,10	18.478	38
3.	Pemali	127,87	34.071	266
4.	Merawang	164,40	29.929	182
5.	Puding Besar	383,29	19.426	51
6.	Mendo Barat	570,46	49.014	86
7.	Belinyu	546,50	49.387	90
8.	Riau Silip	523,68	27.839	53
Jumlah 2020		2.950,68	320.552	

Sumber : Dindukpencapil Kabupaten Bangka, 2021



b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Dari data yang tersedia pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Bangka untuk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, yakni penduduk laki-laki sebanyak 164.802 jiwa atau 51,41% dan penduduk perempuan sebanyak 155.750 jiwa atau 48,59% dari seluruh penduduk. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.3
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2020

NO.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Sex Ratio
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (Jiwa)		
1.	Sungailiat	46.915	45.493	92.408	103
2.	Bakam	9.681	8.797	18.478	110
3.	Pemali	17.407	16.664	34.071	104
4.	Merawang	15.366	14.563	29.929	106
5.	Puding Besar	10.203	9.223	19.426	111
6.	Mendo Barat	25.600	23.414	49.014	109
7.	Belinyu	25.222	24.165	49.387	104
8.	Riau Silip	14.408	13.431	27.839	107
Jumlah		164.802	155.750	320.552	106

Sumber : Dindikpencapil Kabupaten Bangka, 2021

c. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Bangka cenderung didominasi kelompok umur usia muda 5-9 tahun dengan proporsi sebesar 9,82 persen, serta kelompok umur 10-14 tahun dengan proporsi sebesar 9,53 persen. Sedangkan kelompok umur usia tua ≥ 75 tahun merupakan penduduk terkecil dari seluruh penduduk Kabupaten Bangka, dengan proporsi hanya sebesar 1,39 persen saja. Selengkapnya struktur penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Bangka tahun 2020 tertera pada tabel 1.4.



Tabel 1.4
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di
Kabupaten Bangka Tahun 2020 (%)

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Penduduk
1.	0-4	3.92 %	3,61 %	7,52 %
2.	5-9	5.06 %	4,75 %	9,82 %
3.	10-14	4.90 %	4,63 %	9,53 %
4.	15-19	4.45 %	4,21 %	8,67 %
5.	20-24	4.09 %	3,91 %	8,00 %
6.	25-29	3.64 %	3,53 %	7,17 %
7.	30-34	4.39 %	4,19 %	8,58 %
8.	35-39	4.46 %	4,06 %	8,52 %
9.	40-44	4.15 %	3,69 %	7,85 %
10.	45-49	3.24 %	2,98 %	6,22 %
11.	50-54	2.66 %	2,42 %	5,07 %
12.	55-59	2.09 %	2,01 %	4,10 %
13.	60-64	1.78 %	1,83 %	3,61 %
14.	65-69	1.28 %	1,24 %	2,53 %
15.	70-74	0.71 %	0,73 %	1,44 %
16.	75+	0.61 %	0,78 %	1,39 %
Jumlah		51,41 %	48,59 %	100,00%

Sumber : Dindikpencapil Kabupaten Bangka, 2021

d. Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan

Tenaga kerja merupakan faktor vital dalam kehidupan manusia baik ditinjau dari sisi ekonomi maupun sosial. Sisi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebaliknya sektor-sektor usaha membutuhkan tenaga kerja (SDM) untuk menggerakkan roda perekonomian. Sedangkan sisi sosial dari tenaga kerja, berkaitan erat dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan perekonomian.



Tabel 1.5
Struktur Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Bangka Tahun 2018-2020

Sektor	Tahun			Rataan
	2018	2019	2020	
PRIMER	47,30	30,42	32,88	36,87
SEKUNDER	15,30	30,13	24,06	23,16
TERSIER	37,40	39,45	43,06	39,97
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2021

Tabel 1.5 menunjukkan struktur tenaga kerja di Kabupaten Bangka tahun 2018-2020. Pada tahun 2018 penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor primer yaitu pertanian (47,30 persen), disusul oleh sektor tersier yaitu jasa (37,40 persen), sementara penyerapan tenaga kerja pada sektor sekunder yaitu industri pengolahan paling sedikit (15,30 persen). Pada tahun 2020 terjadi pergeseran penyerapan tenaga kerja, sektor tersier (jasa) menjadi sektor yang paling dominan menyerap tenaga kerja (43,06 persen), disusul oleh sektor primer yaitu pertanian (32,88 persen), sementara sektor sekunder yaitu industri pengolahan tetap paling rendah menyerap tenaga kerja (24,06 persen).

3. Administrasi Pemerintahan

Administrasi pemerintahan di Kabupaten Bangka mengalami perkembangan yang relatif cepat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu memberikan keleluasaan kepada masing-masing daerah untuk mengembangkan diri dalam rangka kemandirian dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 19 kelurahan, 62 desa, dan 294 dusun/lingkungan sebagaimana tergambar pada tabel 1.6 di bawah ini.



Tabel 1.6
Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Dusun/Lingkungan
di Kabupaten Bangka Tahun 2020

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Dusun/ Lingkungan
1	Mendo Barat	-	15	76
2	Merawang	-	10	33
3	Puding Besar	-	7	23
4	Sungailiat	12	1	50
5	Pemali	-	6	21
6	Bakam	-	9	28
7	Belinyu	7	5	34
8	Riau Silip	-	9	29
JUMLAH		19	62	294

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bangka

4. Aparatur Pemerintahan

Aparatur pemerintahan di Kabupaten Bangka terus mengalami perubahan dan dinamika dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, profesional dan melayani, salah satunya melalui peningkatan kompetensi aparatur pemerintah, penerapan *reward and punishment* terhadap kinerja aparatur daerah.



Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bangka pada tahun 2020 menurut Golongan terdiri dari 17 orang Golongan I atau sebesar 0,44 persen, Golongan II sebanyak 583 orang atau sebesar 15,19 persen, Golongan III sebanyak 2.485 orang atau sebesar

64,78 persen dan Golongan IV sebanyak 752 orang atau sebesar 19,60 persen dari seluruh jumlah seluruh aparatur yang ada di Kabupaten Bangka. Secara detail, jumlah ASN Kabupaten Bangka menurut golongan tersaji pada tabel berikut ini.



Tabel 1.7
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bangka
Menurut Golongan Tahun 2020 (Orang)

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	%tase
		Laki-Laki	Perempuan		
1	I	12	5	17	0,44
2	II	310	273	583	15,19
3	III	866	1.619	2.485	64,76
4	IV	322	430	752	19,60
Jumlah		1.510	2.327	3.837	100,00

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka, 2021

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bangka menurut tingkat pendidikan terdiri dari SD sebanyak 9 orang atau sebesar 0,23 persen dari total jumlah ASN di Kabupaten Bangka, SLTP sebanyak 21 orang atau sebesar 0,55 persen, SLTA sebanyak 595 orang atau sebesar 15,51 persen, Diploma I sebanyak 23 orang atau sebesar 0,60 persen, Diploma II sebanyak 134 orang atau sebesar 3,49 persen, Diploma III/Sarjana Muda sebanyak 533 orang atau sebesar 13,89 persen, Diploma IV sebanyak 46 orang atau 1,20 persen, Strata 1 sebanyak 2.306 orang atau sebesar 60,10 persen, Strata 2 sebanyak 167 orang atau sebesar 4,35 persen, dan Strata 3 sebanyak 3 orang atau hanya 0,08 persen dari seluruh ASN yang ada di Kabupaten Bangka. Secara detail, jumlah ASN Kabupaten Bangka menurut tingkat pendidikan tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 1.8
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bangka
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1	SD	6	3	9	0,23
2	SLTP	15	6	21	0,55
3	SLTA	335	260	595	15,51
4	D.I	6	17	23	0,60
5	D.II	58	76	134	3,49
6	D.III / SM	124	409	533	13,89
7	D.IV	30	16	46	1,20
8	S.1	841	1.465	2.306	60,10



No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-Laki	Perempuan		
9	S.2	93	74	167	4,35
10	S.3	2	1	3	0,08
Jumlah		1.510	2.327	3.837	100,00

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka, 2021

5. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Ketersediaan aparatur pemerintah yang profesional, sarana dan prasarana pendukung dan sistem manajemen yang baik merupakan beberapa bagian penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien. Secara detail, jumlah sarana dan prasarana pemerintah daerah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.9
Jumlah Sarana dan Prasarana di
Kabupaten Bangka Tahun 2020

No	Uraian	Satuan	Jumlah	%	Keterangan
1	Tanah	bidang tanah	1.075	0,11	Tanah makam pahlawan, tanah hutan taman wisata, tanah kolam air tawar, tanah bangunan gedung (tempat tinggal, gedung perdagangan, bangunan industri, bangunan tempat kerja/ jasa, tanah kosong, tanah jalan/ jembatan), tanah untuk bangunan bukan gedung dan tanah lainnya
2	Peralatan dan mesin	unit	207.932	20,74	Alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel dan alat ukur, alat-alat pertanian/ peternakan, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, aset tak berwujud
3	Gedung dan Bangunan	unit	12.876	1,28	bangunan gedung tempat kerja, gudang, gudang untuk bengkel, gudang instalasi, gedung laboratorium, bangunan kesehatan, tempat ibadah, tempat pertemuan, tempat pendidikan, tempat olah raga, pertokoan/ koperasi pasar, pos jaga, garasi/ pool, pemotongan hewan,



					kandang hewan / ternak, perpustakaan, terminal, tempat kerja lainnya, gedung tempat tinggal, mess/ wisma, asrama, hotel, monumen, tugu dan bangunan lainnya
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	unit	9.077	0,91	jalan, jembatan, bangunan air/ irigasi, bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam, bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, bangunan air bersih/ baku, bangunan air kotor, bangunan air lainnya, instalasi air minum/ bersih, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah non organik, instalasi gardu listrik, instalasi gas, instalasi pengaman, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon
5	Aset Tetap Lainnya	unit	771.575	76,96	buku dan perpustakaan, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, alat olahraga, hewan dan ternak serta tanaman
Jumlah			1.002.535	100,00	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Bangka, 2021

Sarana dan prasarana di Kabupaten Bangka pada tahun 2020 didominasi oleh aset tetap lainnya dengan jumlah sebanyak 771.575 unit atau sebesar 76,96 persen, kemudian diikuti oleh peralatan dan mesin sebanyak 207.932 unit atau sebesar 20,74 persen. Sementara gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; dan tanah merupakan sarana dan prasarana dengan jumlah paling sedikit yaitu 12.876 unit (1,28 persen), 9.077 unit (0,91 persen) dan 1.075 (0,11 persen) saja.

6. Rencana dan Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2020 diuraikan berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib maupun Pilihan yang disajikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah (APBD) Kabupaten Bangka sebagai dasar pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran.

Adapun gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 (*unaudited*) adalah sebagai berikut :

Tabel 1.10
Anggaran dan Realisasi
APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020

Uraian	Jumlah Anggaran		Bertambah/(Berkurang)	
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
A Pendapatan Daerah	1.140.955.837.297,00	1.136.647.395.404,40	(4.308.441.892,60)	99,62
Pendapatan Asli Daerah	126.497.504.000,00	155.729.845.760,46	29.232.341.760,46	123,11
Dana Perimbangan	803.506.147.597,00	761.255.023.545,00	(42.251.124.052,00)	94,74
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	210.952.185.700,00	219.662.526.098,94	8.710.340.398,94	104,13
B Belanja Daerah	1.270.841.728.698,23	1.152.653.865.431,02	(118.187.863.267,21)	90,70
Belanja Tidak Langsung	643.701.661.090,01	588.898.499.752,94	(54.803.161.337,07)	91,49
Belanja Langsung	627.140.067.608,22	563.755.365.678,08	(63.384.701.930,14)	89,89
Surplus/(Defisit)	(129.885.891.401,23)	(16.006.470.026,62)	113.879.421.374,61	12,32
C Pembiayaan Daerah				
Penerimaan Pembiayaan Daerah	130.393.875.401,23	131.157.002.485,23	763.127.084,00	100,59
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	507.984.000,00	507.984.000,00	0,00	100,00
Pembiayaan Netto	129.885.891.401,23	130.649.018.485,23	763.127.084,00	100,59
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	114.642.548.458,61	114.642.548.458,61	0,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Bangka, 2021 (*unaudited*)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pendapatan daerah Kabupaten Bangka tahun 2020 sebesar Rp.1.136.647.395.404,40 yang terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar Rp.155.729.845.760,46, dana perimbangan sebesar



Rp.761.255.023.545,00 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.219.662.526.098,94. Di sisi pengeluaran, belanja daerah sebesar Rp.1.152.653.865.431,02 yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.588.898.499.752,94 dan belanja langsung sebesar Rp.563.755.365.678,08, sehingga terdapat surplus anggaran sebesar Rp.114.642.548.458,61.

7. Perekonomian Daerah

a. Potensi Unggulan Daerah

Secara umum perekonomian Kabupaten Bangka dalam beberapa tahun ke depan masih akan didominasi oleh tiga sektor utama yang menjadi *core business*. Masing-masing berdasarkan peringkatnya adalah: (1) industri pengolahan; (2) pertanian, kehutanan dan perikanan; serta (3) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Berdasarkan metode terbaru, kontribusi ketiga sektor ini sangat dominan dalam pembentukan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangka. Persentase distribusi PDRB atas harga berlaku Kabupaten Bangka Tahun 2020, seperti yang tersaji pada tabel berikut dapat menjustifikasi fakta kondisi perekonomian tersebut.

Tabel 1.11
Perkembangan *Core Business* Perekonomian Kabupaten Bangka

No	Lapangan Usaha	Kontribusi PDRB (%)			Real Growth (%)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Industri Pengolahan	22,44	21,42	21,56	1,49	(1,18)	0,12
2.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,55	19,55	21,53	7,40	3,35	6,26
3.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,90	14,09	13,02	5,05	2,70	(7,73)

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara agregat, perekonomian Kabupaten Bangka pada tahun 2020 masih didominasi oleh tiga *core sector* tersebut dengan kontribusi 56,11 persen dari total PDRB, dengan laju pertumbuhan yang bervariasi



dari -7,73 hingga 6,26 persen. Dengan *core sector* yang sama, kontribusi tersebut dibandingkan tahun sebelumnya sedikit mengalami peningkatan yakni sebesar 1,05 persen dari total kontribusi tahun 2019 sebesar 55,06%.

Core business pertama dalam perekonomian dengan kontribusi sebesar 21,56% terhadap PDRB adalah sektor industri pengolahan, yang *notabene* merupakan representasi dari sektor industri pengolahan non migas. Selama beberapa tahun terakhir, sektor industri pengolahan terutama sub sektor industri logam dasar selalu memberikan kontribusi yang sangat dominan terhadap perekonomian. Tingginya kontribusi ini disebabkan karena secara tradisional, Kabupaten Bangka merupakan daerah dengan cadangan mineral timah yang tinggi, bahkan salah satu yang terbesar di dunia. Selain itu, regulasi ekspor yang mengatur secara spesifik mengenai output produksi dalam bentuk logam timah, bukan bijih timah secara langsung meningkatkan nilai tambah (*value added*) serta menambah cadangan devisa Negara. Namun, berdasarkan pengalaman masa lalu, terutama periode 1997 – 1998, menunjukkan bahwa sektor industri sangat rentan terhadap gejolak ekonomi, ketidakpastian perekonomian global secara masif akan mempengaruhi *supply and demand* output produksi, mengingat hampir sebagian besar bahan baku sektor industri dalam negeri merupakan produk impor yang berkorelasi negatif terhadap cadangan devisa dan defisit perdagangan.

Faktor lain yang menyebabkan tingginya kontribusi sektor industri pengolahan adalah karena sektor ini merupakan salah satu sektor yang digerakkan oleh sektor pertambangan dan pertanian. Fluktuasi yang terjadi di sektor pertambangan dan pertanian, kehutanan dan perikanan akan diikuti juga oleh fluktuasi di sektor industri pengolahan. Walaupun demikian, ternyata laju pertumbuhan sektor ini masih mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 0,12 persen dibandingkan laju pertumbuhan di tahun 2019 sebesar -1,18 %. Kondisi ini selain dipengaruhi oleh membaiknya kinerja ekspor daerah akibat kondisi perekonomian daerah yang relatif stabil, juga disebabkan meningkatnya realisasi investasi yang *include* ke dalam sektor ini terutama sub sektor industri logam dasar dan industri makanan dan minuman serta industri karet ditengah-tengah perkembangan perekonomian global yang belum kondusif, hal ini terlihat jelas dari peningkatan sarana maupun prasarana infrastruktur penunjang di sektor ini terutama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan



sektor pertambangan dan penggalian selaku sektor penggerak, baik itu pabrik, alat-alat produksi maupun sarana penunjang lainnya.

Dengan kata lain, keberadaan infrastruktur penunjang ibarat suplemen atau vitamin bagi pertumbuhan investasi. Dengan berlimpahnya potensi sumber daya alam yang dimiliki, pada masa mendatang, dengan stimulus investasi, diperkirakan kontribusi dan pertumbuhan sektor ini akan semakin meningkat, berjalan linear dengan peningkatan sektor penggerak terutama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan penurunan kontribusi sektor-sektor yang *unrenewable resource base*.

Core business kedua selain sebagai salah satu kontributor PDRB terbesar dalam perekonomian, sekaligus juga diproyeksi menjadi *the next prime mover* adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 21,53 persen. Disebut *the next prime mover* karena sektor ini mampu (1) memberikan kontribusi besar dalam perekonomian, baik ditinjau dari aspek harga berlaku, harga konstan, tanpa timah maupun dengan timah, (2) memiliki derajat kepekaan dan derajat penyebaran yang tinggi, dan (3) merupakan sektor utama yang banyak memberikan pengaruh positif terhadap sektor lain. Tiga keunggulan utama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadikannya selalu memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah adalah (i) *input* produksinya yang sebagian besar *domestic resource base*, (ii) memiliki tingkat *backward and forward linkage* yang tinggi dengan sektor-sektor lainnya, serta (iii) *output-nya yang export oriented*. Dengan ketiga unggulan ini, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor yang paling tahan terhadap krisis ekonomi dan moneter. Bahkan hingga saat ini, sebagian besar komoditi dan devisa ekspor Kabupaten Bangka berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, terutama yang berasal dari komoditi perkebunan dan perikanan.

Hal lain yang menjadikan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai *the next prime mover* adalah laju pertumbuhannya yang cenderung berfluktuatif namun jika diperhatikan secara mendetail bahwa peningkatan pertumbuhan tersebut tetap berada di atas 3 persen dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan sektor pertanian mencapai 7,40 persen, kemudian menurun menjadi 3,35 persen di tahun 2019, dan kembali meningkat menjadi 6,26 persen di tahun 2020.



Kondisi ekonomi global yang cenderung stabil pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya harga jual beberapa komoditi utama seperti lada, karet dan kelapa sawit. Begitu juga dengan tingkat harga input produksi utama seperti pupuk dan sarana produksi lainnya yang relatif stabil. Untuk lebih meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan, maka pengembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di masa depan seharusnya diarahkan pada peningkatan investasi pengembangan agroindustri yang disertai dengan perbaikan kualitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini sangat mungkin untuk dilakukan, karena sektor pertanian memiliki tingkat *backward and forward linkage* yang tinggi.

Core business ketiga adalah sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah sektor pertanian yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan produk berbagai jenis barang untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga. Pada tahun 2020 kontribusi sektor ini berdasarkan harga berlaku adalah 13,02 persen, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 14,09 persen. Tingginya kontribusi sektor ini dikarenakan memiliki keunggulan daya saing terutama produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan Kabupaten Bangka dengan dukungan pembiayaan, investasi, pengembangan kapasitas dan manajemen usaha serta akses pemasaran yang luas.

Walaupun memberikan kontribusi besar, namun pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi sepeda motor dan mobil ini menunjukkan *trend* yang cenderung fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Jika pada tahun 2018, pertumbuhannya mencapai 5,05 persen, dan tahun 2019 pertumbuhannya melambat hingga mencapai 2,70 persen, maka pada tahun 2020 pertumbuhannya justru kembali mengalami perlambatan hingga mencapai -7,73 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh daya beli masyarakat yang menurun tajam akibat pandemi COVID-19 yang melemahkan kemampuan ekonomi hampir seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun pertumbuhannya cenderung fluktuatif, bukan berarti sektor ini tidak dapat terus-menerus dijadikan andalan perekonomian. Hal ini disebabkan karena sektor ini memiliki daya tahan yang kuat terhadap gonjangan perekonomian, mampu menyerap tenaga kerja dan mampu mendorong daya saing daerah.



Dari gambaran perekonomian di atas dapat diprediksi bahwa dalam beberapa tahun ke depan ketika deposit timah sudah habis terkuras, maka *core business* dan posisi relatif sektor-sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka akan mengalami pergeseran. Potret kondisi perekonomian tanpa timah ini sekaligus juga memberikan gambaran bagaimana prospek perekonomian di masa depan. Sektor pertanian dan perdagangan akan tetap mendominasi. Sedangkan sektor pertambangan diperkirakan tidak lagi menjadi bagian *core business* yang bisa dikembangkan, sebagai gantinya pengembangan perekonomian harus diarahkan kepada sektor bangunan, sektor jasa-jasa dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di masa depan, mulai beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Bangka sudah mulai mempersiapkan infrastruktur dan suprastruktur pengembangan sektor-sektor prospektif yang akan menjadi *core business* beberapa tahun kedepan, melalui beberapa kegiatan pembangunan dan berbagai regulasi yang dapat menjadi akseleratornya.

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Dalam lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Bangka cenderung terus membaik, hal ini diindikasikan oleh PDRB, baik berdasarkan harga berlaku (ADHB) maupun konstan (ADHK) yang terus meningkat. Data lengkap perbaikan perekonomian dalam lima tahun terakhir tersebut tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1.12
Perkembangan PDRB Kabupaten Bangka
dengan Timah Tahun 2016 - 2020

Tahun	PDRB Harga Berlaku (Juta Rp)	PE (%)	PDRB Harga Konstan (Juta Rp)	PE (%)
2016	11.771.681	7,00	8.906.228	4,63
2017	12.807.936	8,80	9.355.326	5,04
2018	13.310.565	3,97	9.778.032	4,52
2019	13.770.517	3,58	10.060.464	2,89
2020	13.944.329	1,26	9.986.938	(0,73)

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa PDRB ADHB meningkat dari Rp. 11.771.681 pada tahun 2016 menjadi Rp. 13.944.329 pada tahun 2020. Sedangkan PDRB ADHK,



meningkat dari Rp.8.906.228 pada tahun 2016 menjadi Rp.9.986.938 pada tahun 2020. Walaupun demikian, realitas perekonomian yang terus membaik tersebut, ternyata kontradiktif dengan pertumbuhannya. Trend pertumbuhan ekonomi terlihat cenderung mengalami perlambatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Pada tahun 2016, PE sebesar 4,63%, mengalami peningkatan menjadi 5,04% pada tahun 2017, kemudian turun menjadi 4,52% pada tahun 2018, selanjutnya kembali turun menjadi 2,89 pada tahun 2019, dan kembali mengalami perlambatan yang sangat signifikan hingga menyentuh -0,73% pada tahun 2020.

Secara umum, perlambatan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kondisi perekonomian global dan nasional mengalami kontraksi, sehingga pada akhirnya juga mempengaruhi kondisi perekonomian lokal di Kabupaten Bangka.

Indikator perekonomian penting lainnya adalah PDRB perkapita. Pertumbuhan positif dari PDRB perkapita mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat di Kabupaten Bangka semakin baik. Berdasarkan metode terbaru, PDRB perkapita Kabupaten Bangka pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.40.557.000,- dengan laju pertumbuhan mengalami perlambatan sebesar -0,65 persen dari Rp.40.821.000,- pada tahun 2019. Selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2016 sampai 2020, PDRB perkapita Kabupaten Bangka mengalami pertumbuhan rata-rata 2,81 persen.

Tabel 1.13
PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan
Kabupaten Bangka Tahun 2016 – 2020

Tahun	PDRB Per Kapita (Ribuan Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	37.049	4,76
2017	39.493	6,60
2018	40.238	1,89
2019	40.821	1,45
2020	40.557	(0,65)
Rata-rata Pertumbuhan (%)		2,81

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2020



8. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan yang digunakan secara universal di seluruh dunia. IPM yang semakin baik menandakan makin baiknya pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara atau daerah. Dalam pengukurannya, IPM merupakan komposit dari tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indikator pendidikan terdiri dari variabel antara lain angka harapan lama sekolah dan rataan lama pendidikan. Indikator kesehatan disusun oleh tingkat harapan hidup saat lahir. Sementara indikator perekonomian terdiri dari *purchasing power parity* atau paritas daya beli masyarakat.

Pendidikan yang akan melahirkan sumber daya manusia handal merupakan faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi, bahkan dapat menjadi modal dasar dari kekayaan suatu daerah. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang pada dasarnya bersifat pasif; pendidikan-lah akan membuat SDM menjadi agen-agen aktif yang akan mengumpulkan modal, mengeksplorasi SDA, membangun berbagai macam organisasi sosial, ekonomi, dan politik, serta melaksanakan pembangunan. Dengan demikian, jelaslah bahwa jika di suatu wilayah tidak dikembangkan sistem pendidikan untuk mengembangkan keahlian, pengetahuan dan potensi masyarakat secara efektif, maka untuk selanjutnya wilayah tersebut tidak akan dapat melaksanakan pembangunan dan pengelolaan ekonomi. Kondisi inilah yang menyebabkan indikator pendidikan menjadi ukuran penting dalam IPM.

Pembangunan kesehatan dalam rangka terciptanya kualitas sumber daya manusia sebagai insan harus dilakukan dalam keseluruhan proses kehidupannya mulai dari dalam kandungan bahkan jauh sebelumnya, yaitu dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan para calon ibu, kemudian sebagai bayi, balita, usia sekolah, remaja, pemuda, usia produktif, sampai kepada usia lanjut. Dengan demikian pembangunan kesehatan juga mempunyai peranan yang amat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Oleh karena itu, sektor ini dapat dipastikan menjadi faktor penentu bagi perkembangan suatu wilayah.

Daya beli masyarakat merupakan ukuran ekonomi yang menggambarkan seberapa besar kemampuan atau kesejahteraan masyarakat sebagai dampak



pembangunan. Oleh karena itu, sebagai representasi indikator perekonomian, daya beli masyarakat menjadi bagian penting dalam pengukuran IPM.

Dalam konteks Kabupaten Bangka, IPM berdasarkan metode terbaru terus menunjukkan perbaikan, yang sekaligus juga menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah mengarah pada pencapaian hasil seperti yang diharapkan. Selengkapnya trend perkembangan IPM dalam lima tahun terakhir tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1.14
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,43	71,09	71,80	72,39	72,40
2	Pengeluaran Per Kapita (000 Rp)	11.279	11.420	12.043	12.480	12.416
3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,37	12,58	12,68	12,76	12,77
4	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,96	8,19	8,20	8,23	8,24
5	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,52	70,56	70,73	70,99	71,06

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2016 -2020, IPM Kabupaten Bangka terus mengalami peningkatan dari 70,43 di tahun 2016 hingga 72,40 di tahun 2020. Peningkatan indeks tersebut sebagai akibat peningkatan indeks komposit ketiga variabel pembentuk-nya. Dari sisi pendidikan, angka harapan lama sekolah meningkat dari 12,76 tahun pada tahun 2019 menjadi 12,77 tahun di tahun 2020. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,23 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,24 tahun di tahun 2020. Dari sisi kesehatan, angka harapan hidup meningkat dari 70,99 tahun pada tahun 2019 menjadi 71,06 tahun di tahun 2020. Akan tetapi dari sisi ekonomi, daya beli masyarakat mengalami penurunan, dari Rp.12.480.000,- pada tahun 2019 menjadi Rp.12.416.000,- di tahun 2020, hal ini disebabkan kondisi pandemi COVID-19 yang melemahkan perekonomian seluruh lapisan masyarakat.



Fakta bahwa terus terjadi peningkatan IPM dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah dijalankan dalam koridor yang benar.

C. Struktur Organisasi

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melakukan beberapa kali penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka. Dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melakukan beberapa kali penataan kelembagaan terakhir pada tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka. Selain itu penataan kelembagaan dilakukan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.

Secara rinci kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari 17 Dinas Daerah, yaitu :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A;
 3. Dinas Sosial Tipe B;
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A;
 6. Dinas Perhubungan Tipe C;



7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
 9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
 11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
 12. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A;
 13. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A;
 14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A;
 15. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
 16. Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;
 17. Dinas Perikanan Tipe A
 18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B;
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B;
 3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B;
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Sungailiat Tipe A;
 2. Kecamatan Belinyu Tipe A;
 3. Kecamatan Riau Silip Tipe A;



4. Kecamatan Mendo Barat Tipe A;
5. Kecamatan Bakam Tipe A;
6. Kecamatan Puding Besar Tipe A;
7. Kecamatan Pemali Tipe A;
8. Kecamatan Merawang Tipe A;

D. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan (*gap*) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Permasalahan pembangunan yang akan dibahas dalam LKjPD adalah permasalahan yang terkait dengan pencapaian sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Tahun 2020.

Adapun permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

- 1) Permasalahan prioritas bidang perekonomian. Perekonomian di Kabupaten Bangka menghadapi beberapa permasalahan terkait dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, transformasi struktural ekonomi sektor unggulan, dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus terus dilakukan sebagai prasyarat yang memiliki banyak dampak (*multiplayer effect*) pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, keberhasilan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan tidak hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) tetapi juga harus disertai keberhasilan mengatasi kemiskinan (*pro poor*), pengangguran (*pro job*), pemerataan distribusi pendapatan (*pro equity*), dan kualitas lingkungan (*pro environment*).
- 2) Permasalahan prioritas bidang pertanian. Pertanian merupakan sektor unggulan dan prospektif sebagai penggerak roda perekonomian Kabupaten Bangka. Penguatan sektor ini harus dilakukan sebagai sektor utama penggerak pembangunan Kabupaten Bangka ke depan.
Permasalahan utama pembangunan sektor unggulan ini terkait belum optimalnya pembangunan industrialisasi bidang pertanian, perkebunan, dan



perikanan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) sektor tersebut. Permasalahan utama tersebut disebabkan rendahnya akses teknologi, kualitas SDM dalam pemanfaatan teknologi serta terbatasnya investasi dalam pengelolaan produksi.

- 3) Permasalahan prioritas bidang pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, kinerja sektor bidang industri kepariwisataan belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan perekonomian daerah. Kepariwisataan di Kabupaten Bangka belum menunjukkan tingkat perkembangan yang pesat yang ditunjukkan oleh belum signifikannya kunjungan wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2019 sebanyak 90.714 orang. Jumlah ini masih belum optimal dibandingkan potensi, intensitas kegiatan dan promosi serta dukungan dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

Permasalahan pengembangan bidang pariwisata yaitu masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung pengembangan kepariwisataan, rendahnya partisipasi masyarakat, belum maksimalnya pengembangan potensi wisata, terbatasnya SDM bidang kepariwisataan, terbatasnya akses menuju objek wisata.

- 4) Permasalahan prioritas bidang pendidikan. Pembangunan prioritas bidang pendidikan memiliki permasalahan masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, ketersediaan guru yang kurang merata, masih terdapatnya angka putus sekolah, serta rendahnya kompetensi guru yang berkualitas.
- 5) Permasalahan prioritas bidang kesehatan. Kinerja pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas kesehatan penduduk. Angka harapan hidup masih dibawah rata-rata nasional, tingginya angka *stunting*, tingginya angka kematian bayi, masih terjadinya kasus gizi buruk dan rendahnya rasio dokter terhadap jumlah penduduk serta rendahnya jumlah jamban yang dimiliki warga, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.



- 6) Permasalahan prioritas bidang kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang komponennya terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita rumah tangga. Walaupun IPM Kabupaten Bangka mengalami peningkatan dalam periode 2016-2020, yaitu sebesar 70,43 pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 72,40 pada tahun 2020, akan tetapi masih berada di bawah angka rata-rata IPM nasional.
- 7) Permasalahan prioritas bidang reformasi birokrasi dan *e-government*. Dalam periode tahun 2014-2019 terdapat berbagai penghargaan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Bangka di tingkat nasional maupun provinsi yang terkait reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik. Namun, masih ada beberapa permasalahan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang masih perlu terus diperbaiki. Beberapa isu penting dalam bidang reformasi birokrasi dan *E-Government* di era industri 4.00 ini menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik membuat Pemerintah Kabupaten Bangka memberikan perhatian serius pada penerapan *e-government*. Reformasi birokrasi juga masih menghadapi permasalahan kedisiplinan aparatur, kualitas kinerja aparatur serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- 8) Permasalahan prioritas bidang infrastruktur. Prioritas bidang ini memiliki sasaran meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan. Masalah mendasar pembangunan infrastruktur adalah ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang belum memadai untuk menunjang pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur berperan penting dalam mobilitas manusia, distribusi barang dan jasa serta untuk mendukung konektivitas antar pemukiman dan kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi potensial. Hingga tahun 2019 kondisi infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 74,59 persen. Layanan infrastruktur jalan di Kabupaten Bangka yang belum optimal tentunya menjadi faktor penghambat bagi aksesibilitas masyarakat dan kelancaran kegiatan bidang ekonomi. Permasalahan pembangunan infrastruktur lainnya yang harus ditingkatkan adalah



pembangunan saluran irigasi, saluran drainase, instalasi air minum dan gedung-gedung pelayanan umum lainnya.

- 9) Permasalahan prioritas bidang kemiskinan. Prioritas bidang ini memiliki sasaran berkurangnya jumlah masyarakat miskin yang ditandai dengan meningkatnya jumlah keluarga kategori keluarga prasejahtera I, pra sejahtera II, dan prasejahtera III.

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu agenda dan isu strategis Kabupaten Bangka ke depan. Hal tersebut cukup relevan karena kemiskinan merupakan masih menjadi masalah yang mendasar yang menjadi hambatan dalam peningkatan perekonomian maupun pembangunan di Kabupaten Bangka. Persentase kemiskinan di Kabupaten Bangka cenderung menurun dan hingga tahun 2019 yaitu sebesar 4,92%. Angka ini berada di atas rata-rata persentase kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,62%, akan tetapi masih berada di bawah angka rata-rata nasional yang mencapai angka 6,56%.

- 10) Permasalahan prioritas bidang pengangguran. Prioritas bidang ini memiliki sasaran berkurangnya angka pengangguran. Tingkat pengangguran secara teoritis memiliki hubungan positif dengan besarnya tingkat kemiskinan. Di Kabupaten Bangka, tingkat pengangguran cenderung mengalami trend penurunan. Penurunan tingkat pengangguran cukup signifikan dimana pada tahun 2019 tingkat pengangguran berada pada angka 3,8 persen. Capaian ini berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 3,62 persen, akan tetapi masih di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 5,23 persen. Namun demikian, masalah pengangguran dan langkanya lapangan pekerjaan merupakan masalah klasik yang dihadapi dan harus diselesaikan dalam pembangunan. Permasalahan mengurangi pengangguran bidang ini yaitu rendahnya produktivitas tenaga kerja, rendahnya keterampilan tenaga kerja, terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja.



- 11) Permasalahan prioritas bidang lingkungan hidup. Prioritas bidang ini memiliki sasaran meningkatnya nilai indeks kualitas lingkungan hidup. Pemanfaatan kekayaan alam harus memperhatikan aspek berkelanjutan untuk kepentingan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Permasalahan terkait prioritas lingkungan hidup yaitu rendahnya ketaatan terhadap peraturan tata kelola lingkungan, terdapatnya tumpang tindih peraturan antar lembaga, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 12) Permasalahan prioritas bidang penataan ruang adalah belum optimalnya pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang.
- 13) Permasalahan pangan dan tata kelola air adalah belum optimalnya produktivitas pangan. Permasalahan pangan terkait tingginya ketergantungan pangan terhadap daerah luar. Ketergantungan pangan menyebabkan kekurangan gizi pada anak erat kaitannya dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Rendahnya ketahanan pangan rumah tangga dapat menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas asupan gizi anak. Faktor lain yang mempengaruhi adalah buruknya pola asuh terutama pemberian makanan bayi dan balita yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orangtua, buruknya kondisi lingkungan seperti akses sanitasi dan air bersih, dan rendahnya akses pada fasilitas kesehatan yang juga berdampak pada tingginya angka *stunting*.
Penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar belum menjangkau seluruh penduduk Kabupaten Bangka. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak menunjukkan peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Selain itu, penurunan kualitas air sungai dan debit air bawah tanah cenderung terbatas juga disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang juga berdampak pada ketersediaan air.
- 14) Permasalahan investasi adalah belum optimalnya perkembangan investasi. Perkembangan nilai investasi baik dalam negeri maupun penanaman modal asing masih belum signifikan dalam mendorong kinerja perekonomian daerah khususnya sektor unggulan daerah.



E. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bangka

Berdasarkan data dan informasi dalam permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi isu strategis di Kabupaten Bangka sebagai berikut :

1) Tingginya Angka Kemiskinan

Isu kemiskinan mencakup permasalahan multidimensi yang sangat kompleks, karena bukan hanya terkait dengan rendahnya pendapatan, akan tetapi berhubungan dengan kerentanan dan kerawanan orang, kelompok, atau komunitas. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat global, nasional, provinsi, maupun Kabupaten Bangka. Bahkan sesuai dengan amanat SDG's di tahun 2030 kemiskinan harus diupayakan menjadi nol (*zero poverty*).

2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu indikator yang digunakan secara universal untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan komposit dari indikator pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indikator pendidikan direpresentasikan oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama pendidikan. Indikator kesehatan direpresentasikan oleh tingkat harapan hidup saat lahir. Indikator perekonomian direpresentasikan oleh *purchasing power parity* atau paritas daya beli masyarakat.

IPM Kabupaten Bangka mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah mengarah pada pencapaian hasil seperti yang diharapkan.

Angka IPM Kabupaten Bangka belum optimal dikarenakan belum optimalnya kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas dalam pembangunan agar kualitas sumber daya manusia meningkat yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.



3) Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional. Pemerintah Kabupaten Bangka masih mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertambangan dan industri pengolahan yang dianggap tidak *sustainable* dan rentan terhadap volatilitas.

Trend pertumbuhan ekonomi terlihat cenderung mengalami perlambatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,54%, meningkat pada tahun 2016 menjadi 4,63%, kembali mengalami peningkatan menjadi 5,04% pada tahun 2017, kemudian turun menjadi 4,51% pada tahun 2018, dan kembali mengalami perlambatan yang sangat signifikan hingga menyentuh 2,93% saja pada tahun 2019. Secara umum, perlambatan ini cenderung disebabkan oleh dua faktor utama.

Pertama, menurunnya fundamental perekonomian nasional dalam menghadapi tekanan ekonomi global, kondisi tersebut diperkuat dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi secara nasional yang hanya mencapai 5,02% pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang justru mencapai 5,17%, walaupun tingkat elastisitasnya tidak begitu kuat, namun tetap mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan momentum pertumbuhan ekonomi regional.

Kedua, karena kebijakan regulasi perdagangan komoditi timah dan kebijakan operasional smelter sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 1806 K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan salah satu poin penting yaitu setiap smelter wajib menerapkan Competent Person (CP) sebagai upaya penataan tambang dan kepastian asal-usul bahan baku mineral, dimana setiap sumber daya dan cadangan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh CP terkait sebelum akhirnya dapat memproses Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Aturan tersebut mengakibatkan setidaknya 30 (tiga puluh) smelter timah swasta yang ada berhenti beroperasi, sementara yang dapat beroperasi hanya PT. Timah dan 3 (tiga) smelter swasta. Kondisi tersebut menyebabkan produksi timah menurun sehingga otomatis ekspor timah pun menurun, sementara ekspor timah memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bangka. Kebijakan



tersebut diambil selain untuk membatasi ekspor dalam bentuk bahan mentah dan *illegal mining* juga lebih berorientasi kepada nilai tambah (*value added*) komoditas sekaligus mengurangi perusakan lingkungan secara masif (*pro environment*).

Pembangunan industri pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru belum maksimal padahal sektor ini memiliki peran meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan, dan masyarakat wisata pada umumnya dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Secara umum nilai tambah (*value added*) dari bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan masih harus dioptimalkan.

Selanjutnya, struktur dan kinerja industri dan pertanian masih lemah karena hampir seluruh komoditas pertanian berorientasi ekspor sehingga rentan terhadap kondisi perekonomian global. Berbagai langkah dilakukan untuk melakukan transformasi ekonomi sudah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pembangunan sektor strategis namun masih belum memadai dan perlu dipercepat untuk menggerakkan sektor riil, mengejar ketertinggalan, dan menghadapi persaingan yang meningkat.

Minat investasi meskipun meningkat belum sebesar yang diharapkan. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang besar dalam menyerap lapangan kerja belum diimbangi oleh kualitas UMKM yang memadai.

4) Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan bagian dari area reformasi birokrasi. Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 telah mengamanatkan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi instansi pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Bangka yang hasilnya ditunjukkan dalam bentuk Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu : mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.



Perkembangan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka pada tahun 2019 sebesar 60,80 dengan kategori “B” mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 57,69 dengan kategori “CC”. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka sudah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, antara lain :

- Melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan revisi atau pencabutan beberapa peraturan yang dinilai tidak harmonis
- Menyusun peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja RPJMD dan pengembangan e-gov telah dilakukan, namun masih focus pada kebutuhan tata kelola internal; dan
- Melakukan evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis yang telah disusun guna memastikan keselarasan struktur organisasi dengan peta proses bisnis yang juga telah ditindaklanjuti dengan rencana restrukturisasi di beberapa OPD.

Walaupun Indeks Reformasi Birokrasi sudah mendapat kategori “B”, akan tetapi masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan dalam implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Bangka antara lain :

- Telah melakukan penunjukan agen perubahan, namun agen perubahan yang ditunjuk belum mampu memberikan kontribusi dalam perubahan budaya kerja di masing-masing unit kerjanya.
- Penataan sistem manajemen SDM belum berjalan secara maksimal, seperti: belum dilakukannya *assessment* terhadap seluruh pegawai, belum adanya sistem perencanaan pengembangan kapasitas SDM yang terpadu dan belum adanya penetapan kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi;
- Hasil pengukuran kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian *reward & punishment*, pengembangan karir serta kompetensi pegawai;



- Telah menetapkan unit kerja Zona Integritas pada unit kerja strategis dan memberikan pelayanan secara langsung ke masyarakat, namun upaya-upaya pembangunan ZI pada unit kerja tersebut dinilai belum optimal.
- Belum meratanya peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap OPD, peningkatan hanya terlihat dari pemanfaatan aplikasi dan penerapan kebijakan yang bersifat umum, belum terlihat adanya inovasi-inovasi dari masing-masing OPD dalam memecahkan permasalahan terkait birokrasi maupun upaya dalam peningkatan kepuasan pengguna layanan.
- Hasil pengukuran Indeks Integritas Jabatan sebesar 2,73 dari skala 4 dan Indeks Integritas Organisasi sebesar 3,20 dari skala 0-4 menunjukkan masih ada *gap* sehingga masih ada ruang perbaikan yang diperlukan dalam penerapan sistem integritas.
- Hasil survey persepsi pelayanan menunjukkan Indeks 3,33 dalam skala 4. Hal ini menunjukkan masih ada *gap* atau selisih antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima.
- Hasil survey persepsi korupsi dengan Indeks 3,31 dalam skala 4 menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan.

5) Pemerataan Infrastruktur

Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah ternyata belum dapat memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat sehingga kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur (yang meliputi transportasi, energi, ketenagalistrikan, pos dan telematika, sumber daya air, serta perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan/sanitasi) belum maksimal. Hal ini terutama karena keterbatasan APBD Kabupaten Bangka. Sementara keterlibatan swasta sangat minim dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur yang bersifat komersial.

Sampai dengan tahun 2019 proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 74,59 %, proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 98,91 %, proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik mencapai 93,77 %, masyarakat yang terlayani sanitasi dasar baru mencapai 94,12 %, masyarakat yang memiliki



akses air bersih baru mencapai 98,71 %, dan masyarakat miskin yang terlayani rumah layak huni mencapai 97,40 %.

Berdasarkan data di atas, pemerintah daerah harus memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur karena ketersediaan infrastruktur memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian (investasi, pariwisata, perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, dll), serta kualitas SDM (kesehatan, pendidikan, perumahan, pemukiman, sanitasi, dll), yang akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, harus diperhatikan juga pemerataan penyediaan infrastruktur antar wilayah Kecamatan agar terjadi pemertaan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kecamatan.

6) Pariwisata Sebagai Sektor Ekonomi Alternatif

Sektor Pariwisata adalah sektor ekonomi potensial dan bersifat *sustainable* di Kabupaten Bangka sehingga diharapkan dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi masa depan. Hal ini ditunjukkan oleh perkembangan dalam 5 (lima) tahun terakhir di mana jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan trend peningkatan dengan rata-rata 86.966 orang per tahun dengan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 90.714 orang pada tahun 2019, diikuti dengan peningkatan *spending of money tourism* sebesar Rp. 16,31 Milyar pada tahun 2019.

Pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pembangunan pariwisata salah satunya melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Sungailiat. Pengembangan ini dimungkinkan karena sesuai peruntukan tata ruang wilayah Kabupaten Bangka (RTRW) bahwa daerah sepanjang pantai timur Kabupaten Bangka diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata. Melalui penetapan KEK Pariwisata diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan pariwisata dan perekonomian Kabupaten Bangka. Kemungkinan hal ini sangat besar bisa terwujud karena KEK menawarkan sejumlah kemudahan bagi investor dalam berinvestasi mulai dari insentif fiskal, jaminan investasi, kepastian hukum, pelayanan satu pintu, hingga pembangunan infrastruktur.

Akan tetapi beberapa hal juga masih menjadi kendala dan penghambat dalam pembangunan pariwisata antara lain :



- Investasi pada sektor pariwisata sangat kecil, hanya sekitar 0,15 % dari total investasi pada tahun 2019
- Penyediaan infrastruktur pendukung menuju destinasi wisata unggulan terkendala dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah
- Kemitraan antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha pariwisata belum optimal

7) Kualitas Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang harus menjadi fokus pemerintah pada perencanaan pembangunan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Kabupaten Bangka dengan potensi pertambangan timah yang besar tentu saja memiliki potensi perusakan lingkungan yang tidak kecil baik di daratan maupun di perairan dan laut. Data menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka tahun 2019 berada pada angka 65,10, sehingga masih perlu upaya lebih besar untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas.
- b. Isu *Green Economy* yaitu pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Ekonomi hijau dilandasi dengan model pembangunan ekonomi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan dan pengetahuan ekonomi ekologis.
- c. Pelestarian lingkungan hidup masih menghadapi permasalahan terkait lemahnya kesadaran masyarakat dalam perilaku menjaga alam, rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kerusakan lingkungan, rendahnya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, konflik regulasi pemanfaatan sumber daya alam antar pemerintah pusat dan daerah.
- d. Pelestarian lingkungan hidup harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka karena dampak kerusakan lingkungan yang massif pada akhirnya dapat



mengakibatkan bencana seperti banjir, longsor, wabah penyakit dan sebagainya yang akan memerlukan biaya sangat besar untuk menanganinya.

F. Maksud Dan Tujuan

Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2020 disusun sebagai bentuk perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Bangka. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategik Pemerintah Kabupaten dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bangka atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategik telah dicapai selama tahun 2020.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi menjadikan Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Bangka bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa depan. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Bangka dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.



Sistematika penyusunan Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang data umum organisasi Kabupaten Bangka, struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bangka, permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2020 serta sistematika penyusunan Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2020.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis.

B. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan organisasi pada masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB II Perencanaan Kinerja

Pernyataan Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka 2005-2025. Adapun Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 adalah : **"Kabupaten Bangka sebagai Pusat Industri dan Perdagangan di Bangka Belitung yang Berwawasan Lingkungan dan Didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik Menuju Masyarakat Maju, Adil, dan Sejahtera"**.

Visi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan perkapita melalui peningkatan nilai tambah (*value added*) dari sektor-sektor potensial (*leading sectors*) yang dimiliki kabupaten Bangka selama ini berupa industri dan perdagangan yang terkait dengan perkebunan seperti lada, karet dan kelapa sawit, sub sektor perikanan darat dan laut serta sub sektor pariwisata. Pada tahap awal, upaya untuk memantapkan pengembangan sektor-sektor unggulan/potensial ini akan menjadi prioritas untuk mampu mencapai tahapan menjadi daerah industri dan perdagangan yang mengolah dan memasarkan hasil-hasil perkebunan, perikanan, kelautan dan pariwisata.

Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka 2005-2025 di atas akan dilaksanakan melalui 6 misi pembangunan berikut :

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas SDM;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung;
5. Menciptakan kondisi dan lingkungan investasi yang kondusif;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menuju sistem tata pemerintah yang baik (*good governance*).



Berdasarkan arahan RPJPD Kabupaten Bangka, pada tahap pembangunan lima tahun ketiga, upaya untuk melakukan reformasi ekonomi menuju perekonomian yang berbasis keunggulan kompetitif akan semakin ditingkatkan. Peningkatan nilai tambah (value added) dari sektor-sektor unggulan daerah melalui pembangunan industri yang mengolah sektor unggulan daerah akan dikembangkan sebagai industri pendukung (supporting industries) dalam konteks pembangunan industri nasional yang menerapkan pendekatan pengembangan industri melalui konsep kluster dalam upaya membangun daya saing industri yang berkelanjutan.

Pembangunan kualitas SDM melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat harus dijadikan prioritas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kemandirian lokal. Upaya untuk mengurangi berbagai dampak negatif yang mungkin timbul dari pembangunan berupa kesenjangan antar daerah (backwash effect) dan kelompok masyarakat harus pula dijadikan prioritas pembangunan. Upaya ini dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelompok masyarakat yang dirugikan dari proses pembangunan serta pembangunan kewilayahan lainnya.

Pengembangan kawasan pariwisata yang selama ini telah dicanangkan, secara perlahan mulai direalisasikan pada periode ini. Kawasan pariwisata yang dicirikan dengan tumbuh dan berkembangnya perdagangan jasa dan sektor UMKM. Dengan demikian, perkembangan kota yang serasi, seimbang, dan terintegrasi dapat terwujud. Di samping itu, mengingat pengembangan kawasan pariwisata ini menggunakan potensi alam, budaya dan atraksi, maka konsep ini sangat mendukung perlindungan dan pengembangan budaya sosial lokal (*local social culture*).

Sejalan dengan hal tersebut, agar mampu memanfaatkan berbagai peluang dan sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan di era global ini, upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif akan terus ditingkatkan, terutama melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Di samping itu, hal yang paling penting dan mendasar adalah upaya untuk melakukan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM harus mulai diprioritaskan penanganannya dalam upaya untuk mendukung paradigma pembangunan kemandirian lokal yang menempatkan faktor manusia sebagai pusat dalam proses pembangunan.

Guna mewujudkan paradigma ini, birokrasi daerah juga perlu melakukan pembenahan. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang



menempatkan aspek partisipasi, transparansi, aspiratif, bertanggungjawab, efektif dan adil, kesetaraan, supremasi hukum, konsensus dan memiliki visi strategis harus menjadi prinsip pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan ekonomi maupun pembangunan dalam arti yang lebih luas.

Sejalan dengan arahan RPJPD tersebut maka visi dan misi RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan ketika pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan cita-cita atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan. Visi pembangunan Kabupaten Bangka dalam RPJMD tahun 2019-2023 sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

“BANGKA SETARA”

Bangka Setara tersebut terdiri dari 2 (dua) kata kunci yaitu **Bangka** dan **Setara**. Kata Bangka merefleksikan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Bangka yaitu unsur masyarakat, pengusaha, dan pemerintahan daerah. Kata Setara adalah akronim dari Sejahtera dan Mulia. Kata Sejahtera merefleksikan suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bangka yang terpenuhi Ketahanan Materil dan Spiritual yang ditunjukkan oleh Pertumbuhan Ekonomi tinggi, Meratanya Tingkat Pendapatan Masyarakat, Keterbebasan dari Kemiskinan, SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Terciptanya Pemerataan Pembangunan antar Wilayah. Kata Mulia merefleksikan suatu kondisi masyarakat yang Memiliki Harkat dan Martabat serta Kedudukan yang Setara/Mulia/Tinggi karena Keberhasilan dalam Pencapaian Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial yang Ideal. Masyarakat yang Mulia Memiliki Kemampuan dan Membentuk Karakter serta Peradaban yang Bermartabat dan Unggul dalam Menjadi Manusia yang Sehat, Berilmu Pengetahuan, Cakap, Kreatif dan Mandiri.



B. Misi

Orientasi pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 ditujukan pada penyiapan SDM yang berkualitas, berdayasaing dan berakhlak mulia untuk membangun daerah secara merata dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Bangka yang sejahtera. Dalam rangka mewujudkan visi “Bangka Setara”, maka diupayakan melalui 5 (lima) misi Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023, yaitu:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berbasis teknologi informasi.
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.
- 3) Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah.
- 4) Mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional.
- 5) Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Gambar 2.1
Visi Misi Bangka Bermartabat RPJMD Kabupaten Bangka 2019 - 2023





Penjelasan Misi :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berbasis teknologi informasi

Persoalan kehidupan masyarakat dengan kebutuhan dan keinginan yang semakin bervariasi sesuai tuntutan perubahan lingkungan harus mendapat pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat yang bermutu melalui tata kelola pemerintahan oleh aparatur yang profesional berlandaskan prinsip good and clean governance yang ditunjukkan kinerja birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel berbasis teknologi informasi.

Untuk mencapai misi kesatu ini, kerangka berpikir perencanaan integrative disajikan pada Gambar 2.2

Gambar 2.2

**Kerangka Berpikir Perencanaan Integrative Misi 1 RPJMD Kabupaten Bangka
2019 - 2023**



2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah yang ditunjukkan oleh semakin membaiknya taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan menjadi faktor strategis dibarengi dengan peningkatan kesetaraan gender.



Untuk mencapai misi kedua ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3
Kerangka Berpikir Perencanaan Integrative Misi 2 RPJMD Kabupaten Bangka
2019- 2023



3. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah

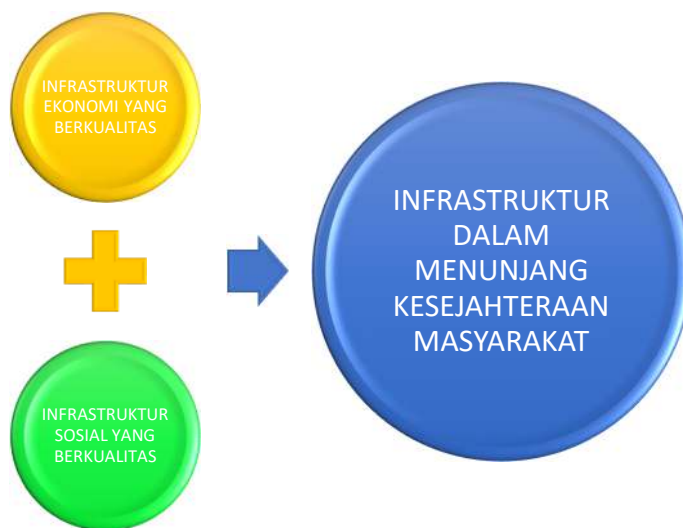
Pembangunan infrastruktur antar wilayah yang merata di berbagai sektor merupakan prasyarat utama dalam mendukung keberhasilan pengembangan potensi daerah dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai misi kedua ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4

**Kerangka Berpikir Perencanaan Integrative Misi 3 RPJMD Kabupaten Bangka
2019- 2023**



4. Mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional.

Sektor pariwisata dengan fungsi multiplier effect-nya merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka. Keberadaan destinasi pariwisata baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata hasil buatan manusia termasuk infrakstruktur dan industri pariwisata pendukungnya yang terus dikembangkan secara berkelanjutan, serta ditetapkannya KEK Pariwisata Sungailiat, menjadi Kabupaten Bangka sebagai menjadi gerbang dan destinasi utama pariwisata berskala internasional bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke pulau Bangka.

Untuk mencapai misi keempat ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5

**Kerangka Berpikir Perencanaan Integrative Misi 4 RPJMD Kabupaten Bangka
2019 - 2023**





5. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Potensi sumber daya alam yang melimpah baik yang tersimpan di dalam maupun di permukaan bumi serta di lautan dalam wilayah Kabupaten Bangka merupakan sumber daya yang sangat penting. dalam menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Penambahan nilai guna ekonomi tersebut diciptakan melalui pengembangan inovasi dan teknologi produksi komoditas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan produk dari industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan yang berdaya saing serta peningkatan investasi baik nasional maupun luar negeri. Secara berkelanjutan, Untuk mencapai misi kelima ini, kerangka berpikir perencanaan integratif disajikan pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6

Kerangka Berpikir Perencanaan Integrative Misi 5 RPJMD Kabupaten Bangka 2019- 2023



C. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan yang perlu dilakukan dalam menjalankan misi dan mencapai visi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat
3. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat



4. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak
5. Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur dalam menunjang kesejahteraan masyarakat
6. Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah
7. Meningkatkan Produktivitas Pertanian dalam Mendorong Perekonomian
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
9. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas

Gambar 2.7

**Rumusan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bangka 2019 – 2023**





Selanjutnya adalah bagaimana cara mengukur suatu tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dalam mewujudkan visi dan misi kabupaten yang tertuang dalam strategik planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan suatu daerah. Kinerja bisa diketahui hanya jika Kabupaten Bangka mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa indikator atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada indikator tujuan atau target, kinerja kabupaten tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah perumusan pengukuran kinerja dalam bentuk indikator kinerja tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kab Bangka tahun 2019-2023.

Tabel 2.1
Rumusan Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan
Tahun 2019-2023

Misi	Tujuan	Indikator Kinerja
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berbasis teknologi informasi	Tujuan 1.1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas	Tujuan 2.1 : Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan
	Tujuan 2.2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat
	Tujuan 2.3 : Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender
Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah	Tujuan 3.1 : Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur dalam menunjang kesejahteraan masyarakat	Indeks Ketimpangan Infrastruktur



Misi 4 : Mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional	Tujuan 4.1. : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	<i>Spending of Money</i>
	Misi 5 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Tujuan 5.1 : Meningkatkan Produktivitas Pertanian dalam Mendorong Perekonomian
	Tujuan 5.2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
	Tujuan 5.3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 tahun ke depan. Rumusan sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat
4. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
5. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
6. Meningkatnya Kesetaraan Gender
7. Meningkatnya Perlindungan Pemenuhan Hak-Hak Anak
8. Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas
9. Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas
10. Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata Berbasis *Sport Tourism*, Kearifan dan Budaya Lokal serta Sumber Daya Alam Pariwisata
11. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto
12. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
13. Menurunnya Angka Kemiskinan
14. Meningkatnya Peran Serta Desa Dalam Mendorong Perekonomian Daerah
15. Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup



D. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Bangka 2019-2023

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	1.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN
			1.1.2 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya
			1.1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berintegritas	2.1 Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat	2.1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah
			2.2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup Angka Stunting
		2.3 Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak	2.3.1 Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender
			2.3.2 Meningkatnya Perlindungan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Status Kabupaten Layak Anak
		3.1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang proporsional	3.1.1 Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Proporsi Panjang Jaringan Jembatan dalam Kondisi Baik Proporsi Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik



4	Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional	4.1 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	3.1.2 Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	Persentase Masyarakat yang terlayani Sanitasi Dasar Persentase Masyarakat yang Memiliki Akses Air Bersih Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik Persentase Masyarakat Miskin yang terlayani Rumah Layak Huni Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh
			4.1.1 Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata Berbasis <i>Sport Tourism</i> , Kearifan dan Budaya Lokal serta Sumber Daya Alam Pariwisata	Peningkatan Kunjungan Wisatawan
5	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	5.1 Meningkatkan Produktivitas Pertanian dalam Mendorong Perekonomian	5.1.1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB
			5.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	5.2.1 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat 5.2.3 Menurunnya Angka Kemiskinan
		5.5 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas	5.2.4 Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah	Persentase Desa Swasembada
			5.5.1 Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Ketaatan terhadap RTRW

E. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran (Indikator Kinerja Utama)

Sasaran beserta indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 2.3
Rumusan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
(Indikator Kinerja Utama) Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori
		Indeks SPBE	Indeks
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Kategori
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka
		Angka Harapan Lama Sekolah	Angka
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka
		Angka Stunting	Angka
6	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks
7	Meningkatnya Perlindungan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Status Kabupaten Layak Anak	Kategori
8	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	%
		Proporsi Panjang Jaringan jembatan dalam Kondisi Baik	%
		Proporsi Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%
9	Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	Persentase Masyarakat yang terlayani Sanitasi Dasar	%
		Persentase Masyarakat yang Memiliki Akses Air Bersih	%
		Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik	%
		Persentase Masyarakat Miskin yang terlayani Rumah Layak Huni	%
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	%



10	Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata Berbasis Sport Tourism, Kearifan dan Budaya Lokal serta Sumber Daya Alam Pariwisata	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%
11	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	%
12	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Peningkatan PDRB Perkapita	%
13	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	%
		Angka Pengangguran Terbuka	%
14	Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah	Persentase Desa Swasembada	%
15	Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks
		Ketaatan terhadap RTRW	%

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Pada Tahun 2020, seluruh Negara di dunia mengalami pandemi *Covid-19* yang berlangsung cukup lama dan cukup menguras energi, pikiran serta sumber daya yang begitu besar. Kondisi yang cukup menyita perhatian dunia ini pun tak terkecuali menyerang Indonesia. Hingga penghujung tahun 2020, sebaran pandemi *Covid-19* merata di seluruh penjuru negeri. Kabupaten Bangka tak luput dari *pandemic attack* (serangan pandemi) ini. Pandemi *Covid-19* yang pada mulanya berasal dari Wuhan yang merupakan salah satu daerah di Republik Rakyat China ini tak hanya berdampak pada sector kesehatan saja, akan tetapi sector-sector lainnya seperti industri, perdagangan barang & jasa, pariwisata serta sector-sector ekonomi lain pun sedikit demi sedikit tergerus.

Perekonomian nasional yang mengalami dampak tak hanya menyerang para kelompok ekonomi rendah, namun para pelaku usaha skala mikro, sedang hingga besar pun harus melakukan berbagai kebijakan yang berorientasi pada efisiensi penggunaan sumber daya agar usaha masih dapat bertahan di tengah pandemic yang melanda negeri ini. Salah satunya kebijakan pengurangan jumlah karyawan, dengan semakin meningkatnya kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di beberapa



perusahaan pun dirasa mengganggu perekonomian masyarakat. Hal ini memunculkan “*cluster-cluster*” baru yang dimasukkan ke dalam kategori keluarga rentan miskin.

Kebijakan nasional pun beberapa kali mengalami penyesuaian untuk mendorong percepatan penanganan pandemi *Covid-19* serta pemulihan ekonomi bagi sektor-sektor terdampak. Kebijakan *Refocusing* dan realokasi anggaran diambil oleh Pemerintah dan mengharuskan seluruh pemerintah daerah untuk menyesuaikan arah kebijakan daerah sehingga terfokus pada penanganan dampak pandemi.

Berkenaan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, tentunya perubahan arah kebijakan nasional dan situasi dan kondisi daerah berimplikasi terhadap penyesuaian target kinerja dan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka. Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Bangka dan melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori	BB
		Indeks SPBE	Indeks	2,60
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65,97
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Kategori	WTP
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	74,77
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	8,23
		Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	12,76
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	70,99
		Angka Stunting	Angka	3,82



6	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	73,90
7	Meningkatnya Perlindungan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama
8	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	%	74,59
		Proporsi Panjang jembatan dalam Kondisi Baik	%	93,77
		Proporsi Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	98,91
9	Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	Persentase Masyarakat yang terlayani Sanitasi Dasar	%	95,12
		Persentase Masyarakat yang Memiliki Akses Air Bersih	%	98,71
		Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik	%	32,38
		Persentase Masyarakat Miskin yang terlayani Rumah Layak Huni	%	97,40
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	%	0,016
10	Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata Berbasis <i>Sport Tourism</i> , Kearifan dan Budaya Lokal serta Sumber Daya Alam Pariwisata	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	1,49
11	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	%	19,79
12	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Peningkatan PDRB Perkapita	%	-0,69
13	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	%	4,99
		Angka Pengangguran Terbuka	%	5,43
14	Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah	Persentase Desa Swasembada	%	25,81
15	Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	63,07
		Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00



BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/ target kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat derajat kinerja sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran

No.	SKALA	KINERJA SASARAN	KODE
1	> 100%	Melebihi Target	
2	= 100%	Tercapai	
3	< 100%	Tidak Tercapai	
4	n/a	Tidak Ada Target	

Indikator Kinerja Utama (*core bussines*) Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan maupun



kegagalan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan. IKU tersebut diukur dengan membandingkan realisasi masing-masing indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun capaian IKU Kabupaten Bangka Tahun 2020 tersaji pada tabel berikut ini :

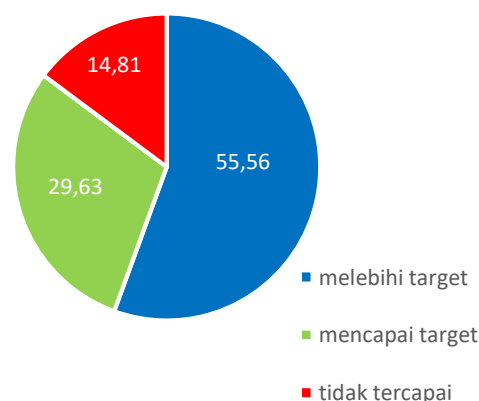
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d 2020 terhadap Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	Capaian		
Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori	BB	BB	BB	100,00	A	79,17
Indeks SPBE	Indeks	2,47	2,60	2,77	106,54	3,00	92,33
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	67,26	65,97	63,64	96,47	75,01	84,84
Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	74,07	74,77	78,47	104,95	85,40	91,89
angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,23	8,23	8,24	100,12	9,04	91,15
angka harapan lama sekolah	tahun	12,76	12,76	12,77	100,08	12,95	98,61
Angka harapan hidup	tahun	70,99	70,99	71,06	100,10	70,85	100,30
Angka stunting	tahun	3,82	3,82	1,50	160,73	15,48	190,31
indeks pemberdayaan gender	indeks	72,07	73,90	88,49	119,74	81,40	108,71
Status kabupaten layak anak	Kategori	Pratama	Pratama	Pratama	100,00	Utama	90,00
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	%	74,59	74,59	78,26	104,92	80,24	97,53
Proporsi Panjang jembatan dalam Kondisi Baik	%	93,77	93,77	93,77	100,00	97,15	96,52
Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	98,91	98,91	98,91	100,00	100,00	98,91
Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar	%	95,12	95,12	96,16	101,09	100,00	96,16



persentase masyarakat yang memiliki akses air bersih	%	98,71	98,71	99,75	101,05	100,00	99,75
Persentase kecukupan luasan RTH publik	%	32,38	32,38	32,38	100,00	32,38	100,00
Persentase masyarakat miskin yang terlayani rumah layak huni	%	97,40	97,40	98,25	100,87	100,00	98,25
Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	%	0,016	0,016	0,016	100,00	0,01	40,00
peningkatan kunjungan wisatawan	%	17,91	1,49	1,32	88,68	16,69	7,92
persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	19,55	19,79	21,35	107,88	22,10	96,61
Peningkatan PDRB perkapita	%	1,45	-0,69	-0,65	105,80	2,15	-30,23
Persentase angka kemiskinan	%	4,97	4,99	4,51	109,62	4,82	106,43
Angka pengangguran terbuka	%	3,80	5,43	5,42	100,18	3,96	63,13
persentase desa swasembada	%	25,81	25,81	24,19	93,75	40,32	60,00
Indeks kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	63,07	63,07	62,22	98,65	83,50	74,51
Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja utama Kabupaten Bangka Tahun 2020, diketahui 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran atau sebesar 55,56 persen termasuk dalam kategori melebihi target atau lebih dari 100,00 persen. Sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja utama atau sebesar 29,63 persen termasuk dalam kategori tercapai, sedangkan 4 (empat) indikator kinerja utama lainnya atau sebesar 14,81 persen termasuk kategori tidak tercapai.



Indikator kinerja utama dengan realisasi tertinggi yang termasuk dalam kategori melebihi target yang ditetapkan yakni **Angka Stunting** dengan realisasi sebesar



160,73 persen. Indikator kinerja utama dengan realisasi kinerja terendah yang termasuk dalam kategori tidak tercapai yakni **Peningkatan Kunjungan Wisatawan** dengan tingkat realisasi hanya sebesar 88,68 persen.

Secara rata-rata realisasi seluruh indikator kinerja utama memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,77 poin. Hal ini dipengaruhi oleh pandemic *Covid-19* yang melanda sebagian besar wilayah yang ada di seluruh Negara dan salah satunya Kabupaten Bangka tak luput terkena dampak pandemi ini. Beberapa sasaran kinerja yang mengakibatkan penurunan capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan sebagian kecil dari sektor-sektor yang terdampak pandemic *covid-19*. Seperti kita ketahui bersama, pandemi *covid-19* ini tak hanya menyerang kondisi kesehatan masyarakat, akan tetapi mengganggu sektor pariwisata, ekonomi perkotaan hingga pedesaan, perubahan pola kerja pegawai, pembatasan social antar masyarakat dan lain sebagainya. Selain itu, kebijakan yang bersifat dinamis mengharuskan Pemerintah Daerah untuk mengubah haluan pelaksanaan pembangunan daerah serta kebijakan-kebijakan strategis dalam mendukung upaya penanganan dan pemulihan dampak pandemi *Covid-19* secara nasional.

Indikator kinerja sasaran yang dipaparkan pada tabel diatas merupakan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019 - 2023. Pencapaian kinerja sasaran tahun 2023 merupakan gambaran kinerja tahun kelima untuk sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023, Lebih lanjut pencapaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tujuan pemerintah pusat dan daerah. Jantung *good governance* itu adalah kewajiban untuk bertanggungjawab atas berbagai penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan pembangunan. Akuntabilitas diyakini mampu merubah kondisi suatu pemerintahan, dari kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik menuju suatu tatanan pemerintah yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel signifikan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan



masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan dan dilaksanakan untuk seluruh program yang berorientasi pada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah melayani publik.

Sehingga akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan yang disusun secara *periodic*.

Indikator kinerja dan capaian kinerja atas sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Atas Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Tahun 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori	BB	BB	100,00	T
2.	Indeks SPBE	Indeks	2,60	2,77	106,54	MT
3.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65,97	63,64	96,47	TT
Rata-rata Capaian					101,00	MT

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja atas indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi mencapai 101,00 persen atau melebihi target (MT) yang telah ditetapkan. Peningkatan capaian kinerja yang sangat signifikan diperoleh dari capaian 3 (tiga) indikator sasaran, yaitu hasil evaluasi AKIP Kabupaten yang ditargetkan mendapat kategori BB dan berhasil meraih kategori BB, Indeks SPBE yang ditargetkan sebesar 2,60 dan berhasil direalisasikan sebesar 2,77 namun Indeks Profesionalitas ASN yang ditargetkan sebesar 62,97 hanya berhasil direalisasikan sebesar 63,64 atau capaiannya hanya 96,47%.



Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Terhadap
Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S/D TAHUN 2020 TERHADAP KONDISI AKHIR (%)
1.	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori	BB	BB	A	79,17
2.	Indeks SPBE	Indeks	2,47	2,77	3,00	92,33
3.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	67,26	63,64	75,01	84,84

Membandingkan capaian indikator atas sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi tahun 2020 dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Bangka sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4, terlihat bahwa dua indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran ini menunjukkan perkembangan kearah positif namun satu indikator mengalami perlambatan.

1.1. Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten

Perkembangan hasil evaluasi AKIP Kabupaten Bangka dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada tahun 2016, hasil evaluasi AKIP Kabupaten Bangka masih berada pada kategori CC dengan nilai Evaluasi sebesar 58,22. Pada tahun 2017, hasil evaluasi AKIP Kabupaten Bangka mengalami lonjakan yang luar biasa dengan peningkatan nilai evaluasi mencapai 8,55 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan berhasil meraih kategori B. Selanjutnya pada tahun 2018, hasil evaluasi AKIP Kabupaten Bangka terus meningkat menjadi 67,33 poin namun masih pada kategori B. Di tahun 2019, nilai evaluasi AKIP Kabupaten Bangka kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 2.85 poin dan berhasil meraih kategori BB. Capaian tahun 2019 masih dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023, dimana capaian kategori BB di tahun 2019 baru mencapai 79,17 persen dari target yang ditetapkan



ingin dicapai diakhir periode RPJMD. Perkembangan nilai akuntabilitas yang cenderung membaik menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi hasil telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Secara detail, rincian perkembangan Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.5
Rincian Perkembangan Nilai Evaluasi AKIP
Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020

NO	KOMPONEN PENILAIAN AKIP	BOBOT	NILAI			
			2017	2018	2019	2020**
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,27	22,30	22,95	22,95
2.	Pengukuran Kinerja	25	18,43	16,41	17,64	17,64
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,81	10,19	10,17	10,17
4.	Evaluasi Internal	10	5,84	6,40	6,27	6,27
5.	Capaian Kinerja	20	12,42	12,02	13,15	13,15
Nilai Evaluasi		100	66,77	67,33	70,18	70,18
Tingkat Akuntabilitas			B	B	BB	BB

Sumber : LHE AKIP Kabupaten Bangka, 2017, 2018, 2019 dan 2020**

1.2. Indeks SPBE

Seperti halnya perkembangan nilai evaluasi AKIP, Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bangka juga menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Berdasarkan hasil penilaian mandiri dan hasil evaluasi SPBE tahun 2020 oleh Kementerian PAN-RB yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2022 serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 153 tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 128 Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2020, Indeks SPBE Kabupaten Bangka relatif meningkat dari 2,47 pada tahun 2019 menjadi 2,77 pada Tahun 2020. Aspek-aspek yang menjadi komponen penyusun Indeks mengalami berkembang yang fluktuatif sebagaimana disajikan pada Tabel 3.6. Aspek domain kebijakan meningkat sangat baik dari 2,12 menjadi 2,88. Aspek domain tata kelola menurun dari 2,71 tahun 2019 menjadi 2,43



pada tahun 2020. Sementara aspek domain layanan meningkat dari 2,45 menjadi 2,91.

Tabel 3.6
Rincian Perkembangan Indeks SPBE
Kabupaten Bangka Tahun 2019-2020

No	KOMPONEN PENILAIAN INDEKS SPBE	2019	2020
1.	Indeks Domain Kebijakan	2,12	2,88
2.	Indeks Domain Tata Kelola	2,71	2,43
3.	Indeks Domain Layanan	2,45	2,91
INDEKS SPBE		2,47	2,77
PREDIKAT		Cukup	Baik

Sumber : Diskominfotik Kabupaten Bangka, 2020

Bila dilihat kondisi capaian indikator Indeks SPBE tahun 2020 terhadap kondisi tahun 2019 serta terhadap target yang ditetapkan tahun 2020 dan terhadap target akhir masa RPJMD dapat dilihat pada Tabel 3.7

Tabel 3.7
Realisasi Indeks Profesionalitas ASN
Kabupaten Bangka Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian sd Tahun 2020	Capaian sd Tahun 2020 terhadap Kondisi Akhir
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Indeks SPBE	2,47	2,60	2,77	106,54	92,33

Dari data di atas dapat diketahui bahwa capaian Indeks SPBE Kabupaten Bangka Tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2019 dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2020, capaian Indeks SPBE tahun 2020 melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 106,54%. Pencapaian Indeks SPBE sampai dengan tahun 2020 ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah mencapai 92,33% ketercapaian.



Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 153 tahun 2021 yang mengevaluasi 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dapat dilihat kondisi capaian Indeks SPBE Kabupaten Bangka dalam regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Indeks SPBE
Pada Kabupaten/Kota di Provinsi kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Indeks SPBE
1	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3,16 (Baik)
2	Kabupaten Bangka	2,77 (Baik)
3	Kabupaten Bangka Selatan	3,22 (Baik)
4	Kabupaten Belitung	3,07 (Baik)
5	Kabupaten Belitung Timur	3,15 (Baik)

Sumber : Keputusan Kemenpan-RB Nomor 153 Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian Indeks SPBE Kabupaten Bangka tahun 2020 adalah yang terendah dibandingkan 4 kabupaten yang dinilai dan masih berada dibawah Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga diperlukan kinerja yang sangat besar serta upaya-upaya khusus untuk dapat mengejar ketertinggalan Kabupaten Bangka dari Kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Namun bila dibandingkan dengan rata-rata Indeks SPBE seluruh Indonesia dimasing-masing tingkatan maka Indeks SPBE Kabupaten Bangka masih cukup baik dibandingkan rata-rata Indeks SPBE daerah provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia. Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini.



Tabel 3.9
Capaian Indeks SPBE Kabupaten Bangka
Berdasarkan Rataan Indeks SPBE Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia
Tahun 2020

No	Indeks	Kabupaten Bangka	Rerata Nasional	Rerata Provinsi	Rerata Kabupaten	Rerata Kota
1	SPBE	2,77	2,26	2,56	2,04	2,43
2	Domain Kebijakan	2,88	2,07	2,94	1,86	2,18
3	Domain Tata Kelola	2,43	1,95	2,87	1,70	2,08
4	Domain Layanan SPBE	2,91	2,48	3,43	2,26	2,69

Sumber : Hasil Evaluasi Kemenpan-RB tanggal 20 Januari Tahun 2021

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi Indeks SPBE Kabupaten Bangka masih berada diatas rata-rata Indeks SPBE nasional, rata –rata provinsi, Kabupaten dan kota se Indonesia. Dari jenis komponen pembentuk Indeks SPBE Kabupaten Bangka untuk domain layanan SPBE Kabupaten Bangka sudah berada diatas seluruh rata-rata nasional, provinsi, kabupaten maupun kota. Untuk domain kebijakan dan tata kelola Kabupaten Bangka sudah berada diatas rata-rata nasional, kabupaten dan kota tapi masih berada di bawah rata-rata provinsi se Indonesia. Untuk mengetahui lebih rinci capaian komponen pembentuk Indeks SPBE ini agar bisa ditindaklanjuti perbaikannya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.10
Rincian Capaian Indeks SPBE Kabupaten Bangka
Tahun 2020

No	Nama Indeks	Nilai	Predikat
1	SPBE	2,77	Baik
2	Domain Kebijakan Internal	2,88	Baik
3	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,43	Cukup
4	Kebijakan Internal Layanan SPBE	3,20	Baik
5	Domain Tata Kelola SPBE	2,43	Cukup
6	Kelembagaan	2,00	Cukup
7	Strategi dan Perencanaan	2,50	Cukup
8	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,67	Baik
9	Domain Layanan SPBE	2,91	Baik
10	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,86	Baik
11	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,00	Baik

Sumber : Hasil Evaluasi Kemenpan-RB tanggal 20 Januari Tahun 2021



Dari seluruh data-data di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan walaupun Indeks SPBE Kabupaten Bangka sudah berada pada predikat baik, masih terdapat beberapa point penilaian yang berpredikat cukup yang memerlukan perbaikan guna meningkatkan Indeks SPBE Kabupaten Bangka.

Pada Domain Kebijakan Internal SPBE Kabupaten Bangka yang sudah baik terdapat sub komponen kebijakan internal tata kelola SPBE yang nilainya cukup. Hal ini disebabkan karena baru 4 dari 7 kebijakan internal yang menjadi point penilaian yang sudah mencapai level 3 yaitu : Kebijakan Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah, Kebijakan Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi, Kebijakan Pengoperasian Pusat Data dan Kebijakan Integrasi Sistem Aplikasi. Untuk kedepannya, keempat kebijakan tersebut perlu ditingkatkan agar mendukung proses integrasi SPBE yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu pada Aspek kebijakan tata kelola SPBE ini Kabupaten Bangka sudah mempunyai Rencana Induk SPBE yang tercantum dalam E-Government Kabupaten Bangka yang ditetapkan melalui Surat keputusan Kepala Dinas Kominfotik No. 188.4/1022/DINKOMINFOTIK/2019 sudah memuat peta jalan (roadmap). Namun Rencana Induk SPBE yang tercantum dalam E-Government Kabupaten Bangka tersebut masih belum menjelaskan tentang visi misi dan arsitektur SPBE. Sehingga kedepan hal ini perlu disesuaikan guna meningkatkan nilai indeks domain tata kelola Kabupaten Bangka.

Domain Tata Kelola SPBE Kabupaten Bangka baru mencapai predikat cukup yang disumbangkan oleh sub komponen kelembagaan dan strategi perencanaan yang predikatnya baru mencapai nilai cukup. Hal ini disebabkan Tim Pengarah SPBE Kabupaten Bangka baru dibentuk pada Bulan Maret Tahun 2020 sehingga belum bisa dinilai bahwa tim tersebut sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara keseluruhan. Selain itu proses bisnis dalam bentuk SOP sudah diterapkan tetapi masih pada sebagian unit kerja dan belum menyeluruh. Sementara pada sub komponen strategi dan perencanaan Kebijakan internal perencanaan dan penganggaran TIK baru sesuai dengan dengan sebagian muatan Rencana Induk SPBE dan belum ada kebijakan aplikasi umum berbagi pakai. Sehingga kedepan melalui Tim Pengarah SPBE yang sudah dibentuk implementasi proses bisnis mendukung seluruh pelaksanaan reformasi birokrasi termasuk penguatan tata laksana dan tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi bisa didorong



untuk dilaksanakan pada seluruh unit kerja. Dan perlu dilakukan perbaikan terhadap kebijakan dan strategi agar perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan pada unit pengelola TIK untuk memenuhi level 2 serta memuat rencana aplikasi umum berbagi pakai.

1.3. Indeks Profesionalitas ASN

Selanjutnya, indikator yang ketiga yaitu Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka yang mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2020. Dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 tumbuh negatif sebesar 0,05 dari 67,26 menjadi 63,64. Kondisi capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN terhadap tahun 2019 serta terhadap target yang ditetapkan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.11

Tabel 3.11
Realisasi Indeks Profesionalitas ASN
Kabupaten Bangka Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian sd Tahun 2020	Capaian sd Tahun 2020 terhadap Kondisi Akhir
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Indeks Profesionalitas ASN	67,26	65,97	63,64	96,47	84,84

Pertumbuhan nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka dicapai dari pertumbuhan kualifikasi yang diukur dari indikator riwayat pendidikan formal, pertumbuhan kompetensi yang diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, pertumbuhan kinerja yang diukur dari indikator penilaian prestasi kerja ASN dan pertumbuhan tingkat disiplin yang diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami. Komposit pencapaian unsur penunjang indeks profesionalitas ASN Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut :



Tabel 3.12
Komposit Unsur Penilaian Indeks Profesionalitas ASN
Kabupaten Bangka Tahun 2019 dan 2020

No	Unsur Penilaian Indeks Profesionalitas	Hasil Penilaian (2019)	Hasil Penilaian (2020)
1.	Unsur kualifikasi	14,59	11,78
2.	Unsur Kompetensi	22,68	21,61
3.	Unsur Kinerja	25,01	25,29
4.	Unsur Disiplin	4,98	4,99
Total		67,26	63,64

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka, 2020

Pertumbuhan yang negatif dari indikator Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 tidak terlepas dari kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan yang signifikan dari tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Bangka, Indonesia maupun dunia internasional. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan Belanja negara tahun anggaran 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* sebagai Bencana Nasional.

Adanya regulasi-regulasi pusat ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dengan menerbitkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/495/Dinkes/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Kabupaten



Bangka, Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/590/Dinkes/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) Kabupaten Bangka, Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1009.1/BPBD/2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) Kabupaten Bangka Tahun 2020.

Dengan diberlakukannya aturan sebagaimana tersebut diatas menyebabkan berbagai perubahan tata kelola anggaran serta program dan kegiatan pada tahun 2020 berupa refocusing anggaran untuk pencegahan, penanganan dan penanggulangan pandemi Covid 19 di kabupaten Bangka serta pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 yang melarang dan mengurangi (sesuai kondisi penyebaran Covid 19) dilakukannya kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa, meniadakan atau mengurangi perjalanan dinas dalam dan keluar daerah, memberlakukan test kesehatan rapid sebagai syarat dalam bepergian ke luar daerah guna mengurangi laju penyebaran Covid-19. Hal ini sebagai salah satu yang menyebabkan menurunnya Indeks Profesional ASN Kabupaten Bangka Tahun 2020 dikarenakan :

1. Adanya penundaan pengiriman / penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi aparatur. Kegiatan tersebut mengalami refocusing anggaran untuk penanganan covid-19.
2. Banyaknya ASN yang dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, sehingga perlu diikutsertakan pada diklat struktural yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang jabatan yang diampunya. Sementara PSBB dan perubahan tatanaman kehidupan sosial yang diberlakukan menyebabkan tidak dapat dilakukannya diklat tersebut. Dan adanya keterbatasan penyelenggara diklat struktural yang terakreditasi di Provinsi Kep. Bangka Belitung sebagai pilihan terdekat untuk mengirimkan peserta. Selain itu dilakukan pembatasan jumlah peserta dari pihak penyelenggara diklat menjadi permasalahan dalam pengiriman peserta untuk mengikuti diklat struktural yang dibutuhkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020.
3. Beberapa diklat teknis yang diadakan oleh Pemerintah Pusat yang waktu pelaksanaannya pada akhir tahun yang bertepatan dengan kewajiban



menyelesaikan seluruh kegiatan menyebabkan sangat terbatasnya ASN Kabupaten Bangka yang dapat mengikuti diklat yang dilaksanakan secara Webinar tersebut.

Penurunan capaian Indikator Indeks Profesioniltas ASN tahun 2020 juga mempengaruhi kinerja karena penurunan yang terjadi menyebabkan target yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai. Pencapaian kinerja Indeks Profesioniltas ASN tahun 2020 dibandingkan dengan target hanya mencapai 96,47%. Dan capaian tersebut jika dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD Kabupaten bangka tahun 2019-2023 baru mencapai 84,84%. Sehingga perlu dilakukan langkah-langkah cepat dan tepat agar target akhir masa RPJMD dapat dicapai pada tahun 2023.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi yang melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2020, tidak terlepas dari beberapa langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Bangka telah mulai memperbaiki sistem manajemen kinerja. Perbaikan dilakukan melalui revisi Peraturan Daerah tentang RPJMD yang selaras dengan perbaikan Renstra Perangkat Daerah sehingga sebagian besar sasaran strategis dan indicator kinerjanya telah berorientasi hasil.
2. Pemerintah Kabupaten Bangka telah menjabarkan kinerja secara berjenjang (*cascading*) dan terlihat adanya hubungan yang logis antara kinerja kepala daerah yang didukung oleh kinerja kepala Perangkat Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Bangka mulai menyusun Proses Bisnis untuk mengidentifikasi proses-proses apa saja yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan.
4. Pemerintah Kabupaten Bangka telah mulai melakukan refocusing program dan kegiatan guna mendapatkan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dan berperan secara langsung dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.
5. Pemerintah Kabupaten Bangka telah membangun aplikasi untuk pengumpulan data kinerja dari setiap Perangkat Daerah dan telah mulai melaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) . IKI ini akan diintegrasikan dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga kinerja setiap



pegawai/individu dapat dimonitor dan dievaluasi setiap saat melalui aplikasi e-kinerja. Pencapaian IKI/SKP harus dilaporkan setiap individu setiap hari dan divalidasi oleh atasan langsung melalui e-kinerja dan akan menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai, sehingga monev terhadap IKI/SKP dapat dilakukan setiap saat oleh atasan langsung.

6. Peningkatan pengembangan kompetensi aparatur melalui pengembangan kompetensi teknis, kompetensi fungsional dan kompetensi manajerial.
7. Peningkatan aspek layanan, aspek kelembagaan, strategi dan perencanaan serta manajemen pemerintahan melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Berikut ini merupakan beberapa permasalahan dan langkah-langkah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah antara lain :

Tabel 3.13
Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
- Belum sempurnanya seluruh unsur-unsur kunci dalam perencanaan (tujuan, sasaran dan indikator kinerja) pada seluruh Perangkat daerah serta keberlanjutan impelementasi manajemen kinerja.	- Penyempurnaan seluruh unsur-unsur kunci dalam perencanaan (tujuan, sasaran dan indikator kinerja) seluruh Perangkat Daerah serta keberlanjutan impelementasi manajemen kinerja.
- Kondisi Pandemi Covid-19 yang merubah tatanan operasional kerja serta mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat	- Perlu dilakukan terobosan-terobosan baru serta pembiasaan bekerja secara daring guna melaksanakan seluruh kerja dalam mencapai target kinerja serta menghambat penyebaran Covid-19.
- Masih diperlukannya efisiensi program dan kegiatan	- Memperdalam analisis refocusing program dan kegiatan yang telah disusun sehingga tidak hanya menghilangkan program dan kegiatan yang berulang tapi juga menggabungkan program-program dan memastikan fokus alokasi sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia hanya untuk program dan



	kegiatan yang secara langsung berpengaruh dalam pencapaian kinerja.
- Aplikasi pengolah data kinerja belum terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengolah data kinerja (SILAKIP) yang telah dibangun sehingga terpantau capaian kinerja atas tiap-tiap Perangkat Daerah yang diikuti dengan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian kinerja tersebut. - Pengintegrasian Indikator Kinerja Individu dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang dikelola dengan baik dan diimplementasikan dalam laporan harian kinerja yang menggunakan aplikasi yang memerlukan validasi oleh atasan langsung masing-masing individu, sehingga monitoring kinerja bisa dilakukan setiap hari dan setiap bulan. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam kinerja maka pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja bulanan.
- Belum Optimalnya penataan peraturan perundang-undangan	- Melakukan reviu peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ sinkron
- Belum optimalnya pemanfaatan proses bisnis dalam penataan dan penguatan organisasi	- Memanfaatkan proses bisnis untuk melakukan restrukturisasi Perangkat Daerah dan evaluasi struktur organisasi untuk mendapatkan struktur organisasi yang efektif dan efisien.
<ul style="list-style-type: none"> - Surat keputusan Kepala Dinas Kominfotik No. 188.4/1022/DINKOMINFOTIK/2019 sudah memuat peta jalan (roadmap) tetapi masih belum menjelaskan tentang visi misi. - Integrasi Sistem Aplikasi dalam Masterplan E-Gov Kabupaten Bangka baru diterapkan sebagian unit kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Arsitektur SPBE kedepan akan diperbaiki. Penjelasan tentang visi misi akan ditambahkan dan Kebijakan internal perencanaan dan penganggaran TIK akan disesuaikan dengan muatan rencana induk SPBE serta menyertakan kebijakan aplikasi umum berbagi pakai akan dilakukan guna meningkatkan nilai indeks domain tata kelola Kabupaten Bangka - Penerapan integrasi sistem aplikasi pada seluruh unit kerja/PD



Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi didukung oleh pelaksanaan 48 (Empat Puluh Delapan) Program, yaitu :

- 1) Program Pengembangan Data/Informasi
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 4) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- 5) Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- 6) Program Penelitian dan Pengembangan
- 7) Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
- 8) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
- 9) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- 10) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- 11) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- 12) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 13) Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- 14) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 15) Program Penataan Kelembagaan
- 16) Program Advokasi dan Bantuan Hukum
- 17) Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
- 18) Program Ketatalaksanaan
- 19) Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- 20) Program Peningkatan dan Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance



- 21) Program Reformasi Birokrasi
- 22) Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilu Kada
- 23) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 24) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 25) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 26) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 27) Program Peningkatan dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 28) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
- 29) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- 30) Program Pengembangan Persandian Daerah
- 31) Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
- 32) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 33) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- 34) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
- 35) Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
- 36) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- 37) Program perencanaan sarana dan prasarana dan infrastruktur pemerintah daerah
- 38) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- 39) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- 40) Program penataan desa
- 41) Program penyelenggaraan pemerintah Desa
- 42) Program Pembinaan, Penyuluhan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



- 43) Program peningkatan pelayanan pemerintahan umum
- 44) Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- 45) Program Peningkatan pelayanan public
- 46) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 47) Program Peningkatan dan Pengembangan pelayanan public
- 48) Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi

Efektifitas program-program yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja atas sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi diukur dengan membandingkan capaian realisasi keuangan atas Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran terhadap capaian kinerja sasaran. Pada tahun 2020, realisasi keuangan atas Program-Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi mencapai 92,09 persen dan mampu merealisasikan capaian kinerja sasaran sebesar 101,00 persen sehingga tingkat efektivitas program tersebut dalam mencapai sasaran mencapai 109,67 persen atau sangat efektif. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 3.14 di bawah ini.

Tabel 3.14
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

Tahun	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (%)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2020	92,09	101,00	109,67	Sangat Efektif

Sementara itu, ditinjau dari segi efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, terlihat bahwa tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi mencapai 8,91 persen. Efisiensi ini diperoleh dengan mengurangi realisasi capaian kinerja (101,00 persen) terhadap realisasi anggaran program (92,09 persen) sebagaimana tertera pada Tabel 3.15 berikut :



Tabel 3.15
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

Tahun	Pagu Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Persentase (%)	Efisiensi (%)
2020	166.850.377.462,00	153.656.027.023,65	92,09	8,91

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka (un audited), 2021

2. Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel

Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat. Karena itu pengelolaan keuangan daerah harus transparan, patuh pada peraturan perundang-undangan, tertib, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab dengan berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Memahami kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sebagai salah satu sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Sasaran ini diukur dengan indikator Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya. Target dan capaian atas sasaran dimaksud pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
1.	Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Opini	WTP	WTP	100,00	T
Rata - Rata Capaian					100,00	T

Berdasarkan tabel diatas, diketahui sasasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel ditargetkan mendapat opini WTP pada tahun 2020 dan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu memperoleh opini WTP dengan capaian kinerja sebesar 100 persen dan masuk dalam kriteria tercapai.



Opini WTP pada tahun 2020 didapatkan dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019 yang terdiri dari Neraca Tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo ANggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan pemeriksaan atas elemen-elemen tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka yang menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka dianggap telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, disajikan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan, memperhatikan Sistem Pengendalian Intern serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini WTP yang diraih Pemerintah Kabupaten Bangka pada Tahun 2020 merupakan capaian WTP keempat yang diraih Kabupaten Bangka. Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bangka berturut-turut mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2020 ini. Ini menunjukkan capaian kinerja atas sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel pada tahun 2020 telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Capaian kinerja tahun 2020 jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya telah sangat konsisten berada pada target yang ditetapkan. Bahkan jika dibandingkan target jangka menengah Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, maka capaian tahun 2020 telah sesuai dengan kondisi akhir yang diharapkan. Secara detil perbandingan capaian kinerja atas sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah daerah disajikan pada Tabel berikut :



Tabel 3.17
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S/D 2020 TERHADAP KONDISI AKHIR
1.	Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPDTahun Sebelumnya	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100 %

Sumber : BPPKAD Kab. Bangka, 2020

Opini BPK RI atas LKPD merupakan perjalanan panjang dalam membangun tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang baik. Capaian kinerja atas sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel yang telah berjalan sesuai dengan tracknya tidak terlepas dari berbagai factor pendukung pencapaian kinerja tersebut, antara lain :

1. Komitmen dan integritas pimpinan dan pengelola kegiatan
2. Sistem Pengendalian Internal yang memadai
3. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran
4. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran
5. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan
6. Peningkatan kualitas proses pengadaan barang/jasa
7. Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Peningkatan kualitas pengawasan dan reviu atas dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan dan kinerja, dan
9. Percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan



Walaupun demikian, menurut BPK masih terdapat beberapa kelemahan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2020, antara lain:

1. Masih terdapat pengelolaan persediaan pada Perangkat Daerah yang belum memadai.
2. Penatausahaan Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Bangka belum memadai.
3. Masih terdapat pemungutan retribusi perdagangan yang belum tertib.

Menindaklanjuti kondisi tersebut diatas, beberapa upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan yang lebih akuntabel, yaitu :

1. Melaksanakan Tindak Lanjut atas rekomendasi BPK;
2. Menkeu mendorong peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terus ditingkatkan agar mampu terus mengawal tata kelola keuangan pada masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pencegahan temuan berulang
4. Deteksi dini potensi temuan
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, yaitu pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Keuangan dan Sistem Informasi Barang Milik Daerah.

Berikut ini merupakan beberapa permasalahan dan Langkah-langkah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel antara lain :



Tabel 3.18
Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
- Pencatatan Aset Daerah yang belum terintegrasi dengan Sistem aplikasi	- Mengintegrasikan sistem aplikasi pencatatan dan pengelolaan aset daerah dengan sistem pengelolaan keuangan yang sudah ada agar dapat bekerja secara optimal
- Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Bangka atas pengelolaan keuangan desa kurang optimal	- Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi siskeudes dan Festival Anggaran Desa
- Keterbatasan sumberdaya terutama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang hanya berjumlah 19 (Sembilan belas) orang dengan 71 (tujuh puluh) objek pemeriksaan	- Melakukan <i>recruitment</i> intern APIP untuk memperkuat pengawasan intern pemerintah daerah

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh 12 (dua belas) program pada Badan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan Inspektorat yaitu sebagai berikut :

1. Program Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah (BPPKAD)
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (BPPKAD)
3. Program Optimalisasi Penerimaan Daerah dari Dana Perimbangan/ Transfer (BPPKAD)
4. Program Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah (BPPKAD)
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH (INSPEKTORAT)
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BPPKAD)
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (BPPKAD)
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (BPPKAD)



9. Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (BPPKAD)
10. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPPKAD)
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (BPPKAD)
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BPPKAD)

Realisasi keuangan atas pelaksanaan program-program diatas untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel pada tahun 2020 adalah sebesar 80,16 persen. Berdasarkan realisasi keuangan tersebut dan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 persen, tingkat efektivitas pelaksanaan program-program dimaksud untuk mencapai sasaran pada tahun 2020 mencapai 124,74 persen atau sangat efektif. Rincian tingkat efektivitas program dalam mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.19
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Tingkat Efektifitas (%)	Kriteria
2020	100,00	80,16	124,74	Sangat Efektif

Selanjutnya ditinjau dari sisi efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran, dengan capaian kinerja sebesar 100,00 persen dan realisasi keuangan sebesar 80,16 persen, tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel pada tahun 2020 mencapai 19,84 persen sebagaimana tertera pada Tabel 3.20 berikut :



Tabel 3.20
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2020	100,00	16.024.040.400,00	12.845.653.802,00	80,79	19,84

3. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat

Sejalan dengan visi Bangka Setara, Pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya membangun tata pemerintahan yang baik, dengan memberikan aksentuasi kuat pada penguatan kinerja pembangunan dan penataan pelayanan publik.

Hal ini dirasa sangat mendesak karena kedua faktor ini bukan hanya berkaitan langsung dengan tingkat kepuasan masyarakat, tetapi juga dapat berdampak pada daya saing investasi. Berbagai studi di banyak negara menunjukkan daerah – daerah yang memiliki kinerja, prosedur, mekanisme dan pelayanan publik yang baik selalu menjadi daya tarik investor untuk masuk, karena dinilai memiliki “resiko investasi rendah”.

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	74,77	78,47	104,95	MT
Rata- Rata Capaian					104,95	MT

Secara detail, tabel diatas memberikan informasi bahwa terjadi perubahan kinerja yang sangat signifikan dalam pencapaian sasaran. Justifikasinya terlihat dari



peningkatan indikator sasaran “Indeks Kepuasan Masyarakat” ditargetkan sebesar 74,77 persen di tahun 2020, namun ternyata terealisasi hingga mencapai 78,47 persen dengan persentase capaian sebesar 104,95 persen. Lonjakan tersebut memberikan gambaran bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bangka kepada masyarakat sudah terklasifikasi sangat tinggi.

Dengan demikian capaian untuk sasaran “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat**” pada tahun 2020 termasuk dalam kategori melebihi target dengan rata-rata capaian diatas 100,00 persen yakni sebesar **104,95 persen**.

Sejatinya, pelayanan publik di Kabupaten Bangka sudah berada di jalur yang benar (*on the right track*) dan berjalan menuju pada peningkatan derajat pelayanan publik yang lebih baik. Lebih dari itu, pembangunan daerah juga sudah mulai dilaksanakan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang sudah disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangka dalam rangka menjamin pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Indikator peningkatan indeks kepuasan layanan masyarakat diukur berdasarkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bangka Tahun 2020 yang diperoleh dari hasil survey terhadap 1600 Kepala Keluarga yang tersebar di seluruh Kabupaten Bangka (8 Kecamatan dan 71 desa dan 19 kelurahan) terhadap kinerja program seluruh PERANGKAT DAERAH yang ada di dalam APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 dengan menggunakan metode slovin dengan *margin off error* 2,44 persen.

Berdasarkan data hasil survey persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemkab Bangka tahun 2020 yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021, didapat nilai IKM Kabupaten Bangka pada tahun 2020 mencapai 78,47. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mutu kinerja Pemkab Bangka berada dalam kategori **B** (62,51-81,25) atau **Baik**, dengan sebagian besar masyarakat Kabupaten Bangka merasa puas terhadap kinerja Pemkab Bangka dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata (*mean*), **urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** merupakan urusan dengan kinerja terbaik dengan nilai rata-rata mencapai **88,93**,



kemudian **urusan kesehatan** di peringkat kedua dengan rata-rata mencapai **85,33** serta **urusan pendidikan** di peringkat ketiga dengan rata-rata mencapai **82,77**.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka kontribusi untuk indikator sasaran ini adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun
Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	TARGET JANGKA MENENGAH (2023)	CAPAIAN S.D 2019 TERHADAP KONDISI AKHIR (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	74,07	78,47	85.40	91.89

Sumber : Hasil Penghitungan IKM Pemerintah Kabupaten Bangka, 2020

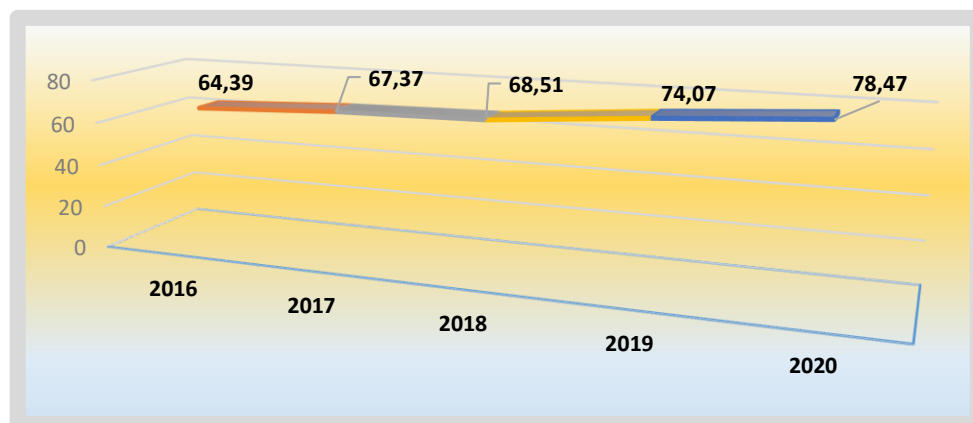
Tabel diatas menjelaskan bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap indikator sasaran dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Justifikasinya terlihat dari capaian indikator peningkatan indeks

kepuasan masyarakat pada tahun kondisi awal RPJMD ditargetkan pada capaian 58,80 persen. Pencapaian pada akhir Tahun 2019 jauh melampaui target tersebut yaitu 74,07 persen atau tumbuh sebesar 19,67 persen. Kemudian untuk pencapaian pada Tahun 2020 kembali mengalami peningkatan yang sangat tinggi menjadi 78,47 persen melampaui target yang ditetapkan 74,77 persen.

Dengan demikian, secara rata-rata, capaian sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat”** sampai dengan tahun 2020 terhadap kondisi akhir RPJMD Kabupaten Bangka mencapai 91,89 persen. Namun perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, sehingga sasaran tersebut secara berkesinambungan akan terus diupayakan dan ditingkatkan.



Grafik 3.1
Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Bangka Tahun 2016 – 2020



Faktor yang mendukung pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bangka telah berjalan dengan dukungan sumber daya aparatur yang kompeten serta struktur organisasi perangkat daerah yang efisien sehingga pemenuhan kebutuhan publik dapat dilakukan sesuai dengan sumber daya yang tersedia serta tepat sasaran;
2. Pengembangan dan penerapan inovasi pembangunan daerah di Kabupaten Bangka sehingga berdampak positif terhadap kualitas kinerja pelayanan publik;
3. Dukungan sistem pelayanan dan sarana prasarana pendukung.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari 22 (Dua Puluh Dua) capaian program yang menjadi urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Pemkab Bangka. Adapun program yang dimaksud yakni :

1. Program sumber daya kesehatan;
2. Program upaya kesehatan masyarakat;
3. Program peningkatan kualitas pelayanan umum kesehatan;
4. Program kebijakan manajemen kesehatan masyarakat;
5. Program pengembangan obat asli Indonesia;
6. Program standarisasi pelayanan kesehatan;



7. Program obat dan perbekalan kesehatan;
8. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
9. Program pemeliharaan Kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
10. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
11. Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana;
12. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bencana kebakaran;
13. Program penataan administrasi kependudukan;
14. Program peningkatan dan pengembangan pelayanan publik;
15. Program pengembangan data/informasi/Statistik Daerah;
16. Program peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan perikanan dan kelautan;
17. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
18. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
19. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
20. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
21. Program kelancaran dukungan pemilu;
22. Program peningkatan pelayanan publik (PATEN).

Berikut ini merupakan beberapa permasalahan dan Langkah-langkah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan capaian dimasa yang akan datang antara lain :



Tabel 3.23
Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan dan persyaratan pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah pemberi pelayanan	- Meningkatkan transparansi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, baik prosedur dan persyaratan pelayanan agar memudahkan masyarakat mengakses layanan publik

Untuk mengukur efektifitas capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat”, diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.24
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2020	104,95	67,67	155,08	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan satu indikator utama dapat dicapai sebesar 104,95 persen dengan realisasi keuangan sasaran sebesar 67,67 persen sehingga tingkat efektifitas terhadap pencapaian sasaran sebesar 155,08 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat digambarkan pada tabel berikut :



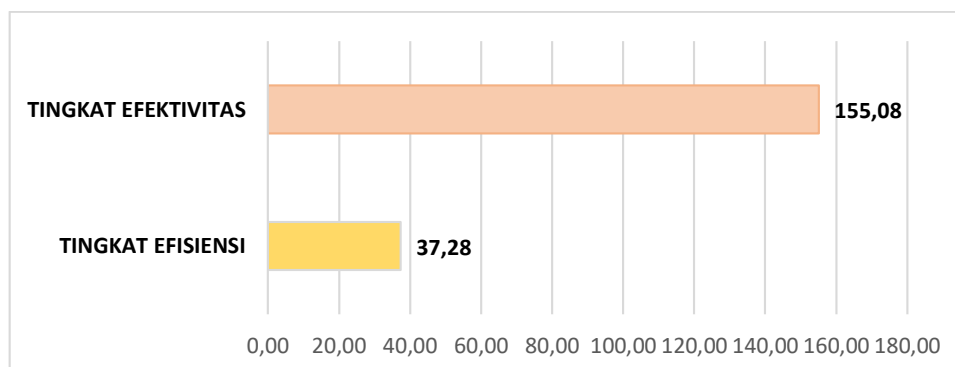
Tabel 3.25
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2020	104,95	237.112.358.941,00	160.458.379.406,38	67,67	37,28

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka (un audited), 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2020 sebesar **Rp. 237.112.358.941,-** dengan realisasi belanja mencapai **Rp. 160.458.379.406,38** atau sebesar **67,67 persen**. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar **37,28 persen**.

Grafik 3.2
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian Sasaran
“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat”
Tahun 2020





4. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat



Kualitas pendidikan masyarakat menjadi indikator dalam menentukan kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah. Tingkat pendidikan masyarakat/penduduk dapat diukur melalui indikator angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah disetiap jenjang pendidikan. Indikator ini akan menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan sistem pendidikan yang diselenggarakan. Indikator ini juga dapat

dijadikan tolak ukur yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan. Indikator ini juga digunakan untuk memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan kualitas pendidikan masyarakat pada tahun 2020, dilakukan pengukuran indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang tertera pada tabel 3.26 berikut:

Tabel 3.26
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Tahun 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Angka Rata- Rata Lama Sekolah	Tahun	8,23	8,24	100,12	MT
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,76	12,77	100,08	MT
	Rata- Rata Capaian				100,38	MT

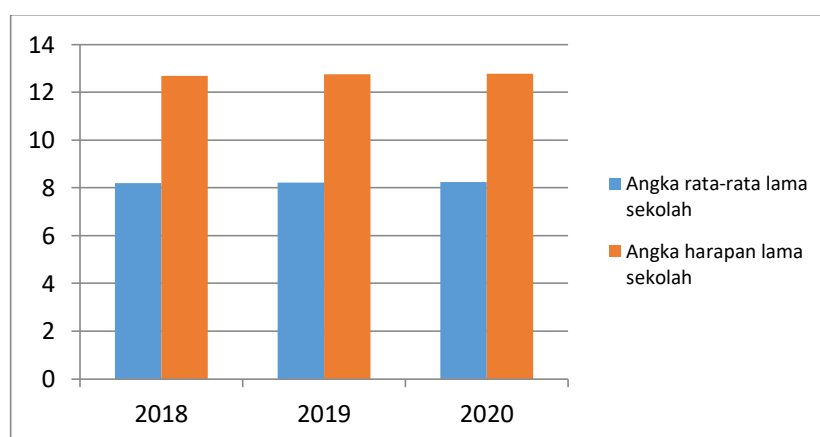
Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2020

Berdasarkan pengukuran tingkat capaian sasaran melalui indikator-indikator sebagaimana tertera pada tabel diatas diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran adalah 100,38 persen yang berarti kinerja sasaran melebihi target.



Tabel diatas memberikan informasi kinerja yang sangat komprehensif dalam mendukung pencapaian sasaran. Pertama, terlihat dari indikator sasaran “angka rata – rata lama sekolah” ditargetkan sebesar 8,23 tahun pada tahun 2019, ternyata terealisasi 8,24 tahun dengan persentase capaian sebesar 100,12 persen yang berarti kinerja sasaran termasuk dalam kategori melebihi target. Kedua, terlihat dari indikator “angka harapan lama sekolah” ditargetkan sebesar 12,76 tahun pada tahun 2019, ternyata justru terealisasi 12,77 tahun dengan persentase capaian sebesar 100,38 persen.

Grafik 3.3
Perkembangan Angka Rata – Rata Lama Sekolah dan
Angka Harapan Lama Sekolah
Di Kabupaten Bangka Tahun 2018 - 2020



Sumber : BPS Kabupaten Bangka

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang sudah menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Perkembangan angka rata – rata lama sekolah di Kabupaten Bangka selama tahun 2019 – 2020 menunjukkan angka yang semakin meningkat. Pada tahun 2019, angka rata – rata lama sekolah mencapai 8,20 tahun, kemudian meningkat menjadi 8,23 tahun dan kembali meningkat menjadi 8,24 tahun pada tahun 2020. Meningkatnya angka rata – rata lama sekolah tersebut dipengaruhi menurunnya angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan dan meningkatnya peran serta masyarakat untuk mengikuti pendidikan penyeteraan (pendidikan paket A/B/C).



Angka harapan lama sekolah mengindikasikan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dan digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Hal ini ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Searah dengan peningkatan angka rata – rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah Kabupaten Bangka selama tahun 2018 – 2020 juga menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Jika pada tahun 2018 angka harapan lama sekolah sebesar 12,68 tahun, maka pada tahun 2019 terkoreksi menjadi 12,76 tahun dan kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 12,77 tahun pada tahun 2020.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka kondisi masing - masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.27
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S.D 2020 TERHADAP KONDISI AKHIR (%)
1.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,23	8,24	9,04	91,15
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,76	12,77	12,95	98,61

Tabel diatas menjelaskan bahwa terjadi peningkatan terhadap masing – masing indikator sasaran dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Realisasi indikator angka rata – rata lama sekolah kondisi pada tahun 2019 mencapai 8,23 tahun sedangkan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 8,24 tahun atau tumbuh sebesar 0,12 persen. Capaian sampai dengan tahun 2020 terhadap kondisi akhir RPJMD (2023) baru mencapai 91,15 persen atau kurang 8,85 persen dari target yang seharusnya dicapai. Angka harapan lama sekolah jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) baru



mencapai 98,61 persen atau kurang 1,39 persen, sehingga kedepan, untuk angka harapan lama sekolah dan angka rata – rata lama sekolah di setiap jenjang pendidikan, perlu dilakukan akselarasi kinerja agar pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bangka, berjalan dengan maksimal sebanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dengan
Standar Nasional

Indikator Sasaran	Capaian 2020		
	Nasional	Provinsi	Kabupaten
Angka Harapan Lama Sekolah	12,98	12,05	12,77
Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,48	8,06	8,24

Sumber : BPS Kabupaten Bangka , 2020

Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari dari angka rata – rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang dalam kurun beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan kinerja walaupun tidak signifikan karena terdampak pandemi covid-19. Angka rata – rata lama sekolah meningkat dari 8,23 tahun menjadi 8,24 tahun sedangkan angka harapan lama sekolah meningkat dari 12,76 tahun menjadi 12,77 tahun. Namun jika dibandingkan dengan standar nasional, angka rata – rata lama sekolah kabupaten masih di bawah standar nasional (8,48 tahun), linier dengan angka harapan lama sekolah yang juga masih dibawah standar nasional (12,98 tahun). Apabila ditelaah secara spesifik, rendahnya peningkatan angka rata – rata lama sekolah kabupaten menjadi pemicu terjadinya degradasi peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan standar provinsi, kedua komposit IPM tersebut masih diatas standar provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan di kabupaten lebih tinggi dibandingkan standar provinsi yang hanya sebesar 12,05 tahun untuk angka harapan lama sekolah dan sebesar 8,06 tahun untuk angka rata – rata lama sekolah.





Faktor yang mendukung pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Penguatan program untuk meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.
2. Kemudahan akses menuju ke sarana pendidikan
3. Besaran pendapatan per kapita masyarakat
4. Penyesuaian kurikulum terutama pendidikan dasar sesuai standar.
5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
6. Peningkatan kemampuan dan pemerataan tenaga pendidik

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari adanya 7 (tujuh) program pendukung dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, sebagai berikut:

1. Manajemen Pelayanan Pendidikan.
2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun.
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Program Pendidikan Non Formal.
6. Program Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar, dan
7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Berikut ini merupakan beberapa permasalahan dan Langkah-langkah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan masyarakat antara lain :



Tabel 3.29
Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya angka rata – rata lama sekolah yang berkisar 8,24 tahun atau setara kelas VIII akibat masih tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka melanjutkan antar jenjang pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan kembali program perburuan anak putus sekolah (Bunaktuslah) dalam rangka menekan angka putus sekolah sampai ke level desa dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> pendidikan yang dikoordinir langsung oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; - Melakukan pola kerjasama dengan pihak terkait terutama terkait upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan miskin - Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat melalui pemberdayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas dan kapasitas tenaga pengajar masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyekolahkan semua tenaga pengajar ke jenjang pendidikan Strata I - Bagi tenaga pengajar mata pelajaran prioritas yang telah berjenjang Strata I dilanjutkan dengan Strata II - Memberikan pelatihan kepada tenaga pengajar. - Melakukan pengawasan secara berkala kepada tenaga tenaga pengajar dalam melaksanakan kurikulum sekolah
<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan tenaga pengajar antar wilayah belum merata 	<ul style="list-style-type: none"> - Redistribusi tenaga pengajar antar wilayah. - Pemberian insentif tenaga pengajar dengan pertimbangan jarak dan/atau daerah terpencil.
<ul style="list-style-type: none"> - Akses menuju sarana pendidikan jauh 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan rute jalur transportasi umum menuju sarana pendidikan

Untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran “meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat” diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:



Tabel 3.30
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2020	104,95	77,46	129,23	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan indikator utama dapat dicapai sebesar 104,95 persen dengan realisasi keuangan sasaran hanya sebesar 77,46 persen sehingga tingkat efektivitas terhadap pencapaian sasaran justru sebesar 129,23 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.31
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

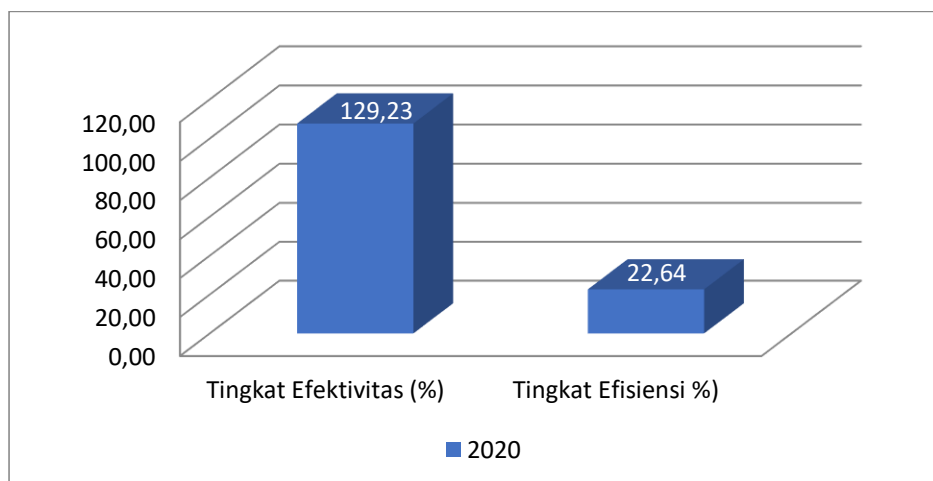
Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2020	104,95	86.452.716.233,00	66.965.160.197,00	77,46	22,64

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka (*un audited*), 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 86.452.716.233,00,- dengan realisasi belanja mencapai hanya Rp. 66.965.160.197,00 atau sebesar 77,46 persen. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 22,64 persen.



Grafik 3.4
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian
Sasaran “Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih
Berkualitas” Tahun 2020



5. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif baik secara sosial dan ekonomi. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, kualitas kesehatan masyarakat adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat serta harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

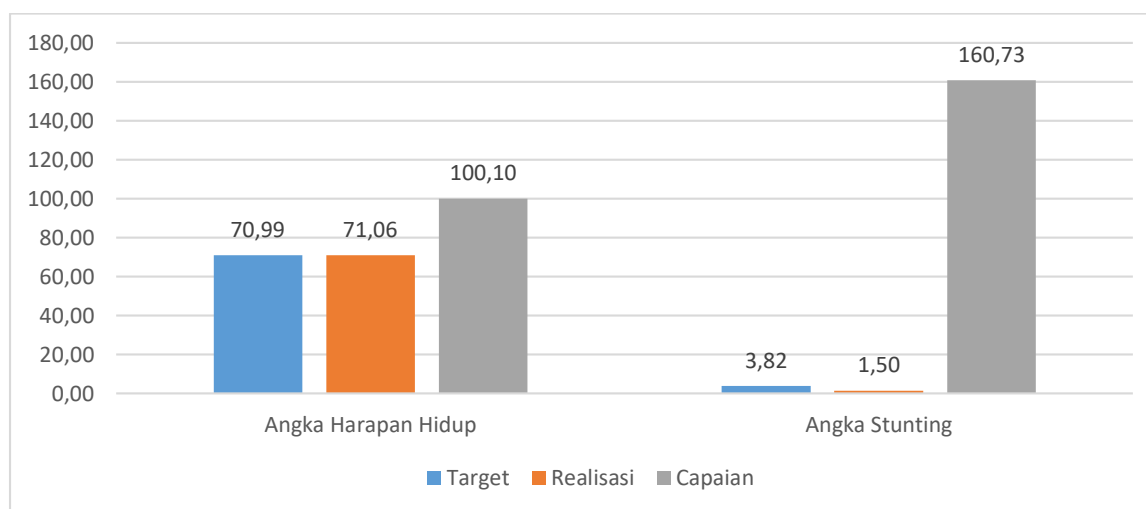


Tabel 3.32
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Tahun 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,99	71,06	100,10	MT
2.	Angka Stunting	%	3,82	1,50	130,41	MT
Rata - Rata Capaian						MT

Berdasarkan pengukuran tingkat capaian sasaran melalui indikator-indikator sebagaimana tertera pada tabel diatas diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran adalah 130,41 persen yang berdasarkan derajat kinerja dikategorikan sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sasaran “meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat” telah melebihi target.

Grafik 3.5
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Tahun 2020



Indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan sasaran “meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat” terdiri dari angka usia harapan hidup, penurunan angka stunting. Untuk indikator sasaran Angka Stunting adalah indikator yang menunjukkan semakin kecil angka realisasi berarti capaian atau



keberhasilan sangat baik. Sedangkan untuk nilai indikator angka usia harapan hidup, semakin tinggi nilai indikator semakin baik.

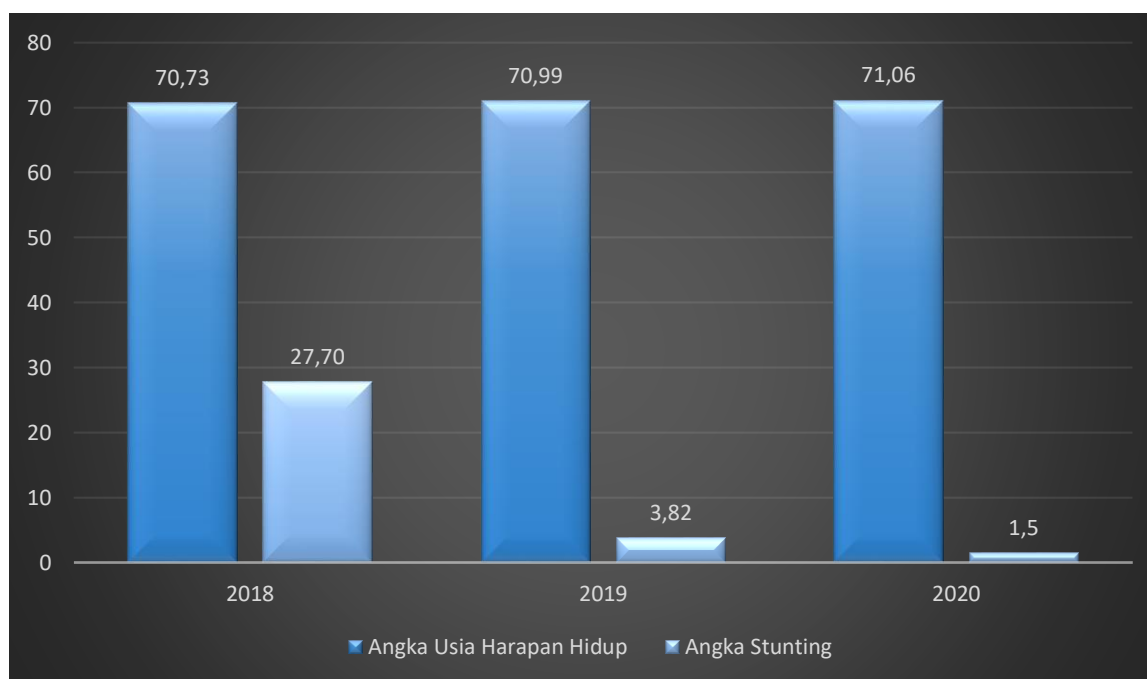
Untuk angka usia harapan hidup tahun 2020 mencapai usia 71,06 tahun. Angka ini telah mencapai target yang dibuat yaitu 70,99 tahun, dengan capaian sasaran sebesar 100,10 persen. Angka usia harapan menunjukkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu daerah, maka dapat dipastikan bahwa status kesehatan masyarakat di daerah tersebut semakin baik. Banyak hal yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas, antara lain faktor kesehatan, faktor ekonomi, budaya dan pendidikan. Dengan meningkatnya angka usia harapan hidup tahun 2020 menunjukkan semakin besarnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Selain itu meningkatnya usia harapan hidup juga menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Angka harapan hidup Kabupaten Bangka mencapai 71,06 berarti bahwa setiap bayi yang lahir hidup di Kabupaten Bangka mempunyai harapan untuk bertahan hidup sampai usia 71,06 tahun.

Selanjutnya Angka Stunting pada tahun 2020 sebesar 1,50 persen. Angka ini lebih rendah dibanding target yang ditetapkan yaitu 3,82 persen, dengan capaian sasaran yang sangat tinggi yaitu 160,73 persen. Hal ini menunjukkan bahwa prevalensi gizi buruk menurun. Gizi buruk dapat disebabkan oleh adanya penyakit infeksi atau penyakit penyerta pada balita serta pola asuh orangtua tentang pemberian makanan sehat yang kurang baik sehingga menyebabkan asupan makanan anak menjadi tidak seimbang. Dengan menurunnya persentase balita gizi buruk pada tahun 2020 menunjukkan bahwa status gizi balita di Kabupaten Bangka semakin baik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan surveilans gizi, pemantauan status gizi balita secara rutin setiap bulan di 223 Posyandu yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Bangka, ketersediaan panti rehabilitasi gizi/*Therapeutic Feeding Centre* di Puskesmas Bakam dan Puskesmas Petaling sebagai sarana pelayanan kesehatan khusus bagi penderita masalah gizi, Pemberian Makanan Tambahan bagi balita gizi kurang dan gizi buruk, pemantauan kenaikan Berat Badan balita gizi buruk secara terus menerus dan pengawasan terhadap penyakit penyerta yang mungkin diderita balita gizi buruk merupakan upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran di atas. Pemanfaatan Dana



Bantuan Operasional Kesehatan di seluruh puskesmas serta Alokasi Dana Desa di beberapa desa turut mendukung penyediaan logistik PMT balita. Puskesmas juga melakukan berbagai inovasi seperti posyandu sore dan di hari libur serta rumah timbang balita. Fokus pemerintah pusat terhadap masalah gizi stunting juga meningkatkan kualitas pencatatan dan pemantauan status gizi balita melalui ePPGBM (Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik) yang dilanjutkan dengan intervensi dan pemantauan perbaikan status gizi.

Grafik 3.6
Perkembangan Indikator Kinerja Sasaran
Tahun 2018 – 2020



Perkembangan indikator kinerja sasaran selama 2018 - 2020 menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan trend capaian yang terus mengalami hasil yang cukup baik. Angka usia harapan hidup meningkat dari 70,73 tahun di tahun 2018 menjadi 70,99 tahun di tahun 2019 dan terus meningkat menjadi 71,06 di tahun 2020. Angka Stunting menurun signifikan dari 27,70 persen di tahun 2018 menjadi 3,82 persen di tahun 2019 dan terus menurun menjadi 1,50 di tahun 2020.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka kondisi masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel berikut :



Tabel 3.33
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S.D 2019 TERHADAP KONDISI AKHIR (%)
1.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70,99	71,06	70,85	100,30
2.	Angka Stunting	%	3,82	1,50	15,48	190,31

Angka usia harapan hidup pada tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin baik sehingga pola hidup sehat semakin meningkat.

Kabupaten Bangka ditetapkan menjadi kabupaten lokus intervensi prioritas nasional tahun 2019 dari 160 kabupaten/kota dimana terdapat 10 desa lokus yaitu Riding Panjang, Maras Senang, Neknang, Saing, Menduk, Kota Kapur, Penagan, Rukam, Cengkong Abang dan Air Duren.

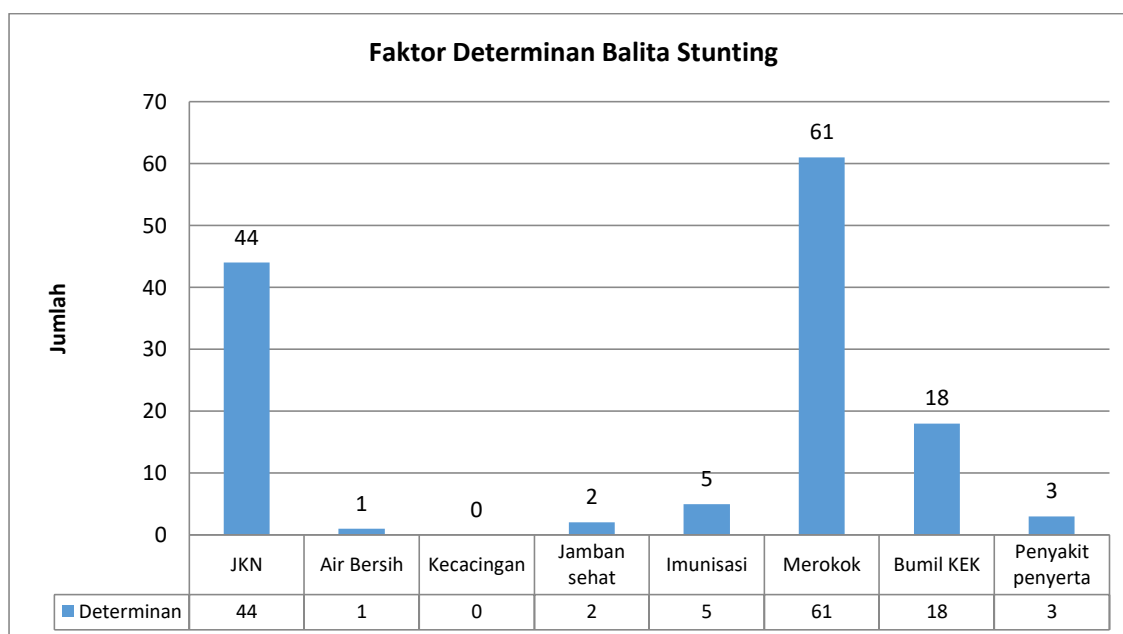
Berdasarkan hasil elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat tahun 2018 terjadi penambahan 4 desa lokus stunting baru dan 5 desa lokus tahun 2019 yang masih diatas 20% sehingga ditetapkan 9 desa lokus stunting di Kabupaten Bangka (prevalensi $\geq 20\%$) ditambah 5 desa prioritas nasional yang sudah turun prevalensi tapi masih di intervensi sehingga menjadi 14 desa lokus prioritas intervensi stunting yang terdiri dari 10 desa lokus intervensi prioritas nasional ditambah 4 desa yaitu Kace, Kace Timur, Kemuja dan Jurung.

Pada tahun 2020, prevalensi stunting pada balita berdasarkan e PPGBM menurun yaitu 2,62 % pada penimbangan bulan Februari dan 1,96% pada penimbangan bulan Agustus 2020.

Faktor determinan yang memerlukan perhatian adalah masih tingginya anggota keluarga yang merokok, untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 3.7
Rekap Faktor Determinan Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten Bangka
Menurut Aplikasi E PPGBM (1 Februari - 31 Agustus 2020)



Faktor determinan yang paling tinggi adalah adanya anggota rumah tangga balita merokok pada 61 balita stunting. Selain itu faktor determinan yang tertinggi kedua adalah tidak punya jaminan kesehatan. Masih adanya anggota rumah tangga merokok akan berisiko terhadap tingginya angka penyakit pernafasan pada balita sehingga akan memperberat terjadinya masalah gizi. Tingginya balita yang belum mempunyai jaminan kesehatan karena sebagian penduduk belum mampu membayar atau menunggak pembayaran sehingga tidak mendaftarkan balita pada JKN atau keanggotaan PBI kadang tidak tepat sasaran.

Perilaku yang tidak sehat seperti tidak mempunyai jamban sehat, akses air bersih kurang dan belum imunisasi lengkap, serta kecacingan dapat menyebabkan penyakit diare berulang. Untuk itu perlu perhatian intervensi gizi sensitive dari lintas sektor terkait dalam menangani masalah stunting pada balita.

Apabila dibandingkan dengan target kinerja dalam RPJMD maka dapat dilihat bahwa capaian sasaran kedua indikator sasaran sudah menunjukkan tren meningkat bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan setiap tahun terjadi perbaikan yang signifikan terhadap kinerja program kesehatan Pemerintah kabupaten Bangka. Analisis terhadap penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja dalam



keterkaitannya dengan sumber daya dapat dilihat dari kontribusi APBD dalam mendukung capaian kinerja indikator-indikator sasaran.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan surveilans gizi, pemantauan gizi balitas secara rutin setiap bulan di 231 Posyandu yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Bangka.
2. Tersedianya panti rehabilitasi gizi/Therapeutic Fedding Center di Puskesmas Bakam dan Petaling sebagai sarana pelayanan kesehatan khusus bagi penderita masalah gizi.
3. Pemberian Makanan Tambahan bagi balita gizi kurang dan gizi buruk.
4. Pemantauan kenaikan Berat Badan balita gizi buruk secara terus menerus dan pengawasan terhadap penyakit penyerta yang mungkin diderita balita gizi buruk.
5. Kegiatan inovasi seperti posyandu sore dan di hari libur serta rumah timbang balita.
6. Layanan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu yang siap melayani kegawatdaruratan yang terjadi di masyarakat yang terintegrasi dalam sistem aplikasi di android. Masyarakat hanya perlu menginstal aplikasi tersebut ke android, sehingga bila terjadi peristiwa kegawatdaruratan masyarakat hanya perlu mengakses aplikasi tersebut dan bantuan gawat darurat segera datang;
7. Kehamilan yang beresiko tinggi dapat dideteksi sedini mungkin dan dipantau melalui program aplikasi "Si Resti Cikar". Pelaksanaannya di lakukan oleh kader atau masyarakat yang mau dan mampu untuk melakukan pemantauan.
8. Semakin meningkatnya koordinasi antara bidan dan SPOG dalam menangani kehamilan beresiko tinggi;
9. Program Anak Bangka Sehat Cerdas adalah salah satu program pemerintah Kabupaten Bangka yang terpadu / terintegrasi baik secara lintas program maupun lintas sektor dalam penerapannya terjadi di setiap siklus kehidupan secara seimbang dengan menggugah kesadaran tentang hak dan kewajiban seteiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan dan kelembagaan dala memberi / menerima layanan kesehatan untuk menyongsong kehidupan yang berkualitas;



10. Akses ke Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya semakin mudah;
11. Dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Bangka untuk pelayanan kesehatan.
12. Ditetapkannya penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Bangka.
13. Pembinaan Pelayanan kesehatan peduli Remaja (PKPR) dan PKRT (perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) dalam mempersiapkan reproduksinya.
14. Pelaksanaan Program pelayanan Kesehatan antara lain: Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Dasar, Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Kegiatan Koordinasi Pelayanan Gizi Masyarakat, Kegiatan Koordinasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
15. Dukungan alokasi dana desa yang diperuntukan mengatasi masalah kesehatan dalam wilayah desa masing-masing.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari adanya 10 (Sepuluh) program prioritas pada Dinas Kesehatan, dan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka terutama pada program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
8. Program Peningkatan Keamanan Pangan Segar;
9. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
10. Program Pengembangan Pola Pangan;
11. Program Peningkatan Bahan Makanan;



Berikut ini merupakan beberapa permasalahan dan Langkah-langkah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan Kualitas kesehatan masyarakat antara lain :

Tabel 3.34
Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
- Masih sedikitnya tenaga kesehatan yang terlatih yang ditempatkan di daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan	- Penguatan pelaksanaan 3 T (Terlambat Mendeteksi, Terlambat Merujuk dan Terlambat Penanganan/Pemberian Pelayanan yang Adekuat) mulai dari level pelayanan di Bidan desa, Puskesmas Poned dan RS Rujukan, peningkatan Kompetensi tenaga Kesehatan bidan baik di desa maupun di puskesmas
- Masih tingginya angka penyakit tidak menular	- Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Bangka.
- Masih terbatasnya layanan internet di daerah tertentu sehingga menghambat layanan SPGDT	- Melakukan kerjasama dengan aparaturnya desa setempat sehingga dapat menginformasikan melalui kantor desa maupun layanan publik pemerintahan terdekat
- Terbatasnya jumlah armada ambulance dan tenaga medis yang mendukung layanan SPGDT	- Peningkatan kapasitas layanan SPGDT
- Masih terdapat kehamilan yang tidak diinginkan sehingga beresiko pada kesehatan ibu dan bayi	- Pendampingan ibu hamil oleh petugas kesehatan dan kader dapat menekan angka kematian ibu melahirkan



	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penyediaan gizi keluarga untuk mengurangi angka balita gizi buruk - Menggiatkan peran ibu-ibu PKK di desa dalam penyuluhan kesehatan ibu dan anak - Pemantapan implementasi inovasi SMS Bunda Cerdas, SI RESTI CIKAR dan SI DORA
<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya fasilitas kesehatan rujukan yang memiliki sarana NICU untuk menangani kasus neonatal 	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan sarana NICU pada fasilitas kesehatan rujukan
<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya tenaga dokter spesialis 	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan tenaga dokter spesialis

Untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran “Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas” diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.35
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

Tahun	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efektivitas (%)	Kriteria
2020	94,06	130,41	138,65	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan 2 (dua) indikator utama dapat dicapai sebesar 130,41 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain tercapai dengan sangat efektif.



Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menunjang pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat” dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

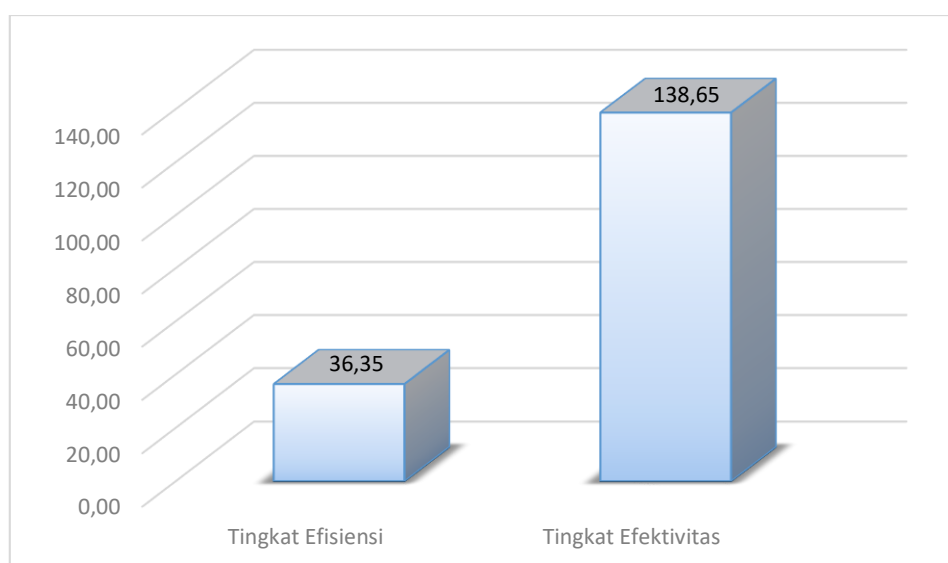
Tabel 3.36
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2020	130,41	20.142.571.245,00	18.946.486.773,00	94,06	36,35

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka (un audited), 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja seluruh program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2020 sebesar **Rp. 20.142.571.245,-** dengan realisasi belanja mencapai **Rp. 18.946.486.773,-** atau sebesar **94,06 persen**. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar **36,35 persen**.

Grafik 3.8
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian
Sasaran “Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat” Tahun 2020





6. Sasaran : Meningkatnya Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender salah satu faktor yang diperhatikan dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Kesetaraan gender meliputi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Untuk itu, Pengarusutamaan Gender (PUG) diperlukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki.



Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Secara nasional, partisipasi perempuan dalam pembangunan diukur melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 dalam kondisi pandemi covid-19 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Indonesia sebesar 67,77 persen naik tipis 0,24 persen dari tahun 2019. Berdasarkan jenis kelamin TPAK wanita bertambah. 1,32 persen menjadi 53,13 persen. TPAK Laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,84 persen menjadi 82,41 persen. Kondisi Nasional ini, menunjukkan bahwa TPAK perempuan masih jauh di bawah laki-laki.

Data dasar Kabupaten Bangka, dalam pelaksanaan kesetaraan gender dapat dilihat dari jumlah penduduk yang dihitung berdasarkan gender (jenis kelamin). Berdasarkan pelaksanaan pendataan jumlah penduduk tahun 2021, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, persentase penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka hampir sama. Data tersebut



menunjukkan dari total jumlah penduduk sebesar 320.552 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 164.802 (51,41%) dan perempuan sebesar 155.750 (48,59%). Adapun tingkat keaktifan perempuan yang duduk di legislatif pada tahun 2020 sebesar 17,14%, masih di bawah 30%, menunjukkan tingkat partisipasi perempuan di Kabupaten Bangka dalam lembaga formal masih rendah.

Upaya meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Bangka dengan melaksanakan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, dan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran program tersebut, dilihat dari Indikator Indeks Pemberdayaan Gender, yang tertera pada tabel 3.37.

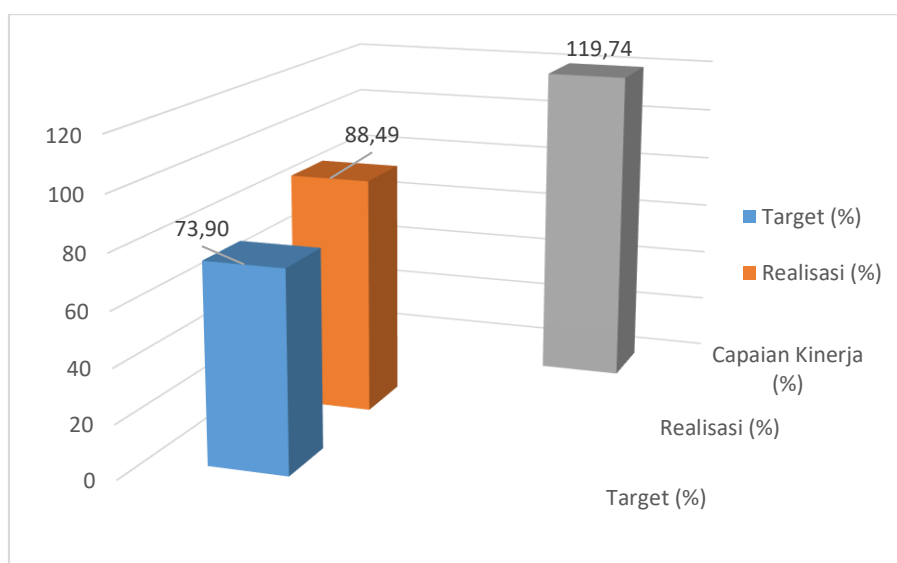
Tabel 3.37
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Tahun 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	73,90	88,49	119,74	MT
Rata- Rata Capaian					119,74	MT

Berdasarkan pengukuran tingkat capaian sasaran melalui indikator-indikator sebagaimana tertera pada tabel diatas diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran adalah 119,74 persen yang berdasarkan derajat kinerja dikategorikan sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sasaran “meningkatnya kesetaraan gender” telah melebihi target.



Grafik 3.9
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Tahun 2020



Indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan sasaran adalah Indeks Pemberdayaan Gender. Indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender adalah indikator yang menunjukkan semakin tinggi angka realisasi berarti capaian atau keberhasilan sangat baik.

Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2020 mencapai usia 88,49 persen. Angka ini telah mencapai target yang dibuat yaitu 73,90 persen, dengan capaian sasaran sebesar 119,74 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka kondisi masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.38
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S.D 2020 TERHADAP KONDISI AKHIR
1.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	72,07	88,49	73,9	108,71



Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran agar peningkatan kesetaraan gender semakin baik, sebagai berikut :

1. Sinergitas antar lembaga, pemerintah/pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya peningkatan kesetaraan gender, agar pemangunan berbasis gender berhasil dengan baik dan tepat sasaran.
2. Pendekatan pembangunan yang mengakomodir pengarusutamaan gender terutama kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan
3. Keaktifan lembaga perlindungan perempuan dan anak, dalam menyajikan data dan melaksanakan tugas menangani dan pendampingan baik secara fisik, psikologi dan hukum dilakukan secara professional dan terpadu.

Beberapa masalah dan Upaya Pemecahan Masalah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, dalam meningkatkan kesetaraan gender, antara lain :

Tabel 3.39
Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
- Masih rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Program Perburuan Anak-anak putus sekolah ke sekolah kependidikan non formal pendidikan kesetaraan - Memperbanyak Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di setiap desa/ kelurahan - Peningkatan Akses dan pelayanan Pendidikan bagi perempuan salah satunya dengan mencanangkan sekolah perempuan.
- Masih rendahnya Pengeluaran per kapita perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pelatihan keterampilan khusus perempuan. - Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga baik melalui usaha ekonomi mikro, maupun dengan cara membuka



	peluang dan kesempatan kerja khusus perempuan. - Mengoptimalkan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di setiap desa / kelurahan
- Masih rendahnya fasilitas umum, yang berbasis gender	- Menyediakan fasilitas umum dengan sarana berbasis gender

Selanjutnya, untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Bangka diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.40
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

Tahun	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efektivitas (%)	Kriteria
2020	88,91	119,74	134,69	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan 1 (satu) indikator utama dapat dicapai sebesar 119,74 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain tercapai dengan sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran “Meningkatnya kesetaraan Gender” dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.41
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

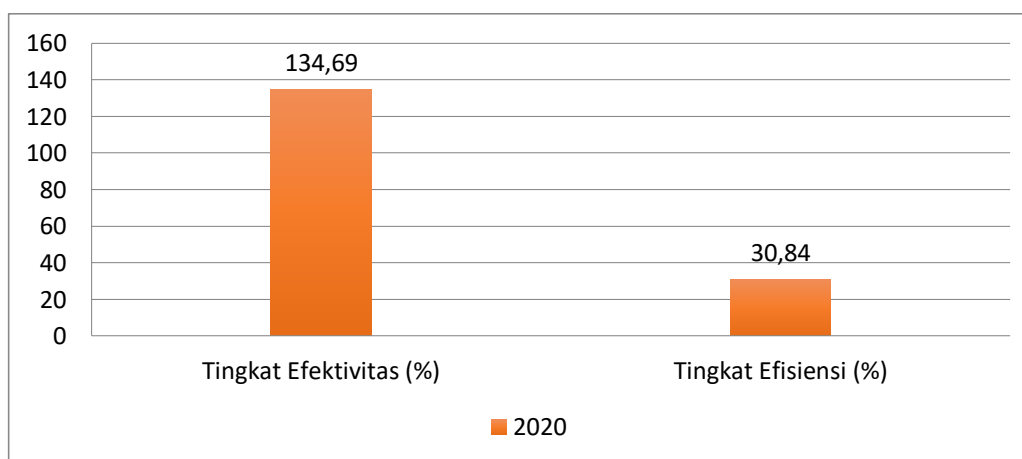
Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2020	119,74	145.068.000	128.973.125	88,91	30,84

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka (un audited), 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja seluruh program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 145.068.000,- dengan realisasi belanja mencapai Rp. 128.973.125,- atau sebesar 88,91%. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 30,84 %.



Grafik 3.10
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian
Sasaran “Meningkatnya Kesetaraan Gender” Tahun 2020





7. Sasaran : Meningkatnya Perlindungan Pemenuhan Hak-hak Anak

Perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan hal yang penting dilakukan oleh suatu bangsa, karena anak adalah aset pembangunan masa depan dan eksistensi bangsa. Pemenuhan dan perlindungan hak anak meliputi hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B UUD 1945). Untuk itu Pemerintah memiliki kewajiban dalam melindungi dan pemenuhan hak anak dengan pengintegrasian aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak pada setiap pembangunan yang dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya mendapatkan generasi penerus yang memiliki daya saing global.

Tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan terhadap hak anak adalah menyediakan fasilitas, aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (*sustainable development*). Pemenuhan hak anak pun harus dilakukan ada 13 (Tiga belas) hak anak berdasarkan UU Nomor 23



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tidak semua anak beruntung mendapatkan perlindungan haknya, sebagian anak mendapat diskriminasi, kekerasan dan kesalahan pola asuh, dan penelantaran yang dilakukan oleh orang tua.

Implikasi dari persoalan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyelenggarakan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak sejak tahun 2018. Penghargaan ini bertujuan agar pemerintah daerah setempat dapat mendorong keluarga-keluarga, Masyarakat, Media di wilayahnya untuk semakin paham pada upaya pemenuhan hak anak. Pemerintah daerah juga didorong melakukan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin agar hak-hak anak dapat dipenuhi, sebagaimana amanat konstitusi.



Pemerintah Kabupaten Bangka, sudah mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk melindungi dan memenuhi hak anak dalam dokumen pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta indikator capaian kinerja



Kabupaten/Kota layak Anak. Dokumen ini juga menunjukkan seberapa besar dukungan sumber daya manusia, keuangan sarana, prasarana dan metode yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka menciptakan Kabupaten/kota yang dapat memenuhi hak-hak anak. Sejak dicanangkannya pelaksanaan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten Bangka sudah mengikuti penghargaan Kabupaten Bangka, sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk mengimplemetasikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pemerintah Kabupaten dalam upaya mewujudkan KLA, dengan menggunakan pendekatan *Holistic, Integrative, Tematic, dan Spasial* dengan melibatkan Pemerintah, Masyarakat/Komunitas, Swasta, Akademisi, dan Media (Pentahelix), untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah KLA.

Selanjutnya, untuk mengetahui indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Bangka, target dan capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

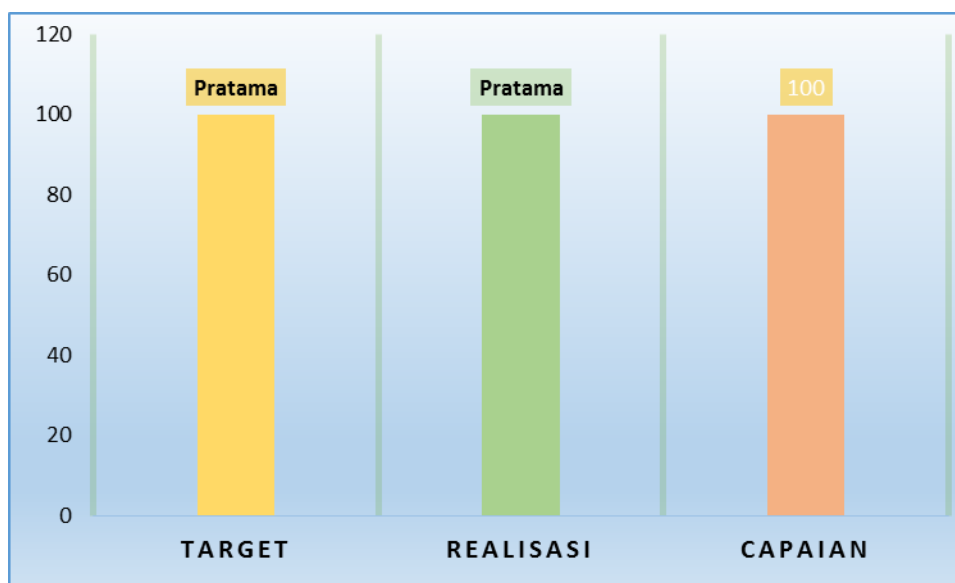
Tabel 3.42
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Tahun 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	100,00	T
Rata- Rata Capaian					100,00	T



Berdasarkan pengukuran tingkat capaian sasaran melalui indikator-indikator sebagaimana tertera pada tabel di atas diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran adalah 100,00 persen yang berdasarkan derajat kinerja dikategorikan sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sasaran “meningkatnya pemenuhan hak-hak anak” telah mencapai target.

Grafik 3.11
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Tahun 2019



Indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan sasaran “meningkatnya pemenuhan hak-hak anak” adalah Status Kabupaten Layak Anak. Indikator sasaran status kabupaten layak anak adalah indikator yang menunjukkan pencapaian menaikan status kabupaten yang menciptakan daerah yang bener-bener layak anak.

Status Kabupaten Layak Anak tahun 2019 mencapai status pratama. Status ini telah mencapai target yang dibuat yaitu status pratama, dengan capaian sasaran sebesar 100,00 persen. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.



Untuk tahun 2020, evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2020 diadakan, melalui surat Nomor : B.566/KPPPA/D.IV/Sesdep/06/2020, hal Evaluasi KLA Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan sasaran ini adalah:

1. Kebijakan dalam pemenuhan dan pengembangan KLA dengan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi/pusat, masyarakat/komunitas, swasta, akademisi, media .
2. Pengembangan Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak.
3. Peran orang tua dan guru dalam pola asuh dan pola didik terhadap anak di lingkungan keluarga dan sekolah dengan melakukan penguatan kapasitas orang tua dan guru dengan memberikan fasilitasi bimbingan dan pelatihan, untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam memenuhi hak anak di rumah dan disekolah.
4. Peningkatan Pendekatan kombinasi antara pendekatan bottom-up dan top-down sebagai upaya pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya konsep layak anak di Kabupaten Bangka.
5. Sosialisasi dan edukasi terutama di kalangan pelaku usaha dan seluruh lapisan masyarakat terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Beberapa masalah dan Upaya Pemecahan Masalah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka antara lain :

Tabel 3.43
Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
- Angka rata-rata perkawinan anak yang masih di atas angka nasional	- Melakukan MoU Antara Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Kementerian Agama untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya untuk tidak menikah dalam usia anak.



	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan Lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga. - Sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat yang rentan, terkait dampak negatif pernikahan pada usia anak.
<ul style="list-style-type: none"> - Belum seluruh fasilitas publik yang memiliki ruang laktasi dan area bermain anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat peraturan terkait penyediaan Ruang Laktasi baik di fasilitas umum instansi pemerintah maupun dunia usaha. - Sosialisasi dan edukasi terkaitnya pentinga ruang laktasi dan area bermain anak.
<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penyelenggaraan Sekolah Ramah anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi penyelenggaraan Sekolah Ramah anak, mulai dari tingkat PAUD, SD/MI, SMP/Mts, SMA/MAN di Kabupaten Bangka. - Menyediakan fasilitas konseling di disekolah penanganan permasalahan anak.
<ul style="list-style-type: none"> - Belum maskimalnya penyediaan Pusat Kreatifitas Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi sarana yang dapat digunakan sebagai wadah anak berkumpul dan melakukan kreatifitas.
<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penanganan anak korban bencana/konflik 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA)
<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Kecamatan Layak Anak dan Desa / Kelurahan Layak Anak yang belum menyeluruh 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pembentuk Forum Anak di setiap kecamatan dan Desa serta kelurahan. - Sosialisasi dan edukasi terkait peran dan fungsi forum anak dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari 2 (dua) program prioritas beberapa PERANGKAT DAERAH Kabupaten Bangka. Ada pun program prioritas yang yang dimaksud yakni :

1. Program Keluarga Berencana; dan
2. Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak.



Untuk mengukur efektifitas capaian kinerja sasaran “meningkatnya pemenuhan hak-hak anak”, diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.44
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2020	100	96,45	103,69	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan indikator utama dapat dicapai sebesar 100 persen dengan realisasi keuangan sasaran hanya sebesar 96,45 persen sehingga tingkat efektifitas terhadap pencapaian sasaran justru sebesar 103,69 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.45
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2020	100,00	3.667.082.000,00	3.536.725.332,00	96,45	3,55

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.667.082.000,- dengan realisasi belanja mencapai hanya Rp. 3.536.725.332,00,- atau sebesar 96,45 persen, dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 3,55 persen.



8. Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi Yang Berkualitas

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Begitu banyak dan besarnya peran infrastruktur sehingga dalam sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, adalah sebesar 60%. Bahkan studi dari World Bank disebutkan elastisitas PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara/daerah adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan 1 (satu) persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%, variasi angka yang cukup signifikan. Secara empiris jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta perkembangan suatu negara atau wilayah.

Pemerataan pembangunan merupakan sebuah langkah yang cukup besar untuk menuju pemerataan ekonomi. Dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik, sebuah daerah maupun negara dapat menghidupi dirinya sendiri. Setelah tercapainya infrastruktur yang baik, maka semua akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses ekonomi di dalamnya.

Kegiatan pembangunan infrastruktur Kabupaten Bangka sendiri sebenarnya juga membuka lapangan pekerjaan baru untuk dan bagi penduduk daerah Bangka. Hal ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di daerah pastinya. Faktor utama untuk membangun infrastruktur Indonesia pastinya sangat



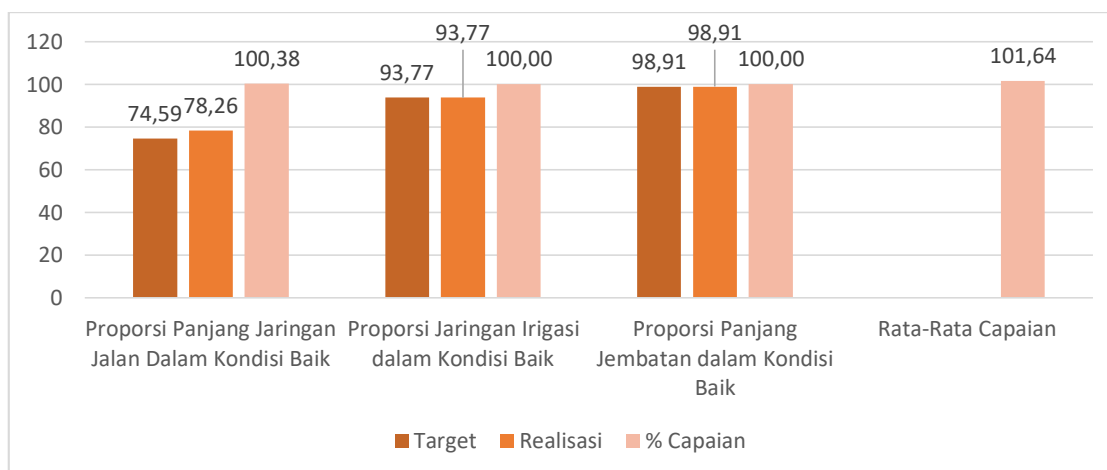
membutuhkan akan pengelolaan dan keterlibatan dari tenaga masyarakat Bangka itu sendiri.

Sasaran meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas diukur dengan indikator –indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik serta jaringan jembatan dalam kondisi baik. Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.46
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Tahun 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	%	74,59	78,26	104,92	MT
2.	Proporsi Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	93,77	93,77	100,00	T
3.	Proporsi Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	%	98,91	98,91	100,00	T
Rata- Rata Capaian					101,64	MT

Grafik 3.12
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi Yang Berkualitas”





Berdasarkan tabel diatas, indikator sasaran yang menunjang pencapaian sasaran “Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi Yang Berkualitas pada tahun 2020 memiliki rata-rata capaian 101,64 persen yang berarti kinerja sasaran termasuk dalam kategori melampaui target. Walaupun demikian, penetapan target untuk indikator proporsi panjang jalan sebesar 74,59 persen belum menggambarkan kondisi infrastruktur jalan yang ideal di Kabupaten Bangka. Penetapan target yang cukup rendah tersebut dikarenakan refocusing APBD sebagai dampak dari pandemi Covid 19. Realokasi anggaran infrastruktur untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial terjadi akibat dari refocusing anggaran tersebut. Masalah lain juga Struktur APBD Kabupaten yang masih sangat bergantung dari dana perimbangan serta kewajiban pemenuhan standar pelayanan minimal setiap urusan menjadikan pembiayaan kegiatan harus diprioritaskan dengan sangat seksama.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka kondisi masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

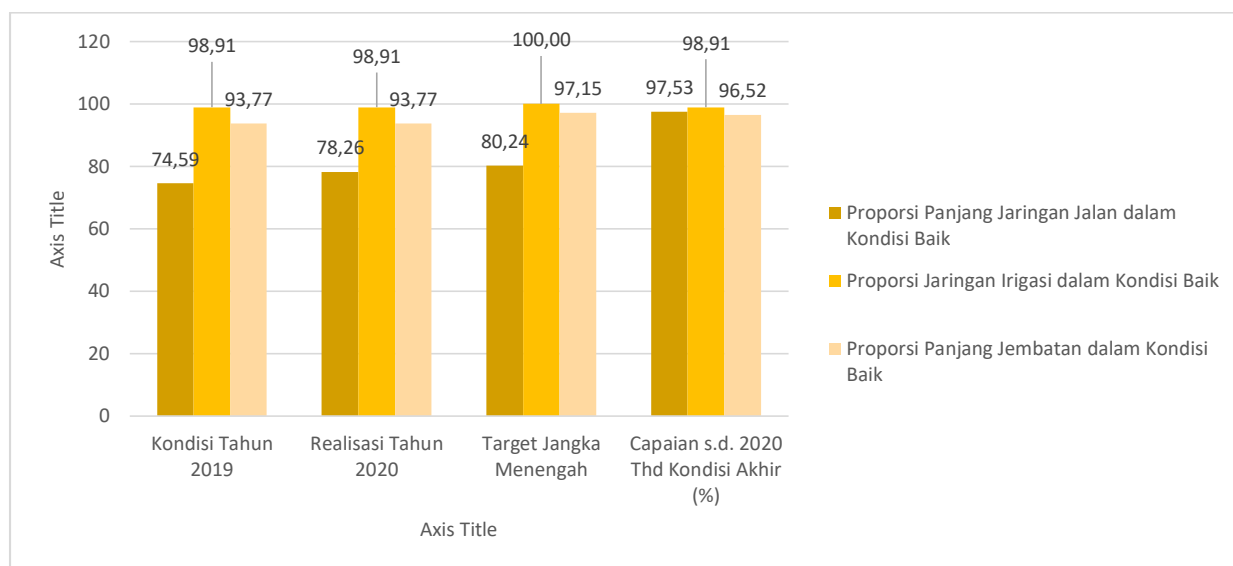
Tabel 3.47
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S.D 2020 TERHADAP KONDISI AKHIR (%)
1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	%	74,59	78,26	80,24	97,53
2.	Proporsi Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	98,91	98,91	100,00	98,91
3.	Proporsi Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	%	93,77	93,77	97,15	96,52

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bangka



Grafik 3.13
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah



Jika perbandingan dilakukan terhadap kondisi tahun 2019, maka hanya untuk indikator panjang jalan dalam kondisi baik yang mengalami peningkatan di tahun 2020. Pada tahun 2019 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tercatat sebesar 74,59 persen. Untuk dua indikator pembangunan infrastruktur yaitu jaringan irigasi dan jaringan jembatan tidak mengalami kenaikan persentase dalam kondisi baik mengingat refocusing anggaran yang dilakukan sehingga pada tahun 2020 intervensi terkait pembangunan irigasi dan jembatan tertunda.

Perbandingan dengan target RPJMD menunjukkan bahwa kinerja bidang infrastruktur sudah mencapai persentase yang cukup tinggi, yaitu berada diatas angka 90 persen. Pada tahun 2020, proporsi panjang jaringan jalan, irigasi maupun jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Bangka telah mencapai masing-masing sebesar 97,53 persen, 98,91 persen dan 96,52 persen dari target jangka menengah yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi dukungan pembangunan infrastruktur terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Bangka telah berjalan dengan baik.

Analisis terhadap penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja dalam keterkaitannya dengan sumber daya dapat dilihat dari besaran kontribusi APBD dalam mendukung pencapaian target kinerja yaitu melalui anggaran APBD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka.



Faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan Mapping Kegiatan Prioritas di tengah refocusing anggaran akibat dampak dari covid 19.
2. Komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terutama terkait penganggaran program dan kegiatan;
3. Dukungan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam penyediaan lahan;
4. Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan oleh PERANGKAT DAERAH terkait bersama tim pengadaan barang dan jasa/ULP agar pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
5. Sinergitas prioritas, strategi, arah kebijakan yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan prioritas antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam pendanaan mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari adanya 9 (sembilan) program utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka terutama pada :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong;
3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
4. Program Lingkungan Sehat Perumahan
5. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
8. Program Pengendalian Banjir;
9. Program Perencanaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pemerintah Daerah



Berikut ini merupakan beberapa permasalahan dan Langkah-langkah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan infrastruktur ekonomi yang berkualitas antara lain :

Tabel 3.48
Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
<ul style="list-style-type: none"> - Dampak dari pandemi Covid 19 yang menyebabkan terjadi banyak pengurangan dana pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD 	<ul style="list-style-type: none"> - Memetakan Kegiatan pembangunan infrastruktur yang memiliki daya ungkit ekonomi yang baik dari sekian kegiatan yang sebelum refocusing telah ditetapkan - Memanfaatkan kerjasama dengan private sektor terkait pembangunan infrastruktur jalan khususnya pembangunan jalan di sentra pertanian
<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pelelangan yang cukup panjang yang memerlukan ketelitian dan komitmen di tingkat pengambil kebijakan dan pelaksana untuk mengikuti dan memenuhi semua persyaratan dalam proses lelang berupa pemenuhan syarat-syarat administrasi. Kelemahan dalam administrasi pelelangan atau pengadaan barang/jasa untuk kegiatan konstruksi ini menjadi salah satu penghambat keberhasilan program ini dalam upaya mencapai target yang sudah ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) menjalankan fungsinya melalui pertemuan-pertemuan yang berkesinambungan untuk memastikan dan menyelesaikan permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan
<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang sering terlambat diterima memerlukan strategi khusus agar semua persiapan pengadaan barang/jasa konstruksi dapat dilaksanakan segera dan selesai tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk pembangunan yang didanai dari DAK, mengingat kewenangan penetapan anggaran DAK ada pada Pemerintah Pusat maka harus disikapi dengan persiapan yang sangat baik untuk SDM teknis, jadwal kegiatan serta koordinasi antar PERANGKAT DAERAH yang intensif agar



	pembangunan dapat tepat waktu dan penyerapan DAK mencapai 100%
- Ketersediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur ini juga sangat sering menjadi kendala terlaksananya kegiatan pembangunan ini. Idealnya penyediaan lahan dilakukan setahun sebelum pembangunan dilaksanakan sehingga pembangunan bisa dilaksanakan tepat waktu	- Memastikan mulai dari tingkat perencanaannya bahwa lokasi pembangunan tidak pada kawasan hutan dan memastikan lahan <i>clean and clear</i> (C & C) dan atau memastikan kegiatan penyediaan lahan dilakukan setahun sebelumnya

Untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi Yang Berkualitas**” diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.49
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Tingkat Efektifitas (%)	Kriteria
2020	101,64	84,45	120,36	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan indikator utama dapat dicapai sebesar 101,64 persen dengan realisasi keuangan sasaran sebesar 84,45 persen sehingga tingkat efektifitas terhadap pencapaian sasaran sebesar 120,36 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat digambarkan pada tabel berikut :



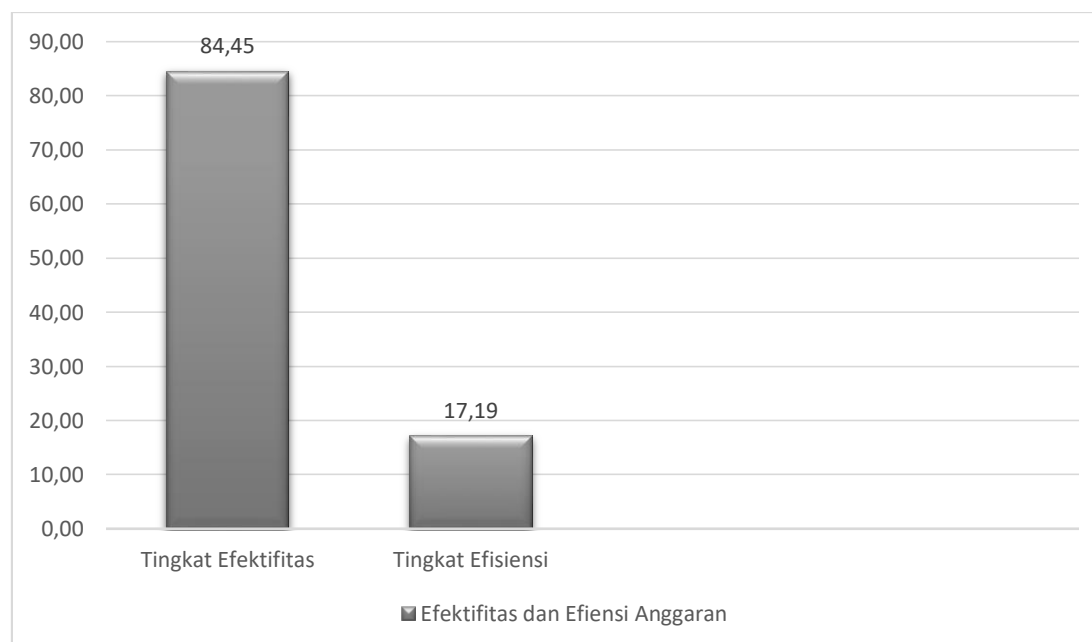
Tabel 3.50
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2019	101,64	29.735.565.755	25.110.339.695,53	84,45	17,19

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka (un audited), 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 29.735.565.755,- dengan realisasi belanja mencapai hanya Rp. 25.110.339.695,53 atau sebesar 84,45 persen. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 17,19 persen.

Grafik 3.14
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian
Sasaran “Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi Yang Berkualitas” Tahun 2020





9. Sasaran : Meningkatnya infrastruktur Sosial yang berkualitas

Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan komponen yang ada dalam masyarakat. Membangun infrastruktur sosial berarti membangun prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur sosial memegang peranan yang sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, keberadaan infrastruktur yang sangat memadai sangat diperlukan.

Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, akses terhadap layanan infrastruktur sosial yang lebih berkualitas dan kehidupan sosial yang lebih baik. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas di Kabupaten Bangka berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.51
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Tahun 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase Masyarakat yang terlayani Sanitasi Dasar	%	95,12	96,16	101,09	MT
2.	Persentase Masyarakat yang memiliki Akses Air Bersih	%	98,71	99,75	101,05	MT
3.	Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik	%	32,38	32,38	100,00	T
4.	Persentase Masyarakat Miskin yang terlayani Rumah Layak Huni	%	97,40	98,25	100,87	MT
5.	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	%	0,016	0,016	100,00	T
Rata - Rata Capaian					100,60	MT



Berdasarkan pengukuran tingkat capaian sasaran melalui indikator-indikator sebagaimana tertera pada tabel diatas diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran adalah 100,60 persen yang berdasarkan derajat kinerja dikategorikan sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sasaran “Meningkatnya infrastruktur Sosial yang berkualitas” telah melebihi target.

Indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan sasaran “Meningkatnya infrastruktur Sosial yang berkualitas” terdiri dari Persentase Masyarakat yang terlayani Sanitasi Dasar, Persentase Masyarakat yang memiliki Akses Air Bersih, Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik, Persentase Masyarakat Miskin yang terlayani Rumah Layak Huni dan Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh.

Persentase Masyarakat yang terlayani Sanitasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga berakses sanitasi dibagi jumlah rumah tangga dikalikan seratus persen. Sanitasi layak dapat didefinisikan sebagai penggunaan kloset leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik atau SPAL, dan digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama. Rumah tangga yang memiliki sanitasi layak di Kabupaten Bangka menunjukkan perkembangan yang positif. Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar pada tahun 2020 yaitu 96,16 persen. Angka tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu 95,12 persen. Capaian sasaran persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar pada tahun 2020 sudah dalam kategori sangat tinggi dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,09 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah berhasil memberikan layanan sanitasi dasar kepada masyarakat.

Sarana air bersih juga mempunyai peran sangat strategis untuk meningkatkan taraf hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Tuntutan kebutuhan air bersih yang memenuhi standar kesehatan terus mengalami peningkatan. Penyediaan air minum di Kabupaten Bangka dilakukan dengan sistem perpipaan dan non perpipaan. Jumlah Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Bersih sebanyak 90.988 keluarga dari sebanyak 51 Penyelenggara Air Minum. Sistem perpipaan dilayani oleh PDAM, SPAM Perdesaan dan SPAM Masyarakat. Sistem non perpipaan menggunakan sumur, sumur bor atau mata air permukaan. Penggunaan sumur bor



mencapai 15% dari total penggunaan sumber air minum non perpipaan. Persentase masyarakat yang memiliki akses air bersih pada tahun 2020 mencapai 99,75 angka tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 98,71 sehingga persentase capaian kinerja sudah 101,05.

Setiap wilayah yang ada di Kabupaten Bangka memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kegiatan sosial ekonomi yang beragam. Pembangunan tanpa perencanaan ruang yang baik tidak hanya akan beresiko pembangunan yang gagal tetapi juga akan menimbulkan kesenjangan antar wilayah yang menyebabkan timbulnya berbagai konflik sosial yang merugikan.

Peranan tata ruang pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya secara optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan antar sektor. Penyimpangan pemanfaatan ruang menimbulkan degradasi lingkungan darat, air maupun udara. Begitu eratnya hubungan penataan ruang dengan kelestarian lingkungan hidup dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan setiap daerah menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30,00 persen dari Luas Wilayah Perencanaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka (2010-2030) dan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat (2014-2034) merupakan regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka.

Pencapaian sasaran Meningkatnya infrastruktur Sosial yang berkualitas salah satunya diukur dengan indikator Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik. Pada tahun 2020 persentase kecukupan luasan RTH Publik sebesar 32,38, angka tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 32,28 persen, sehingga persentase pencapaian kinerja mencapai 100 persen.

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a UU PKP). Pemerintah Kabupaten Bangka melalui program penyediaan rumah layak huni berharap dapat meningkatkan kualitas



hidup para penerima manfaat dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman. Penyediaan rumahlayakhuni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan atau masyarakat kurang mampu dapat berupa pembangunan baru maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni, hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

Persentase masyarakat miskin yang terlayani rumah layak huni pada tahun 2020 sebesar 98,25 persen, angka ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,40 persen. Capaian sasaran persentase masyarakat miskin yang terlayani rumah layak huni pada tahun 2020 sudah dalam kategori sangat tinggi dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,87.

Perkembangan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan baik karena faktor pertumbuhan penduduk kota itu sendiri maupun karena faktor urbanisasi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, maka kebutuhan penyediaan akan prasarana dan sarana permukiman akan meningkat pula, baik melalui peningkatan maupun pembangunan baru. pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman mulai menurun. Hal ini lah yang kemudian memicu munculnya lingkungan permukiman kumuh di perkotaan.

Lingkungan permukiman kumuh di perkotaan di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat kompleks, diantaranya adalah permasalahan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan hunian yang tidak layak huni, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sarana dan prasarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat, tidak tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan maupun sarana dan prasarana sosial budaya kemasyarakatan yang memadai.

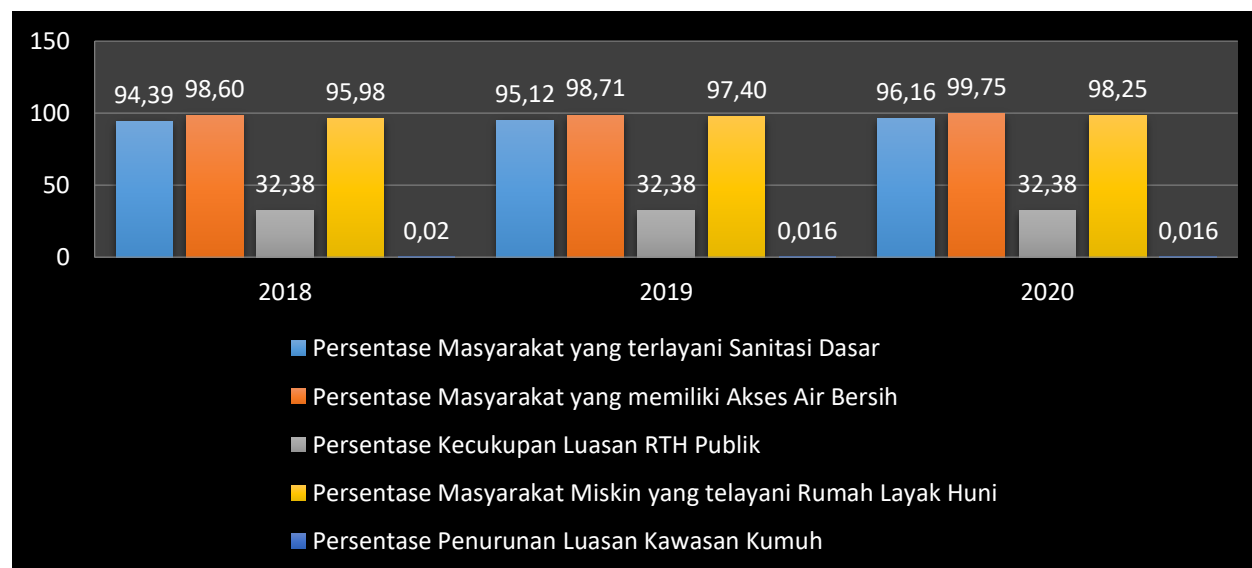
Kabupaten Bangka adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang juga mengalami permasalahan permukiman kumuh akibat urbanisasi, rendahnya tingkat perekonomian, budaya masyarakat yang tidak peduli lingkungan permukiman serta



terbatasnya ketersediaan lahan untuk permukiman. Pemerintah Kabupaten Bangka berkomitmen untuk mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh yang merupakan target nasional permukiman tanpa kumuh. Dengan ditetapkannya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka, maka pemerintah daerah berkomitmen untuk melaksanakan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka meliputi sejumlah 5 (lima) lokasi, di 2 (dua) kecamatan, dengan total luasan sebesar 49,27 Ha.

Pada tahun 2020 persentase penurunan luasan kawasan kumuh di Kabupaten Bangka sebesar 0,016 persen, angka tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,016 persen, sehingga persentase pencapaian kinerja mencapai 100 persen.

Grafik 3.15
Perkembangan indikator kinerja sasaran Tahun 2018-2020



Perkembangan indikator kinerja sasaran selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan trend capaian yang terus meningkat. Persentase Masyarakat yang terlayani Sanitasi Dasar pada tahun 2018 sebesar 94,39 persen meningkat menjadi 96,16 persen pada tahun 2020. Persentase masyarakat yang memiliki akses air bersih pada tahun 2018 sebesar 98,60 meningkat di tahun 2019 menjadi 98,71 persen dan kembali mengalami peningkatan di tahun



2020 menjadi 99,75 persen. Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik pada tahun 2018 sebesar 32,38 persen dan pada tahun 2019 tetap sebesar 32,38 persen. Persentase Masyarakat Miskin yang terlayani Rumah Layak Huni di tahun 2018 sebesar 95,98 persen dan meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 98,25 persen. Persentase penurunan luasan kawasan kumuh di tahun 2018 sebesar 0,02 persen dan menurun di tahun 2020 menjadi 0,016 persen.

Selanjutnya jika dibandingkan target jangka menengah maka kondisi masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.52
Perbandingan indikator sasaran dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S.D 2020 TERHADAP KONDISI AKHIR (%)
1	Persentase Masyarakat yang terlayani Sanitasi Dasar	Persen	96,16	100,00	96,16
2	Persentase Masyarakat yang memiliki Akses Air Bersih	Persen	99,75	100,00	99,75
3	Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik	Persen	32,38	32,38	100,00
4	Persentase Masyarakat Miskin yang terlayani Rumah Layak Huni	Persen	98,25	100,00	98,25
5	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	Persen	0,016	0,01	40,00

Ada beberapa permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, yaitu :



Tabel 3.53
Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
- akses penyediaan air bersih yang masih belum memadai terutama pada jaringan air bersih perpipaan	- memperbanyak akses perpipaan SPAM IKK di pedesaan dan membebaskan biaya pemasangan bagi masyarakat yang kurang mampu
- Belum tersedianya cadangan air baku yang sustainable dan dapat diandalkan serta kondisi sumber air baku yang tidak terpelihara	- Melakukan pemeliharaan terhadap sumber air minum agar bisa tetap terjaga volume maupun kualitas airnya serta keberlanjutannya

Apabila dibandingkan dengan target kinerja dalam RPJMD maka dapat dilihat bahwa capaian sasaran ke lima indikator tersebut menunjukkan sudah pada posisi yang seharusnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja program dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas sudah semakin baik.

Analisis terhadap penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja dalam keterkaitannya dengan sumber daya yang ada dapat dilihat dari besaran kontribusi APBD yang mendukung pencapaian target indikator sasaran ini pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari adanya 7 (tujuh) Program yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
3. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
4. Program Pengembangan Perumahan;
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
6. Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan; dan
7. Program Pengembangan Data/Informasi Permukiman.



Untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran “Meningkatnya infrastruktur Sosial yang berkualitas” diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.54
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Anggaran Sasaran (%)	Tingkat Efektifitas (%)
2020	100,60	94,69	106,25

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan indikator utama dapat dicapai sebesar 100,60 persen dengan realisasi keuangan sasaran hanya sebesar 94,69 persen sehingga tingkat efektifitas terhadap pencapaian sasaran justru sebesar 106,25 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.55
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2020	100,60	4.999.840.600,00	4.734.229.339,00	94,69	5,92

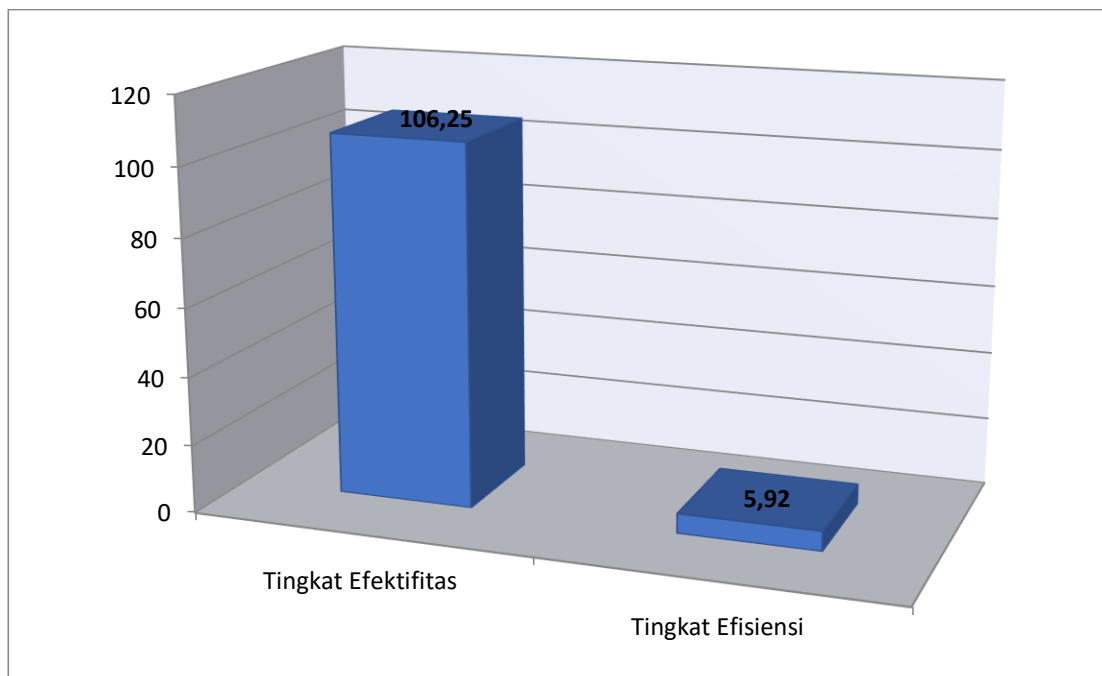
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Bangka (Un Auditted), 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.999.840.600,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 4.734.229.339,- atau sebesar 94,69 persen. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 5,92 persen.



Grafik 3.16

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian Sasaran “Meningkatnya infrastruktur Sosial yang berkualitas” Tahun 2020



10. Sasaran : Meningkatkan Pengembangan Kepariwisata Berbasis *Sport Tourism*, Kearifan dan Budaya Lokal serta Sumber Daya Alam Pariwisata



Pantai Parai Tenggara, Sungailiat

Sektor pariwisata di Kabupaten Bangka yang dikembangkan berbasis *sport tourism*, kearifan dan budaya lokal serta sumber daya alam. Hal ini dilakukan mengingat sektor pariwisata (*travel and tourism*) terbukti secara nyata mampu berkontribusi signifikan terhadap

perekonomian daerah. Terlebih, disaat sektor pertambangan dan penggalian yang sampai dengan tahun 2014 menjadi *core sektor* tidak lagi menjadi primadona utama katalisator PDRB Kabupaten Bangka.



Indikator keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2020 beserta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.56
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Tahun 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	1,49	1,32	88,68	TT
Rata- Rata Capaian					88,68	TT

Berdasarkan pengukuran tingkat capaian sasaran melalui indikator sebagaimana tertera pada tabel di atas diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran adalah **88,68 persen** yang berarti target tidak tercapai. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka yang ditargetkan mengalami peningkatan 1,42 persen ternyata hanya meningkat sebesar 1,32 persen. Data kunjungan wisatawan di Kabupaten Bangka Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.17
Kunjungan Wisatawan
di Kabupaten Bangka Tahun 2017 – 2020



Sumber : Dinparbudaya, 2020



Berdasarkan tabel di atas jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka selama periode tahun 2017 – 2020 menunjukkan trend yang terus meningkat dengan rata-rata sebanyak 88.114 orang. Namun persentase peningkatan kunjungan wisatawannya pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1,42 persen tidak tercapai dan mengalami penurunan dari tahun 2019. Target peningkatan persentase kunjungan wisatawan sebesar 1,42 persen pada 2020 tersebut setara dengan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 101.800 orang tetapi realisasinya pada tahun 2020 hanya meningkat 1,32 persen atau kunjungan wisatawan hanya mencapai 91.558 orang.

Tidak tercapainya target yang ditetapkan karena dampak covid-19 yang sangat memukul sektor pariwisata. Pada awal Maret 2020, ketika Presiden Republik Indonesia mengumumkan bahwa virus covid-19 sudah masuk ke Indonesia maka terjadi pembatasan transportasi baik yang masuk maupun yang keluar Pulau Bangka. Hal ini juga dipertegas oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tanggal 28 Maret 2020 menyatakan bahwa maskapai yang melayani rute ke Bandara Depati Amir hanya 1 (satu) maskapai per hari serta membatasi angkutan penyebrangan laut yang hanya melayani angkutan barang kebutuhan pokok.

Kondisi ini menyebabkan seluruh event pariwisata di Kabupaten Bangka dibatalkan seperti *Triathlon, Sungailiat Trail Run, Bangka Culture Wave dan Festival Karang Lintang*. Sedangkan objek wisata yang ada pun dibuka dengan sangat terbatas dengan penerapan protokol covid-19 yang ketat. Namun pada Triwulan III Tahun 2020, kebijakan untuk membuka kembali jalur penerbangan dan jalur penyebrangan dari dan ke Pulau Bangka dengan penerapan prosedur covid-19, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka berangsur-angsur mulai meningkat terutama untuk wisatawan domestik. Peningkatan kunjungan wisatawan ini didorong oleh beberapa destinasi wisata baru seperti Bukit Pilar Matras Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat, Kebun Bunga “*Celosia Garden Ake*” di Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat, Telaga Emas Bersinar di Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat, Pantai Cemara di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat, Aek Lelap Bedelew di Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu dan Konservasi Biodiversity Sungai Upang Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar, disamping beberapa lokasi wisata yang telah lama ada dan tetap menarik untuk dikunjungi. Selengkapnya beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Bangka tersaji pada tabel berikut ini.



Tabel 3.57
Objek Wisata di Kabupaten Bangka

No	Nama	Lokasi
1	Pantai Matras	Sungailiat
2	Pantai Penyusuk	Belinyu
3	Pantai Rambak	Sungailiat
4	Pantai Air Anyir	Merawang
5	Puri Tri Agung	Sungailiat
6	Bukit Mahayana	Sungailiat
7	Pantai Tanjung Pesona	Sungailiat
8	Novila Kuala	Sungailiat
9	Pantai Teluk Uber	Sungailiat
10	Tirta Tapta Pemali	Pemali
11	Kebun Raya Rimbe Mambang	Bakam
12	Situs Kota Kapur	Puding Besar
13	Air Simpur	Pemali
14	Pantai Rebo	Sungailiat
15	Pantai Tuing	Riau Silip
16	Gunung Maras	Riau Silip
17	Hutan Nyato Kimak	Pemali
18	Pantai Tongachi	Sungailiat
19	Eco Park	Pemali
20	Pantai Tikus Emas	Sungailiat
21	Pantai Temberan	Sungailiat



22	Pantai Takari	Sungailiat
23	Pantai Mangkalok	Sungailiat
24	Bukit Tujuh Sempan	Pemali
25	Bukit Pilar Matras	Sungailiat
26	Celosia Garden Ake	Sungailiat
27	Telaga Emas Bersinar	Sungailiat
28	Pantai Cemara	Sungailiat
29	Konservasi Biodiversity Sungai Upang	Puding Besar
30	Aik Lelap Bedelew	Belinyu

Sumber : Dinparbudaya Kabupaten Bangka, 2020

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka kondisi masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.58
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S.D 2019 TERHADAP KONDISI AKHIR (%)
1.	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	12,79	17,91	1,32	16,69	7,91

Dari data di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator peningkatan kunjungan wisatawan mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 dan 2019 yakni dari 12,79 persen pada tahun 2018, meningkat 17,91 persen di tahun 2019 tetapi menurun tajam di tahun 2020 yang hanya mencapai 1,32 persen. Apabila



dibandingkan capaian tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD maka baru mencapai 7,91 persen dari target yang harus dicapai pada tahun 2023.

Rendahnya pencapaian sasaran Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata Berbasis Sport Tourism, Kearifan dan Budaya Lokal serta Sumber Daya Alam Pariwisata dengan indikator peningkatan kunjungan wisatawan terjadi karena beberapa permasalahan dan langkah-langkah yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan antara lain :

Tabel 3.59
Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
- Pandemi Covid-19 sangat memukul sektor pariwisata	- Inovasi layanan pariwisata yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat
- Investasi di sektor pariwisata masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi wisata daerah yang dapat digali, direvitalisasi dan diaktualisasi termasuk budaya daerah	- Melakukan promosi wisata daerah secara intensif baik melalui pendekatan teknologi informasi maupun pendekatan tradisional (pameran, expo, dsb) - Melakukan pola kerjasama dengan pihak terkait terutama terkait event pariwisata tahunan yang berskala internasional (triathlon) sehingga lebih berdampak luas
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga objek – objek wisata daerah	- Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan keterampilan/kerajinan, pegelaran seni budaya daerah sebagai representasi daya saing lokal
- Pengembangan produk – produk UKM sebagai cinderamata khas daerah masih sangat terbatas	- Mendorong pengembangan produk –produk UKM berbasis kepariwisataan

Selain itu, sebagai bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka, mulai tahun 2018 pemerintah daerah telah mengusulkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)



Pariwisata Sungailiat berlokasi di Kawasan Pantai Timur Sungailiat dengan luas kurang lebih 600 ha dari 948,23 ha luas potensi pariwisata Kabupaten Bangka dan telah mendapat persetujuan dari Dewan KEK Nasional. Pada kawasan ini akan dibangun *golf resort, leisure and entertainment, cultural resort, wellness resort, dan tourism village* seperti disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 3.1
Peta KEK Pariwisata Sungailiat Kabupaten Bangka



1. International Golf Course
2. 5 Star Golf Resort & Marina
3. Cultural Complex & Museum
4. Desa Wisata
5. Agrotourism & Resort
6. 3 – 4 Star Family Resort (Tj. Pesona)
7. Motocross & Outbound
8. Promenade, Commercial, Town Center
9. 2,5 – 3 Star Hotel
10. Religion Cultural Center
11. Wellness Resort
12. Town Center
13. Outdoor Activities Park
14. 5 Star Villas/Boutique Resort
15. Fishermen's Village
16. Natural Landscape

Pencapaian sasaran Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata Berbasis Sport Tourism, Kearifan dan Budaya Lokal serta Sumber Daya Alam Pariwisata tidak terlepas dari adanya 12 (dua belas) program utama pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terutama pada:

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Program Pengembangan Pariwisata;
5. Program Pengembangan Kemitraan;
6. Program Pengembangan Nilai Budaya;



7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
9. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
10. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
11. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; dan
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata Berbasis *Sport Tourism*, Kearifan dan Budaya Lokal serta Sumber Daya Alam Pariwisata” diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.60
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Tingkat Efektifitas (%)	Kriteria
2020	88,68	80,53	110,11	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan indikator utama dapat dicapai sebesar 88,68 persen dengan



realisasi keuangan sasaran hanya sebesar 80,53 persen sehingga tingkat efektifitas terhadap pencapaian sasaran justru sebesar 110,11 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat digambarkan pada tabel berikut :



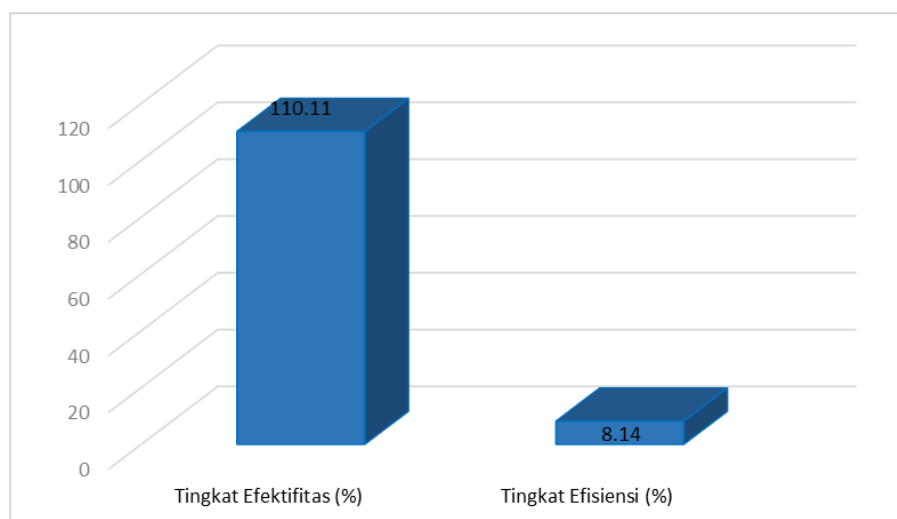
Tabel 3.61
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2020	88,68	4.377.974.550,00	3.525.783.229,30	80,53	8,14

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka (un audited), 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.377.974.550,00 dengan realisasi belanja mencapai hanya Rp. 3.525.783.229,30 atau sebesar 80,53 persen. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 8,14 persen.

Grafik 3.18
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian
Sasaran “Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata Berbasis Sport
Tourism, Kearifan dan Budaya Lokal serta Sumber Daya Alam Pariwisata”
Tahun 2020





11. Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto



Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran ini diukur

dengan indikator persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB. Pada tahun 2020, kinerja atas sasaran ini ditetapkan sebesar 19,49 persen dan dapat direalisasikan sebesar 21,79 persen dengan capaian kinerja sebesar 107,88 persen atau telah mencapai target yang ditetapkan (Tabel 3.62).

Tabel 3.62
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian
Terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	19,79	21,35	107,88	T
Rata-rata Capaian					107,88	T

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2021



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor pertanian dan pengolahan masih menjadi *prime mover* penggerak ekonomi Kabupaten Bangka. Sektor pertanian merupakan salah satu komoditas strategis yang memegang peranan yang relatif besar dalam perekonomian, khususnya komoditas perkebunan dan perikanan. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, kontribusi sektor pertanian mampu menduduki peringkat kedua dari seluruh sektor ekonomi dengan share berfluktuasi dari sebesar 19,46 tahun 2019 menjadi 21,53 tahun 2020 persen dari seluruh total PDRB Kabupaten Bangka. Sementara itu, sektor industri pengolahan juga memiliki kontribusi terbesar terhadap share PDRB sejak tahun 2015 sektor ini memiliki kontribusi sebesar 22,59 persen dan pada tahun 2020 sebesar 21,56 persen. Tiga sektor lainnya yang memiliki share terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2020 adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, konstruksi dan sektor pertambangan dan penggalian serta masing-masing sebesar 13,02 persen, 10,18 persen dan 9,47 persen (lihat Tabel 3.63),.



Tabel 3.63
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Bangka Tahun 2015-2020

NO	INDIKATOR SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21,44	21,70	20,37	19,48	19,46	21,53
2.	Pertambangan dan Penggalian	13,30	12,54	12,43	11,17	9,94	9,47
3.	Industri Pengolahan	22,59	21,87	22,37	22,29	21,23	21,56
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,22	0,25	0,26	0,25	0,26
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02



NO	INDIKATOR SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.	Konstruksi	8,77	8,90	9,29	9,81	10,73	10,18
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,32	12,88	13,33	13,95	14,17	13,02
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,23	2,26	2,28	2,37	2,54	2,30
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,40	2,51	2,51	2,65	2,95	2,89
10.	Informasi dan Komunikasi	1,78	1,82	1,85	1,98	2,14	2,44
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,75	2,79	2,75	2,86	2,89	2,57
12.	Real Estate	3,37	3,34	3,33	3,58	3,64	3,71
13.	Jasa Perusahaan	0,24	0,24	0,24	0,26	0,27	0,24
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,98	5,08	5,14	5,29	5,44	5,49
15.	Jasa Pendidikan	2,05	2,18	2,17	2,27	2,38	2,42
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,94	0,95	0,95	0,99	1,08	1,08
17.	Jasa Lainnya	0,64	0,70	0,72	0,77	0,87	0,82
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2021

Penyokong utama kontribusi sektor pertanian dalam PDRB adalah sub kategori tanaman perkebunan dan perikanan. Tanaman perkebunan sebagai sub kategori yang memiliki kontribusi terbesar dalam sektor pertanian memiliki komoditi unggulan antara lain kelapa sawit, lada dan karet. Ketiga komoditas unggulan perkebunan ini mengalami produksi yang fluktuasi selama empat tahun terakhir. Produksi kelapa



sawit pada tahun 2016 sebesar 66.940 ton dan turun menjadi sebesar 38.551 ton pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 kembali bergerak meningkat menjadi 39.067 ton serta kembali meningkat signifikan menjadi 88,921.00 pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan karena terjadinya peningkatan luasan lahan dan insentif harga di pasar yang mendorong minat petani Sawit. Sementara itu, untuk produksi lada pada tahun 2016 sebesar 5.853 ton, turun menjadi sebesar 4.260 ton pada tahun 2018 dan naik menjadi 4.479 ton pada tahun 2019. Jumlah produksi lada pada tahun 2020 menurun menjadi 3.121 ton disebabkan penurunan luas panen lada serta karena jatuhnya harga lada di pasar dunia yang menyebabkan rendahnya minat petani berkebun lada. Demikian halnya dengan produksi karet pada tahun 2016 adalah sebesar 43.399 ton, turun menjadi 22.672 ton pada tahun 2018 dan kembali bergerak naik signifikan menjadi 51.227 ton pada tahun 2019. Pada tahun 2020, produksi karet kembali mengalami penurunan menjadi 50,236,11 ton. Secara detail perkembangan produksi komoditi perkebunan di Kabupaten Bangka dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.64
Pertumbuhan Luas Panen dan Produksi Sub Sektor
Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Panen Lada (Ha)	4.931,44	5.989,53	6.036,00	6.036,00	5,182.83
Luas Panen Karet (Ha)	29.235,94	32.110,07	24.447,57	22.441,97	21,854.62
Luas Panen Kelapa Sawit (Ha)	15.615,00	21.547,73	10.911,42	11.206,,42	12,744.12
Luas Panen Ketela Pohon/Ubi Kayu				1 848,50	2 158,10
Jumlah Produksi Lada (Ton)	5.853,40	5.927,85	4.260,00	4.479,00	3,121.50
Jumlah Produksi Karet (Ton)	43.398,52	41.412,77	22,672,00	51.277,00	50,236.11
Jumlah Produksi Kelapa Sawit (Ton)	66.940	83.548	28.568	39.067	88,921.00
Jumlah Produksi Ketela/Ubi Kayu				26 707,50	44 557,70

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2021

Sementara itu, kinerja tanaman pangan padi sebagai makanan pokok masyarakat selama periode 2016 - 2020 menunjukkan kecenderungan yang positif jika dilihat dari



luas panen dan produksinya. Pada tahun 2016, produksi padi sawah di Kabupaten Bangka sebesar 3.009 ton, meningkat menjadi 5.758 ton pada tahun 2018. Sama halnya dengan padi sawah, luas panen dan produksi padi ladang selama kurun waktu tersebut juga mengalami peningkatan. Luas panen padi ladang pada tahun 2016 adalah sebesar 2.814 ha, naik menjadi 3.480 ha pada tahun 2018. Begitu pula dengan hasil produksinya yang mengalami peningkatan dari 4.784 ton pada tahun 2016 menjadi 6.263 ton pada tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 6.845 ton pada tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 7.022,25 ton (lihat Tabel 3.65).

Tabel 3.65
Pertumbuhan Luas Panen dan Produksi Sub Sektor
Tanaman Pangan Kabupaten Bangka
Tahun 2016-2019

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Panen Padi Sawah (Ha)	771,50	1.382,00	1.286,70	1.286,70	2.047,38
Luas Panen Padi Ladang (Ha)	2.814,00	3.724,00	3.479,50	4.026,50	4.032,00
Luas Panen Padi (Ha)	3.585,00	5.106,00	4.776,20	4.859,20	6.079,38
Produksi Padi Sawah (Ton)	3.008,85	5.389,80	5.758,00	3.247,50	8.196,53
Produksi Padi Ladang (Ton)	4.783,30	6.283,20	6.263,10	6.845,00	7.022,25
Produksi Padi (Ton)	7.792,15	11.673,00	11.989,10	10.092,50	14.977,38

Kinerja produksi maupun produktifitas sektor pertanian yang cenderung positif dari tahun 2019 ke tahun 2020 telah mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka pada tahun 2020. Kondisi ini linearitas dengan kontribusi sektor pertanian yang memiliki pertumbuhan share terbesar pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,07 persen. Pertumbuhan share terbesar lainnya pada tahun 2019 ke 2020 adalah sektor industri pengolahan dan sektor komunikasi dan informasi masing-masing sebesar 0,33 persen dan 0,30 persen.

Sementara itu untuk sektor perikanan, nilai produksi perikanan kabupaten Bangka cenderung tumbuh ke arah positif. Nilai produksi perikanan tangkap meningkat dari Rp. 589.270.000.000 pada tahun 2016 menjadi Rp. 832.195.942.710 pada tahun 2019. Demikian pula halnya dengan nilai produksi budidaya perikanan, meningkat dari Rp.



24.561.298.000 pada tahun 2016 menjadi Rp. 234,509,161,100 pada tahun 2020. Secara detail perkembangan produksi dan nilai produksi sektor perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.66
Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi
Sektor Perikanan Kabupaten Bangka
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	26.785,55	26.785,55	26.017,05	26.346,51	27,110.51
Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Ribu Rupiah)	589.270.000	615.558.725	715.468.875	832.195.942,71	1,068,306,297,750.01
Jumlah Produksi Budidaya Ikan (Ton)	517,77	783,27	1.170,60	2.125,49	3,455.52
Nilai Produksi Budidaya Ikan (Ribu Rupiah)	24.561.298	36.628.927	79.430.268	124.578.722,44	234,509,161,100

Tabel 3.67
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Terhadap
Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S/D TAHUN 2020 TERHADAP KONDISI AKHIR (%)
1.	persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	19,46	21,35	22,10	96,60



Membandingkan capaian indikator atas sasaran meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah tahun 2020 dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Bangka sebagaimana tertera pada Tabel 3.63, terlihat bahwa capaian indikator pada tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 walaupun tidak begitu signifikan. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah RPJMD, maka capaian tahun 2019 telah mencapai 96,60 persen dari target yang ditetapkan.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi terkait pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah dan Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi antara lain, yaitu :

Tabel 3.68
Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
- Penurunan produktivitas beberapa komoditas pada sektor pertanian, perkebunan terutama karet dan lada.	- Intensifikasi, ekstensifikasi dan penguatan teknologi budidaya untuk komoditas strategis daerah (lada, karet, dan ubi casesa).
- Penurunan beberapa harga komoditas pertanian khususnya sub sektor perkebunan yang mengikuti harga dunia (lada dan karet)	- Memperbaiki tata niaga pertanian dalam rangka mengoptimalkan pasar domestik dan memperkuat daya saing produk pertanian

Terdapat 13 (tiga belas) program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
- 3) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- 4) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- 5) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- 6) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak



- 7) Program peningkatan produksi hasil peternakan
- 8) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan
- 9) Program pengembangan budidaya perikanan
- 10) Program pengembangan perikanan tangkap
- 11) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
- 12) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 13) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Kehutanan

Mengingat capaian kinerja atas sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan, maka tidak terdapat efektifitas dan efesiensi program-program dalam pencapaian sasaran.

12. Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat



Peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bangka diukur dari pencapaian indikator sasaran peningkatan PDRB perkapita. Pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu.

Pendapatan perkapita indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah dan standar pertumbuhan kemakmuran sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi sekaligus pembandingan tingkat kemakmuran.

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut :



Tabel 3.69
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Tahun 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Peningkatan PDRB Perkapita	%	-0,69	-0,67	102,90	TT
Rata- Rata Capaian					102,90	TT

Tabel 3.69 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari indikator peningkatan PDRB perkapita belum mencapai sasaran yang ditargetkan. Peningkatan PDRB perkapita pada tahun 2020 ditargetkan sebesar -0,69 persen dan hanya terealisasi sebesar -0,67 persen atau terealisasi 102,90 persen.

Dalam periode 2015-2020, perekonomian Kabupaten Bangka cenderung terus membaik. Hal ini diindikasikan capaian PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang terus meningkat. Data lengkap perbaikan perekonomian dalam enam tahun terakhir tersebut tersaji pada table berikut.

Tabel 3.70
PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan
Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2020

Tahun	PDRB Per Kapita (Ribu Rp)	Pertumbuhan (%)
2015	35.365	5,83
2016	37.049	4,76
2017	39.493	6,60
2018	42.013	6,38
2019	42,180	4,77
2020	40,55	1,24
Rataan	33.36	4,93

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2020

Pertumbuhan positif dari PDRB perkapita mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat di Kabupaten Bangka semakin baik. Berdasarkan metode terbaru, PDRB perkapita Kabupaten Bangka pada tahun 2020 adalah sebesar 40,55 juta rupiah dengan laju pertumbuhan sebesar 1,24 persen dari 42,180 juta rupiah pada tahun



2019. Selama periode 2015-2020, PDRB perkapita Kabupaten Bangka mengalami pertumbuhan rata-rata 4,93 persen.

Tabel 3.71
Koefisien Disparitas Pendapatan
Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2020

<i>Tahun</i>	<i>Indeks Williamson</i>	<i>Indeks Gini</i>	<i>Keterangan</i>
2015	0,198	0,259	Relatif Rendah
2016	0,191	0,282	Relatif Rendah
2017	0,190	0,274	Relatif Rendah
2018	0,193	0,278	Relatif Rendah
2019	0,189	0,269	Relatif Rendah
2020	-	0,262	Relatif Rendah

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2021

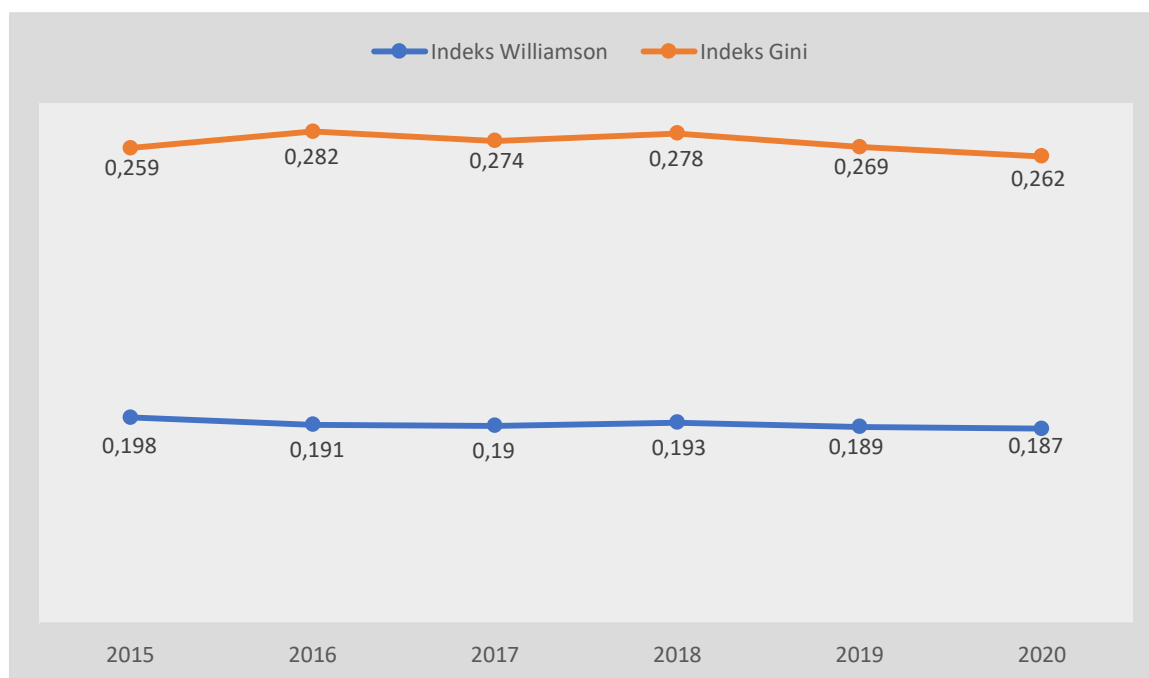
Tabel 3.71 menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bangka selama kurun waktu 2015 – 2020 menunjukkan trend yang fluktuatif berada dalam kisaran antara 0,259 hingga 0,282 yang secara umum dapat diklasifikasikan mempunyai ketimpangan yang relatif rendah. Pada tahun 2015 dan 2016 Indeks Gini meningkat dari 0,259 menjadi 0,282 pada tahun 2019. Indeks Gini mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 0,274 dan meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 0,278 serta mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi 0,269. Nilai Indeks Gini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 0,262. Jika diklasifikasi Indeks Gini Kabupaten Bangka selama periode 2015-2020 tergolong dalam klasifikasi sangat rendah. Ini berarti Pemerintah Kabupaten Bangka telah berhasil menciptakan pemerataan pendapatan bagi masyarakat.

Indeks Williamson selama periode 2015-2020 juga cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Indeks Williamson selama periode tersebut terjadi peningkatan hanya pada tahun 2018 dari nilai 0,190 pada tahun 2017 meningkat menjadi 0,193 pada tahun 2018. Pada tahun 2015 Indeks Williamson sebesar 0,198 dan terus mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing menjadi 0,189 dan 0,187. Capaian angka Indeks Williamson ini menunjukkan telah terjadi pemerataan



pendapatan antara wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka selama periode tersebut.

Grafik 3.19
Koefisien Disparitas Pendapatan dan Pemerataan Wilayah
Kabupaten Bangka Tahun 2015– 2020



Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2021

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, target jangka menengah maka kondisi masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.72
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S.D 2020 TERHADAP KONDISI AKHIR (%)
1.	Peningkatan PDRB Perkapita	1,45	1,45	-0,67	2,15	-3,21



Tabel 3.68 menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap indikator sasaran peningkatan PDRB Perkapita dalam periode 2019-2020. Pada tahun 2019 capaian peningkatan PDRB perkapita sebesar 1,45 dan menurun menjadi -0,67 persen pada tahun 2020. Sementara dilihat dari target tingkat capaian pada tahun 2020 terhadap jangka menengah telah mencapai -3,21.

Beberapa program Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka mencapai sasaran peningkatan PDRB Perkapita adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh pertumbuhan pada hampir seluruh subsektor utama dan pertumbuhan pada konsumsi rumah tangga dan ekspor serta belanja pemerintah daerah;
2. Peningkatan alokasi dana proyek infrastruktur yang mendorong meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat;
3. Investasi swasta yang semakin meningkat terutama terkait *core sektor* perekonomian daerah.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, antara lain :



Tabel 3.73
Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
Pandemi covid 19 yang menyebabkan terkontrksinya beberapa sektor unggulan daerah seperti pariwisata, transportasi, pertambangan dan penggalian, dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian stimulus ekonomi sektor unggulan daerah ▪ Refocussing dan realokasi anggaran ▪ Pemberian Insentif dan relaksasi Pajak dan Retribusi ▪ Perlindungan sosial

Pandemi Covid 19 telah berdampak baik pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi. Beberapa sektor unggulan daerah yang terdampak adalah sektor pariwisata dan sektor pendukungnya seperti UMKM, industri perhotelan, makan minum dan transportasi. Kondisi ini juga mempengaruhi kegiatan investasi di Kabupaten Bangka di tengah tidak kondusifnya perekonomian nasional dan global. Terkontraksinya beberapa sektor unggulan daerah sangat berpengaruh terhadap kontraksi PDRB per kapita Kabupaten Bangka. Namun, jika dilihat kontraksi tersebut tidak cukup dalam disebabkan peran sektor pertanian sebagai **supporting sector** (sektor penyangga) dalam perekonomian Kabupaten Bangka.

Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan langkah–langkah yang luar biasa termasuk di bidang perpajakan dalam penanganan Covid-19 sekaligus akselerasi pemulihan sosial-ekonomi. Pemerintah memberikan dukungan baik untuk dukungan kesehatan, *social safety net*, maupun dunia usaha termasuk UMKM. Dukungan kesehatan dilakukan terutama melalui dukungan anggaran kesehatan, penyediaan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan gratis tes rapid antigen dalam penanganan Covid-19. Dalam rangka memberikan dukungan terhadap dunia usaha, insentif perpajakan diberikan baik melalui insentif dan relaksasi pajak serta retribusi bagi masyarakat dan pelaku usaha.



13. Sasaran : Menurunnya Angka Kemiskinan



Di tengah kecemasan meningkatnya angka kemiskinan sebagai dampak Covid 19 ternyata angka kemiskinan di Kabupaten Bangka tidak terjadi kenaikan bahkan mengalami penurunan signifikan. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bangka diarahkan pada pencapaian indikator sasaran yang

mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Bangka berupa angka kemiskinan, penduduk di atas garis kemiskinan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka .

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari angka absolut. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan namun juga mencakup kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin serta keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka.

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.74
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Tahun 2020

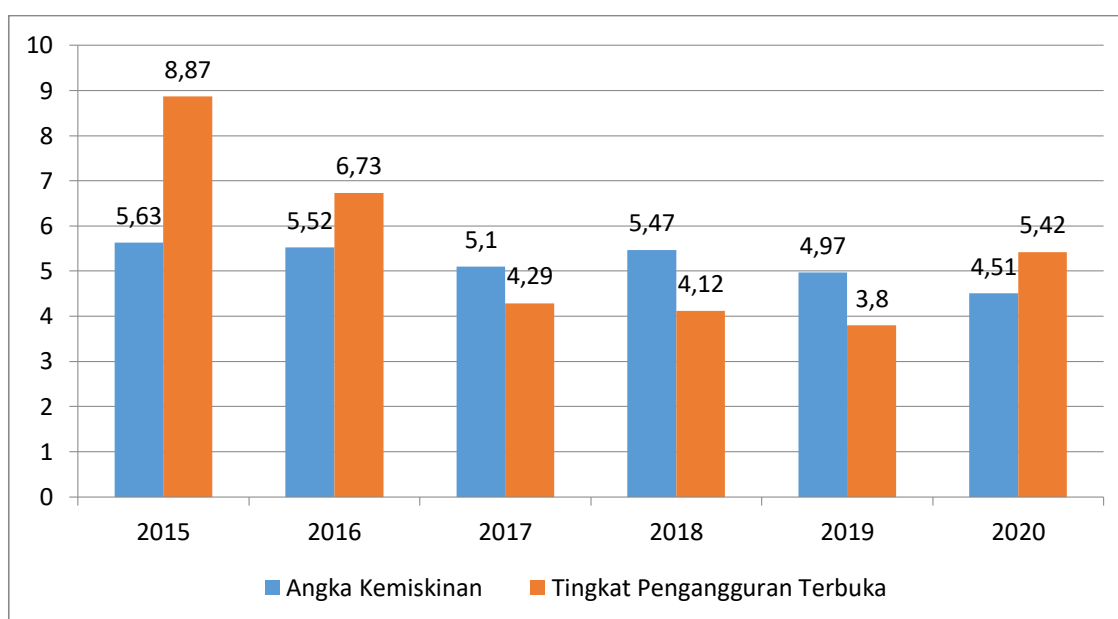
NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Persentase Angka Kemiskinan	%	4,99	4,51	109,62	MT
2.	Angka Pengangguran Terbuka	%	5,43	5,42	100,18	MT
Rata- Rata Capaian					104,90	MT

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka 2015-2021 (Data Diolah)



Berdasarkan pengukuran tingkat capaian sasaran melalui indikator-indikator sebagaimana tertera pada tabel diatas diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran adalah 104,90 persen yang berarti kinerja sasaran melebihi target. Persentase angka kemiskinan pada tahun 2020 mencapai 109,62 persen dan angka pengangguran terbuka mencapai 100,18 persen.

Grafik 3.20
Perkembangan Angka Kemiskinan
di Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka 2015-2021 (Data Diolah)



Secara detail, tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Bangka selama periode 2015 – 2020 mempunyai trend yang fluktuatif. Pada tahun 2015 angka kemiskinan mencapai 5,63 persen, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 5,52 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 5,10 persen, dan meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 5,47 persen serta kembali menurun menjadi 4,97 persen pada tahun 2019. Fluktuasi angka kemiskinan ternyata diikuti tingkat pengangguran terbuka pada terus menurun pada tahun 2015-2019. Angka pengangguraan terbuka pada tahun 2015 sebesar 8,87



persen menjadi 3,80 persen pada tahun 2019. Angka kemiskinan di Kabupaten Bangka pada masa Covid 19 mengalami penurunan menjadi 4,51 persen. Penurunan angka kemiskinan selama periode 2015-2020 ternyata tidak diiringi dengan penurunan angka pengangguran secara linearitas pada periode yang sama.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka kondisi masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada table berikut :

Tabel 3.75
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S.D 2020 TERHADAP KONDISI AKHIR (%)
1.	Persentase Angka Kemiskinan	%	4,97	4,51	4,82	106,88
2.	Angka Pengangguran Terbuka	%	3,80	5,42	3,96	73,06

Dibandingkan dengan tahun 2019 capain indikator sasaran ini menunjukkan kinerja yang positif di mana angka kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 4,97 persen dan mengalami penurunan menjadi 4,51 persen pada tahun 2020. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh faktor intervensi pemerintah daerah serta dorongan oleh pemerintah pusat dalam menciptakan kebijakan yang tepat dalam upaya mendorong pengentasan kemiskinan di daerah melalui dana bantuan sosial bagi masyarakat di masa pandemic covid 19. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target jangka menengah maka capaian indikator sasaran baru sebesar 96,89 persen atau kurang 0,31 persen dari target kinerja yang harus direalisasikan pada tahun 2023. Sedangkan angka pengangguran terbuka mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 dengan angka 3,80 dan mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 5,42.



Faktor-faktor yang mendorong pencapaian kinerja sasaran menurunnya angka kemiskinan adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas program stimulus ekonomi sektor unggulan daerah
2. Efektifitas penguatan kebijakan bidang perlindungan sosial melalui bantuan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan;
3. Pengalokasian bantuan subsidi dan relaksasi pajak dan retribusi daerah bagi masyarakat terdampak Covid 19;
4. Meningkatnya alokasi dan efektivitas pengelolaan dana desa dalam penanganan covid 19 melalui program padat karya;
5. Kebijakan penggunaan Dana Alokasi Desa bagi program padat karya.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dan Upaya Pemecahan Masalah dalam menurunkan angka kemiskinan :

Tabel 3.76
Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
<p>Pandemi Covid-19 berdampak pada ekonomi masyarakat dan lapangan pekerjaan yang menyebabkan pelambatan pengeluaran konsumsi rumah tangga, terpuruknya sektor unggulan daerah seperti sektor pariwisata dan UMKM</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan bantuan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan ▪ Pemulihan ekonomi sektor unggulan daerah ▪ Pemberian insentif dan relaksasi pajak dan retribusi terhadap berbagai sektor terdampak seperti sektor pariwisata dan UMKM



Adanya 14 (empat belas) program yang mendukung pencapaian indikator sasaran yaitu:

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
2. Peningkatan Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
3. Program Pemberdayaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
5. Program Penanganan, Penanggulangan dan Rekonstruksi Bencana;
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
7. Program Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna
8. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
10. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi dan
11. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
12. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
13. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
14. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri



Untuk mengukur efektivitas capaian kinerja sasaran “menurunnya angka kemiskinan” diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.77
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

<i>Tahun</i>	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Tingkat Efektifitas (%)	Kriteria
2020	109,62	84,99	114.29	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 3.77, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan indikator utama dapat dicapai sebesar 109,62 persen dengan realisasi keuangan sasaran hanya sebesar 84,99 persen sehingga tingkat efektifitas terhadap pencapaian sasaran sebesar 114,29 persen dengan kriteria keberhasilan Sangat Tinggi atau dengan kata lain Sangat Efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.78
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

<i>Tahun</i>	<i>Realisasi Kinerja Sasaran (%)</i>	<i>Target Anggaran Sasaran (Rp)</i>	<i>Realisasi Anggaran Sasaran (Rp)</i>	<i>Realisasi Belanja Sasaran (%)</i>	<i>Efisiensi (%)</i>
2020	109,62	165,657,800.00	140,799,931.00	84.99	13.12

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka (un audited), 2021



Berdasarkan tabel diatas, bahwa target belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar Rp. 165,657,800.00 dengan realisasi belanja mencapai Rp. 140,799,931.00 atau sebesar 84,99 persen. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,12 persen.

14. Sasaran : Meningkatnya Peran Serta Desa Dalam Mendorong Perekonomian Daerah

Pemerataan ekonomi yang berkeadilan menjadi komitmen pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pembangunan ekonomi desa. Pembangunan ekonomi desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia di desa, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi perdesaan diarahkan untuk penguatan desa dan pemberdayaan potensi masyarakat, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Keberhasilan desa dalam mendorong perekonomian daerah dapat dilihat dari peningkatan klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangan desa tersebut. Klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan yaitu : (1) Desa Swadaya; (2) Desa Swakarsa; dan (3) Desa Swasembada sebagai klasifikasi paling tinggi.

Indikator sasaran “Meningkatnya Peran Serta Desa Dalam Mendorong Perekonomian Daerah” yaitu persentase desa swasembada. Target dan realisasi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:



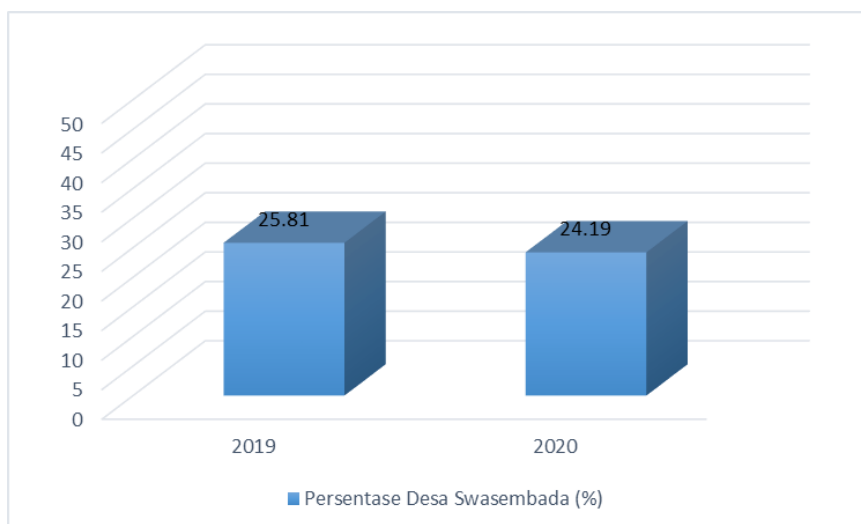
Tabel 3.79
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Tahun 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Persentase Desa Swasembada	%	25,81	24,19	93,75	TT
Rata - Rata Capaian					93,75	TT

Berdasarkan tabel di atas, indikator sasaran “**Persentase Desa Swasembada**” yang menunjang pencapaian sasaran “**Meningkatnya Peran Serta Desa Dalam Mendorong Perekonomian Daerah**” pada tahun 2020 dengan rata-rata capaian **93,75 persen** yang berarti kinerja sasaran termasuk dalam **Kategori Tidak Tercapai**.

Tingkat capaian indikator sasaran **Persentase Desa Swasembada** pada tahun 2020 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu pada tahun 2020 sebesar 24,19 sedangkan pada tahun 2019 sebesar 25,81 persen atau menurun sebesar 0,62%. Capaian indikator persentase desa swasembada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:

Grafik 3.21
Persentase Desa Swasembada Tahun 2019 - 2020





Desa swasembada pada tahun 2019 terdapat 16 desa swasembada yaitu Desa Air Duren, Desa Balunijuk, Desa Jada Bahrin, Desa Pagarawan, Desa Kayu Besi, Desa Pemali, Desa Sempan, Desa Tiang Tara, Desa Bakam, Desa Mangka, Desa Bukit Layang, Desa Gunung Muda, Desa Gunung Pelawan, Desa Pangkal Niur, Desa Deniang dan Desa Silip. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah desa swasembada mengalami penurunan menjadi 15 desa swasembada dari 62 desa yang ada di Kabupaten Bangka yaitu Desa Air Duren, Desa Balunijuk, Desa Jada Bahrin, Desa Pagarawan, Desa Kayu Besi, Desa Pemali, Desa Karya Makmur, Desa Sempan, Desa Tiang Tara, Desa Bakam, Desa Bukit Layang, Desa Gunung Muda, Desa Banyuasin, Desa Deniang dan Desa Silip. Tingkat perkembangan klasifikasi desa di Kabupaten Bangka dari tahun 2017 - 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.80
Klasifikasi Desa Berdasarkan Pekembangannya
Di Kabupaten Bangka
Tahun 2017 - 2020

Klasifikasi Desa	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Swasembada	10	15	16	15
Swadaya	20	7	46	13
Swakarya	32	40	0	34
Jumlah Desa	62	62	62	62

Klasifikasi desa swasembada diberikan kepada desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Klasifikasi desa yang sudah berstatus swasembada mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan desa setiap tahun yang diukur dari laju kecepatan perkembangan : (1) ekonomi masyarakat; (2) pendidikan masyarakat; (3) kesehatan masyarakat; (4) keamanan dan ketertiban; (5) kedaulatan politik masyarakat; (6) peran serta masyarakat dalam pembangunan; (7) lembaga kemasyarakatan; (8) kinerja pemerintahan desa dan kelurahan; dan (10) pembinaan dan pengawasan.



Menurunnya persentase klasifikasi desa swasembada ini merupakan dampak dari pandemi covid-19, dimana dampak dari pandemi ini sangat memukul sektor ekonomi masyarakat dan kesehatan masyarakat. Namun perekonomian masyarakat di desa pada tahun 2020 ini masih sangat terbantu oleh pemerintah pusat dengan memberikan alokasi dana desa untuk mengembangkan perekonomian dari daerah pinggiran atau desa. Alokasi dana desa di Kabupaten Bangka dari Tahun 2017-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.81
Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Bangka
Tahun 2017 - 2020

No	Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa (Rp)			
			2017	2018	2019	2020
1.	Sungailiat	Rebo	838.868.000	813.512.000	919.385.000	906.298.000
2.	Belinyu	Gunung Muda	1.002.910.000	1.043.421.500	889.664.000	1.195.618.000
3.		Gunung Pelawan	937.412.000	901.031.500	1.003.848.000	1.062.849.000
4.		Riding Panjang	924.710.500	1.148.316.000	1.094.613.000	1.107.718.000
5.		Lumut	852.548.000	774.953.500	838.439.500	828.212.000
6.		Bintet	870.036.000	849.589.000	937.290.500	932.428.000
7.	Merawang	Batu Rusa	825.809.000	727.786.000	802.968.000	786.257.000
8.		Balunujuk	817.265.500	818.975.000	965.385.000	968.883000
9.		Riding Panjang	825.260.000	772.835.000	865.452.500	854.684.000
10.		Jurung	811.276.000	743.682.500	819.961.500	814.594.000
11.		Kimak	837.296.000	829.749.000	886.096.500	908.916.000
12.		Pagarawan	843.084.000	812.378.500	927.311.500	1.028.129.000
13.		Merawang	800.810.000	747.347.500	977.436.500	859.963.000
14.		Air Anyir	802.935.000	743.444.000	885.916.000	906.515.000
15.		Dwi Makmur	752.767.000	674.249.000	759.435.000	772.726.000
16.		Jada Bahrin	824.491.000	804.642.000	951.196.000	840.642.000



No	Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa (Rp)				
			2017	2018	2019	2020	
17.	Mendo Barat	Petaling	813.928.500	809.555.500	927.151.500	1.099.134.000	
18.		Penagan	877.006.000	912.881.000	1.478.682.500	1.360.226.000	
19.		Zed	895.328.500	1.089.629.000	1.209.689.000	1.299.739.000	
20.		Mendo	832.857.000	1.030.642.500	1.119.672.000	1.217.587.000	
21.		Paya Benua	829.239.000	926.670.000	1.244.823.500	1.261.579.000	
22.		Cengkong Abang	809.110.000	845.751.000	1.129.982.500	1.224.992.000	
23.		Kace	876.213.000	1.092.360.500	1.205.813.500	1.298.416.000	
24.		Kemuja	940.947.000	934.293.500	1.116.813.500	1.175.289.000	
25.		Air Duren	794.377.000	730.577.000	819.695.500	831.109.000	
26.		Kota Kapur	822.408.000	877.294.000	1.102.844.000	1.271.261.000	
27.		Air Buluh	795.211.500	757.129.000	911.144.000	1.921.180.000	
28.		Rukam	788.751.000	763.091.500	945.571.000	1.092.918.000	
29.		Labuh Air Pandan	796.669.000	779.916.500	937.670.500	926.315.000	
30.		Kace Timur	827.511.000	750.207.500	818.110.000	835.921.000	
31.		Petaling Banjar	807.096.500	768.961.000	890.010.500	878.831.000	
32.		Pemali	Air Ruai	903.451.500	802.692.000	845.699.500	858.907.000
33.			Air Duren	846.005.000	746.515.000	817.715.000	812.898.000
34.			Penyamun	863.209.000	789.600.000	871.211.500	869.285.000
35.			Sempan	848.651.000	786.870.000	882.391.000	869.353.000
36.			Pemali	931.344.000	834.296.000	917.554.000	1.033.256.000
37.			Karya Makmur	955.159.500	794.977.500	825.729.500	826.345.000
38.		Bakam	Bakam	868.544.500	785.877.000	822.343.500	808.408.000
39.			Kapuk	778.137.000	768.679.000	986.462.500	995.886.000
40.			Dalil	800.273.000	812.049.500	1.015.614.000	1.027.097.000
41.			Neknang	784.410.000	793.263.000	973.700.500	975.764.000



No	Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa (Rp)			
			2017	2018	2019	2020
42.		Tiang Tara	810.770.000	805.280.500	961.643.000	1.124.308.000
43.		Mangka	810.588.000	769.351.000	844.001.500	844.514.000
44.		Mabat	849.474.000	838.051.000	944.043.500	952.046.000
45.		Bukit Layang	853.991.500	951.073.000	855.692.000	1.084.226.000
46.		Maras Senang	805.570.000	706.287.500	782.090.500	777.672.000
47.	Riau Silip	Riau	826.361.000	782.760.500	892.014.500	866.464.000
48.		Pangkal Niur	814.249.000	800.573.500	962.398.000	984.893.000
49.		Pugul	834.803.000	831.039.500	988.320.500	1.070.523.000
50.		Cit	883.778.000	876.673.500	999.545.500	1.070.720.000
51.		Deniang	812.858.500	828.745.500	968.200.000	1.005.929.000
52.		Silip	835.111.000	818.488.500	910.879.500	844.419.000
53.		Mapur	827.425.000	813.331.500	934.106.000	969.128.000
54.		Banyu Asin	788.524.500	787.801.000	966.991.500	1.013.247.000
55.		Berbura	829.847.500	808.599.500	891.059.000	1.081.925.000
56.		Puding Besar	Puding Besar	817.820.000	927.964.500	1.024.018.500
57.	Labu		833.600.000	1.076.985.500	1.442.190.500	1.302.748.000
58.	Nibung		810.846.000	883.881.500	1.207.189.000	1.238.131.000
59.	Tanah Bawah		808.775.000	780.391.000	912.217.000	883.428.000
60.	Saing		810.380.000	789.802.000	901.309.000	905.919.000
61.	Kota Waringin		845.382.000	882.424.000	1.137.736.000	1.041.570.000
62.	Kayu Besi		791.878.000	769.793.000	855.455.000	852.766.000
TOTAL			51.955.343.000	51.718.989.000	59.701.593.000	61.490.333.000

Sumber : Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa, 2020

Anggaran dana desa yang diterima masing-masing desa dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, total anggaran dana desa di Kabupaten Bangka sebesar Rp. 51.955.343.000,-, tahun 2018 sebesar Rp.



51.718.989.000,-, tahun 2019 sebesar Rp. 59.701.593.000,- dan pada tahun 2020 sebesar 61.490.333.000 atau mengalami peningkatan Rp. 1.788.740.000,- atau meningkat 3,00 persen bila dibandingkan dengan tahun 2019. Peningkatan dana desa pada tahun 2020 ini lebih kecil bila dibandingkan dengan peningkatan dana desa dari tahun 2018 ke tahun 2019 yang mencapai Rp. 7.982.604.000,- atau meningkat sebesar 15,43 persen.

Berdasarkan Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, prioritas penggunaan dana desa untuk peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik. Namun, dengan terjadinya pandemi covid-19 yang menjadi bencana nasional non alam maka Permendes ini mengalami perubahan beberapa kali yang terakhir yaitu Permendes Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang memprioritaskan dana desa untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak covid-19.

Selain penggunaan dana desa untuk penanganan covid 19, Alokasi dana desa juga untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tetapi alokasi anggaran ini sangat berkurang dari tahun 2019 karena sebagian besar Alokasi anggaran dana desa untuk penanganan pandemi covid-19. Bermodalkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut, pemerintah desa membangun kemandirian ekonomi desa dengan berbagai langkah salah satunya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Daftar Bumdes di Kabupaten Bangka dan unit usahanya dapat dilihat pada table di bawah ini:



Tabel 3.82
Daftar Bumdes dan Unit Usaha Bumdes
Di Kabupaten Bangka
Tahun 2020

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	UNIT USAHA
1.	Bakam	Bukit Layang	Karya Bersama	Perdagangan ATK, Pupuk Bersubsidi, Perdagangan LPG, SPAM Desa, Sewa Perlengkapan Pesta, Dan Berkah Mart
		Mabat	Bermustera	Sewa Perlengkapan Pesta, Perdagangan LPG, Fotocopy dan ATK
		Mangka	Bukit Mangka Jaya	SPAM Desa dan Perdagangan Hasil Perkebunan
		Kapuk	Karya Maju	SPAM Desa, Penggilingan Padi, Perdagangan Hasil Perkebunan, Sewa Perlengkapan Pesta dan Berkah Mart
		Bakam	Akek Layau	Perdagangan Hasil Perkebunan, Sewa Perlengkapan Pesta dan Berkah Mart
		Neknang	Rentang Permai	SPAM Desa, Sewa Perlengkapan Pesta dan Penggilingan Padi
		Maras Senang	Besaoh	SPAM Desa, Sewa Perlengkapan Pesta,



NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	UNIT USAHA
				Penggilingan Padi, Perdagangan Hasil Perkebunan dan Berkah Mart
		Tiang Tarah	Cermin Jati	SPAM Desa, Sewa Perlengkapan Pesta dan Perdagangan Hasil Perkebunan
		Dalil	Andal Berdikari	Simpan Pinjam, Desa Wisata dan Jasa Brokering
2.	Puding Besar	Puding Besar	Gambir Jaya	Perdagangan LPG, Jasa Brokering, Sewa Perlengkapan Pesta, Sewa Kios dan Berkah Mart
		Labu	Laskar Kenaka Jaya	Simpan Pinjam, Perdagangan LPG, Perdagangan Hasil Perkebunan, Sewa Perlengkapan Pesta
		Tanah Bawah	Jaya Lestari	Perdagangan LPG, Perdagangan Hasil Perkebunan dan Kios Saprodi
		Saing	Berjaya	Sewa Perlengkapan Pesta
		Nibung	Bediri	Sewa Perlengkapan Pesta dan Usaha Perdagangan
		Kotawaringin	Beringin Berkah	Sewa Perlengkapan Pesta, Perdagangan Saprodi dan Perdagangan LPG



NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	UNIT USAHA
		Kayu Besi	M2G	SPAM Desa, Perdagangan Hasil Perkebunan dan Sewa Perlengkapan Pesta
3.	Riau Silip	Cit	Citra Panca	Sewa Perlengkapan Pesta, Pemasaran Hasil Perkebunan dan Berkah Mart
		Pangkal Niur	Maras Makmur	SPAM Desa, Sewa Perlengkapan Pesta, Cetak Batako dan Pemasaran Hasil UMKM
		Berbura	Tinjie Maras	Sewa perkakas Pesta, penggilingan padi, Jasa Parawisata dan Berkah Mart
		Banyu Asin	Sumber Makmur	SPAM Desa, Penggilingan Padi, Perdagangan Hasil Perkebunan, Kios Saprodi, Sewa Perlengkapan Pesta dan Berkah Mart
		Mapur	Bubung Tujuh	Sewa Perkakas Pesta, Perdagangan dan Fotocopy
		Pugul	Aik Batek	Sewa Perkakas Pesta dan Organ Tunggal, Perdagangan Hasil Perkebunan dan Fotocopy



NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	UNIT USAHA
		Silip	Gerbang Mandiri	Sewa Perkakas Pesta dan Organ Tunggal
		Riau	Kuncer Berkah	SPAM Desa, Perdagangan Pasir Bangunan dan Tanah Puru dan Sewa Perlengkapan Pesta
4.	Belinyu	Gunung Muda	Gunung Muda Bersatu	Sewa Kios dan Sewa Perlengkapan Pesta
		Gunung Pelawan	Pelawan Bersatu Jaya	Sewa Kios dan Berkah Mart
		Bintet	Gema Berjua	Perdagangan, Kebun Desa dan Sewa Perlengkapan Pesta
		Riding Panjang	Riding Panjang Jaya	Depot Air Minum Isi Ulang dan Sewa Perlengkapan Pesta
5.	Mendo Barat	Air Duren	Maju Bersama	Simpan Pinjam, SPAM Desa dan Berkah Mart
		Petaling Banjar	Banjar Bergema	Sewa Perlengkapan Pesta dan Kios Pertanian
		Labuh Air Pandan	Delapan Jamur	Sewa Perlengkapan Pesta, Fotocopy, ATK dan Bengkel Motor



NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	UNIT USAHA
		Zed	Maju Sejahtera Bersama	SPAM Desa dan Perdagangan Hasil Perkebunan
		Rukam	Bergambir	Sewa Perlengkapan Pesta dan Perdagangan Hasil Perkebunan
		Cengkong Abang	Buana Cipta Abadi	Perdagangan Hasil Perkebunan dan Perdagangan LPG
		Kace	Kace Mandiri	Sewa Gedung dan Usaha Perkebunan
		Air Buluh	Tunas Jaya	Sewa Perlengkapan Pesta
		Kace Timur	Kembang Nyatoh	SPAM Desa, Sewa Perlengkapan Pesta dan Jasa Pengangkutan Sampah
		Kemuja	Kemuja Mandiri	SPAM Desa dan Perdagangan Hasil Perkebunan
		Petaling	Kemarong	Perdagangan Umum, Perdagangan ayam Potong, Saprodi dan Perdagangan Hasil Pekebunan
		Kota Kapur	Prasasti	SPAM Desa
6.	Pemali	Pemali	Pemali Sejahtera	Pengangkutan Sampah, Desa Wisata dan Sewa Perlengkapan Pesta



NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	UNIT USAHA
		Air Ruai	Mandiri Bersama	Sewa Perlengkapan Pesta
		Sempan	Pengawa	Pasar Desa, Bengkel, Sewa Kios dan Sewa Perlengkapan Pesta
		Karya Makmur	Maju Bersama	Sewa Kios, Sewa Perlengkapan Pesta, Perdagangan LPG, Kompos, Pemasaran Hasil UMKM dan Hasil Perkebunan
		Air Duren	Ardo	Usaha perdagangan dan jasa serta Sewa Perlengkapan Pesta
		Penyamun	Bina Lestari	Sewa Perlengkapan Pesta dan Perdagangan Hasil Perkebunan
7.	Merawang	Pagarawan	Pagarawan	Simpan Pinjam, Kios Saprodi, Pasar Desa, Jasa Pengangkutan Sampah, Sewa Perlengkapan Pesta
		Kimak	Depati Bahrin	Perdagangan LPG
		Baturusa	Cipta Bersama	Pengangkutan Sampah, Sewa Perkakas Pesta dan Lapangan Olahraga, Pasar Desa dan Pasar Malam



NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	UNIT USAHA
		Jada Bahrin	Bina Mandiri	SPAM Desa, Perdagangan LPG, dan Perdagangan Hasil Perkebunan
		Jurung	Maju Mandiri Bersama	Sewa Perlengkapan Pesta, Perdagangan Kompos dan Sapi Potong
		Balun Ijuk	Makwang	Jasa pengangkutan dan pengelolaan sampah, Simpan Pinjam, Tambak Ikan, SPAM Desa, Pasar Desa, Pengelolaan Parawisata dan Sewa Perlengkapan Pesta
8.	Sungailiat	Rebo	Rebo Tanjung Karang	Perdagangan Saprodi

Sumber : Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa, 2020

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka kondisi masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.83
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S.D 2019 TERHADAP KONDISI AKHIR (%)
1.	Persentase Desa Swasembada	%	-	25,81	24,19	40,32	60,00



Dari data di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator persentase desa swasembada mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 yakni dari 25,81 persen pada tahun 2019 menjadi 24,19 pada tahun 2020. Apabila dibandingkan capaian tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD maka baru mencapai 60,00 persen dari target yang harus dicapai pada tahun 2023.

Hambatan dalam pencapaian sasaran dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, antara lain :

Tabel 3.84
Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
- Pandemi covid-19 menghambat pergerakan ekonomi masyarakat desa	- Pengembangan jaringan pemasaran produk dari desa berbasis online
- Produktivitas tenaga kerja di perdesaan yang masih rendah karena aktivitas ekonomi perdesaan masih bertumpu pada sektor pertanian (primer)	- Mendorong program <i>one village one product (OVOP)</i> sehingga setiap desa memiliki produk unggulan
- Jaringan pemasaran produk-produk yang dihasilkan masyarakat desa yang terbatas	- Membuat jaringan pemasaran tingkat kecamatan maupun kabupaten untuk menampung produk-produk unggulan dari desa
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dapat menggerakkan perekonomian di desa	- Pelatihan kemampuan serta keterampilan (<i>soft skill</i>) yang sesuai dengan potensi ekonomi di desa tersebut
- Infrastruktur desa yang masih terbatas	- Penggunaan dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan peningkatan ekonomi pedesaan

Pencapaian sasaran Meningkatnya Peran Serta Desa Dalam Mendorong Perekonomian Daerah didukung oleh 4 (program) program pada Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;



- 3) Program Penataan Desa; dan
- 4) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Untuk mengukur efektifitas capaian kinerja sasaran, diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.85
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2020	93,75	99,18	94,52	Sangat Efektif

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka (*un audited*), 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan indikator sasaran yang ada dapat dicapai sebesar 93,75 persen dengan realisasi keuangan sasaran sebesar 99,18 persen sehingga tingkat efektifitas terhadap pencapaian sasaran sebesar 94,52 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain sangat efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.86
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

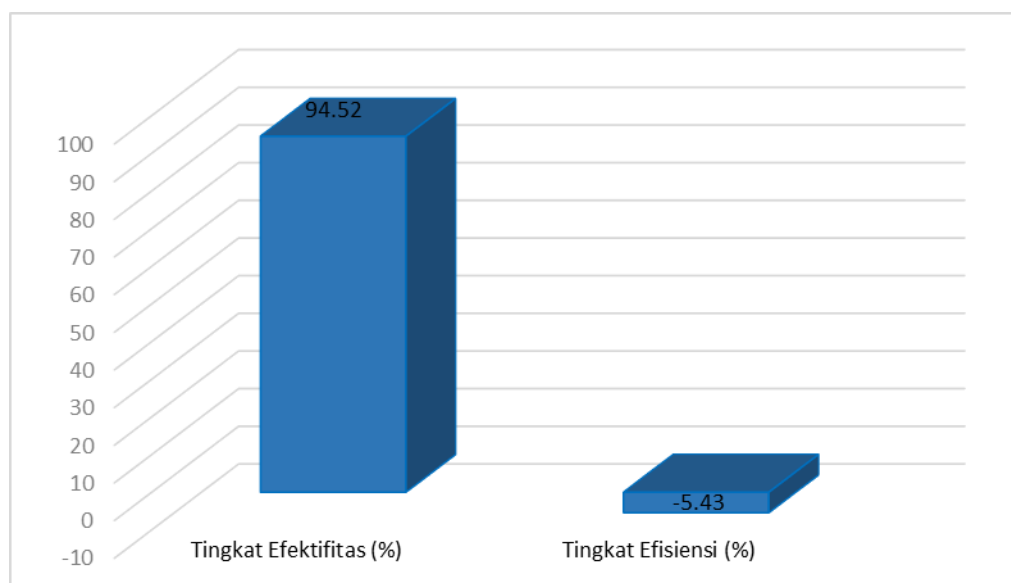
Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2020	93,75	520.370.250,00	516.120.000,00	99,18	-5,43

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka (*un audited*), 2021



Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 520.370.250,- dengan realisasi belanja mencapai Rp. 516.120.000,- atau sebesar 99,18 persen. Dengan demikian pada sasaran ini tidak terjadi efisiensi atau inefisiensi sebesar -5,43 persen.

Grafik 3.22
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Sasaran
“Meningkatnya Peran Serta Desa Dalam Mendorong Perekonomian Daerah”
Tahun 2020



15. Sasaran : Meningkatkan Upaya Pelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup

Mengelola Sumber Dayan Alam (SDA) yang lestari dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dapat dilakukan melalui revitalisasi dan refungsionalisasi *local wisdom* dan *local knowledge* dalam pengelolaan SDA dan lingkungan, serta optimalisasi pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat yakni dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat yang terkait dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program pengelolaan SDA dan lingkungan.

Upaya pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari 3 indikator yaitu Indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).



Indikator keberhasilan pencapaian sasaran “**Meningkatnya Upaya Pelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup**” berikut target dan capaiannya pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.87
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Tahun 2020

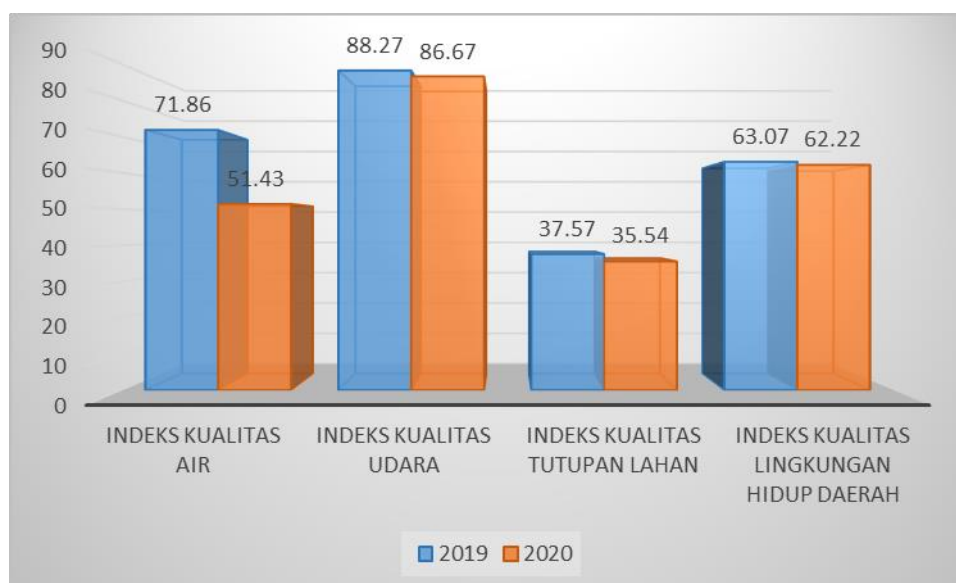
NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Kategori
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	%	63,07	62,22	98,65	TT
2.	Ketaatan Terhadap RTRW	%	100,00	100,00	100,00	T
	Rata - Rata Capaian				99,32	TT

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian sasaran “**Meningkatnya Upaya Pelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup**” didukung oleh indikator sasaran “**Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah**” dengan capaian **98,65 persen** yang berarti kinerja sasaran termasuk dalam Kategori Target Tidak Tercapai. Sedangkan indikator sasaran “**Ketaatan Terhadap RTRW**” dengan capaian **100,00 persen** yang berarti kinerja sasaran termasuk dalam **Kategori Tercapai** sehingga capaian rata-rata sasaran sebesar **99,32 persen** yang berarti kinerja sasaran termasuk dalam Kategori Target Tidak Tercapai.

Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah pada tahun 2020 yang mencapai 62,22 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai 63,07 atau mengalami penurunan sebesar 0,85 persen. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini merupakan akumulasi dari komponen Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.23
Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bangka Tahun 2019-2020



Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung berdasarkan mutu air sungai yang ada di Kabupaten Bangka dengan menggunakan 10 parameter pengukuran yaitu DO, *Fecal Coliform*, COD, pH, BOD, NH₃-N, TP, TSS, NO₃-N, dan TDS dengan perhitungan berdasarkan bobot dan transformasi nilai sub-indeks parameter kualitas air yang ditetapkan dalam metode Indeks Kualitas Air modifikasi Indonesia.

Berdasarkan hasil pengukuran IKA, hasil konversi tingkat pemenuhan standar mutu air sungai di Kabupaten Bangka pada tahun 2019 sebesar 71,86 dengan kategori cukup dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 51,43 yang masuk ke dalam kategori sangat kurang. Kategori baik ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah domestik, sanitasi dan limbah peternakan di wilayah Kabupaten Bangka belum tertangani dengan baik dan ada sebagian limbah masuk ke dalam sepadan sungai. Nilai IKA ini dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (*restorasi*) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) tingkat erosi dan sedimentasi.

Di Kabupaten Bangka, indeks kualitas air yang masuk dalam kategori sangat kurang ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang baik terhadap penerbitan izin



perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terikat izin pembuangan air limbah ke sumber air serta pemantauan dan evaluasi kualitas air pada sumber air skala daerah yang dilakukan di 5 (lima) titik lokasi sungai yaitu Sungai Jeruk, Sungai Kotawaringin, Sungai Bukit Layang, Sungai Kayu Besi dan Sungai Menduk serta 4 (empat) lokasi pelayanan air bersih yaitu PDAM Merawang, PDAM Belinyu, DAM 1 Pemali dan SPAM Bakam.

Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan parameter pengukuran SO_2 dan NO_2 di wilayah Kabupaten Bangka. Pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Bangka dilakukan di 3 (tiga) titik lokasi yaitu lokasi di area transportasi (jalan), pemukiman dan area perkantoran di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Belinyu. Berdasarkan hasil pengukuran IKU, hasil konversi tingkat kualitas udara di Kabupaten Bangka pada tahun 2019 sebesar 88,27 yang masuk ke dalam kategori sangat baik dan pada tahun 2020 memiliki nilai 86,67 dengan kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan konsentrasi NO_2 yang rata-rata berasal dari sektor transportasi masih rendah begitu juga dengan konsentrasi SO_2 yang rata-rata berasal dari sektor industri juga masih rendah.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diukur berdasarkan Penghitungan IKTL dilakukan dengan membanding luas tutupan lahan dengan luas wilayah administratifnya dengan mempertimbangkan aspek konservasi dan aspek rehabilitasi yang mempengaruhi perubahan tutupan lahan/hutan, serta karakteristik wilayah secara spasial. Indikator/parameter yang digunakan adalah : (1) Luas tutupan hutan (*Forest Cover Index*) dan perubahan tutupan hutan (*Forest Performance Index*); (2) Kondisi tutupan tanah (*Soil Condition Index*); (3) Konservasi sepadan sungai/danau/pantai (*Water Health Index*); dan (4) Kondisi habitat (*Land Habitat Index*).

Berdasarkan hasil pengukuran IKTL, luas tutupan lahan di Kabupaten Bangka seluas 17.559,46 hektar dari luas wilayah administrasi 302.876,40 hektar sehingga skor IKTL pada tahun 2019 sebesar 37,57 yang masuk ke dalam kategori waspada dan pada tahun 2020 mendapatkan skor IKTL sebesar 35,54 dengan kategori waspada. Kategori ini menunjukkan bahwa tutupan lahan di Kabupaten Bangka sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan Kabupaten Bangka merupakan daerah tambang, dimana pembukaan lahan tambang tidak diiringi dengan penghijauan



dilokasi eks tambang tersebut. Usaha yang dilakukan oleh Kabupaten Bangka untuk meningkatkan tutupan lahan adalah dengan melakukan rehabilitasi tanaman di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS).

Untuk indikator sasaran Ketaatan Terhadap RTRW dengan capaian 100,00 persen menggambarkan bahwa pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan pembangunan yang berkelanjutan yang diselenggarakan berdasarkan keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, pelindung kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas.

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Di Kabupaten Bangka, setiap wilayah memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kegiatan sosial ekonomi yang beragam. Pembangunan tanpa perencanaan ruang yang baik tidak hanya akan beresiko pembangunan yang gagal tetapi juga akan menimbulkan kesenjangan antar wilayah yang menyebabkan timbulnya berbagai konflik sosial yang merugikan. Dalam rangka mengurangi kesenjangan perkembangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah sesuai dengan potensi, hambatan, dan tantangannya dalam bentuk suatu rencana struktur yang mempunyai hirarki keruangan. Rencana struktur yang dikembangkan tersebut akan mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan



antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya serta memastikan pembangunan berkelanjutan.

Regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka (2010-2030) dan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat (2014-2034).

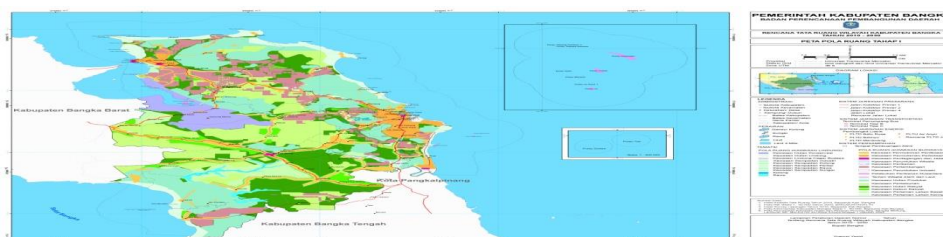
Peranan tata ruang pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya secara optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan antar sektor. Penyimpangan pemanfaatan ruang menimbulkan degradasi lingkungan darat, air maupun udara. Begitu eratnya hubungan penataan ruang dengan kelestarian lingkungan hidup dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan setiap daerah menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30,00 persen dari Luas Wilayah Perencanaan.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kecamatan Merawang yang sudah masuk ke dalam tahap evaluasi dari Kementerian Agrarian dan Pentaan Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan melakukan identifikasi mempersiapkan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Belinyu. Bila Peraturan Daerah tentang RDTR tersebut telah ditetapkan akan berkontribusi terhadap penambahan luas RTH Kabupaten Bangka.

Sejatinya, pelayanan publik dalam meningkatkan pemanfaatan penataan ruang di Kabupaten Bangka sudah berada di jalur yang benar (*on the right track*) dan berjalan menuju pada peningkatan derajat pelayanan publik yang lebih baik. Lebih dari itu, pembangunan daerah juga sudah mulai dilaksanakan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang sudah disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangka dalam rangka menjamin pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.



Gambar 3.2
Pola Rencana Ruang Kabupaten Bangka



Sumber : Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bangka

Indikator ketaatan terhadap RTRW diukur berdasarkan usulan masyarakat ditetapkan pemanfaatan ruang direkomendasikan atau tidak direkomendasikan tergantung kesesuaian peruntukan ruangnya dalam RTRW. Pada tahun 2020, dari 75 usulan masyarakat yang memanfaatkan ruang untuk kegiatan usahanya telah direkomendasikan sebanyak 75 usulan sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka. Selain itu, terdapat 43 permohonan informasi pemanfaatan ruangan yang semuanya ditindaklanjuti dengan memberikan informasi pemanfaatan ruang sesuai dengan yang dibutuhkan.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran dari 2 (dua) indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas air pada sumber air skala daerah yang dilakukan di 5 (lima) lokasi sungai dan 4 (empat) lokasi pelayanan air bersih;
2. Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas udara ambien 3 (tiga) titik lokasi area transportasi, pemukiman dan perkantoran di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Belinyu;
3. Penyelesaian kasus lingkungan hidup yang diduga mencemari sepadan sungai;
4. Pemeliharaan tanaman untuk rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS);
5. Komitmen Pemerintah Daerah melaksanakan amanah RTRW Kabupaten Bangka melalui penganggaran penyusunan RDTR dan turunannya; dan



6. Komitmen Pemerintah Daerah untuk menjalankan amanah Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal sebesar 30% dari luas wilayah.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka kondisi masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.88
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S.D 2019 TERHADAP KONDISI AKHIR (%)
1.	Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	-	63,07	62,22	83,50	74,51
2.	Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari data di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 yakni dari 63,07 persen pada tahun 2019 menjadi 62,122 pada tahun 2020 atau menurun. Apabila dibandingkan capaian tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD maka baru mencapai 74,51 persen dari target yang harus dicapai pada tahun 2023. Sedangkan untuk indikator ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2019 mencapai 100,00 persen dan pada tahun 2020 juga mencapai 100,00. Apabila dibandingkan capaian tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD maka sudah mencapai 100,00 persen dari target yang harus dicapai pada tahun 2023.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi serta Upaya Pemecahan Masalah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka, yaitu :



Tabel 3.89
Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen perusahaan yang masih rendah terhadap pengelolaan limbah cair 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terutama izin lingkungan dan izin PPLH terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Bangka
<ul style="list-style-type: none"> - Luas tutupan lahan yang mengalami penurunan karena aktifitas penambangan ilegal 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan luas areal tutupan lahan terutama di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lokasi eks tambang - Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk menjalankan amanah Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal sebesar 30% dari luas wilayah
<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga masih ditemukan masyarakat membuang sampah sembarangan terutama di aliran sungai 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan dan tidak membuang sampah di daerah aliran sungai
<ul style="list-style-type: none"> - Musim kemarau panjang yang memicu kebakaran lahan dan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah dan memberikan informasi kepada masyarakat agar waspada terhadap kebakaran lahan dan hutan serta menghimbau tidak membuka lahan kebun dengan cara dibakar



Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari capaian program yang dilakukan dalam rangka meningkatkan upaya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup yang terdiri dari 6 (enam) program utama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka dan 3 (tiga) program utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka. Adapun program yang dimaksud yakni :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan;
3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
7. Program Perencanaan Tata Ruang;
8. Program Pemanfaatan Ruang; dan
9. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.

Untuk mengukur efektifitas capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Upaya Pelestarian Dan Kualitas Lingkungan Hidup”**, diukur berdasarkan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.90
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2020	99,32	90,08	110,28	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata realisasi kinerja sasaran yang diukur berdasarkan indikator utama dapat dicapai sebesar 99,32 persen dengan realisasi keuangan sasaran hanya sebesar 90,08 persen sehingga tingkat efektifitas



terhadap pencapaian sasaran sebesar 110,28 persen dengan kriteria keberhasilan sangat tinggi atau dengan kata lain sangat efektif.

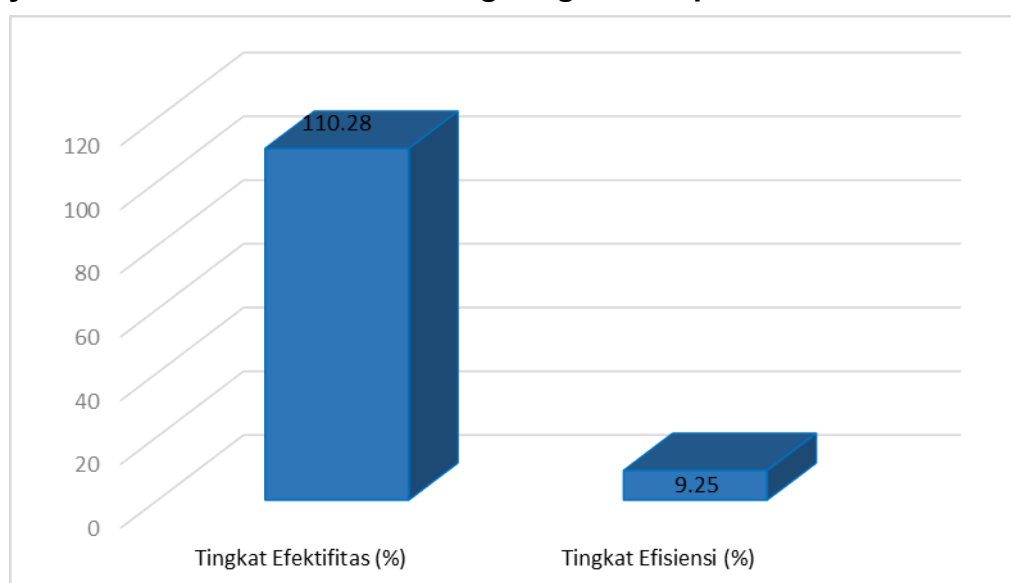
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, dihitung berdasarkan realisasi belanja seluruh program yang mendukung kinerja sasaran. Target belanja sasaran dan realisasi belanja sasaran dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.91
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2020

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2020	99,32	9.909.700.072,22	8.926.721.260,42	90,08	9,25

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 9.909.700.072,22 dengan realisasi belanja mencapai Rp. 8.926.721.260,42 atau sebesar 90,08 persen. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 9,25 persen.

Grafik 3.24
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Upaya Pelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup” Tahun 2020





B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2020 diuraikan berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib maupun Pilihan yang disajikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka sebagai dasar pelaksanaan Program Utama yang mendukung kinerja sasaran.

Adapun gambaran rencana pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 (un audited) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.92
Anggaran dan Realisasi APBD
Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			Rp	%
PENDAPATAN	1.140.955.837.297,00	1.136.647.395.404,40	-4.308.441.892,60	99,62
PENDAPATAN ASLI DAERAH	126.497.504.000,00	155.729.845.760,46	29.232.341.760,46	123,11
DANA PERIMBANGAN	803.506.147.597,00	761.255.023.545,00	-42.251.124.052,00	94,74
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	210.952.185.700,00	219.662.526.098,94	8.710.340.398,94	104,13
BELANJA	1.270.841.728.698,23	1.152.653.865.431,02	-118.187.863.267,21	90,70
BELANJA TIDAK LANGSUNG	643.701.661.090,01	588.898.499.752,94	-54.803.161.337,07	91,49
BELANJA LANGSUNG	627.140.067.608,22	563.755.365.678,08	-63.384.701.930,14	89,89
SURPLUS / DEFISIT	-129.885.891.401,23	-16.006.470.026,62	113.879.421.374,61	12,32
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	130.393.875.401,23	131.157.002.485,23	763.127.084,00	100,59
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	507.984.000,00	507.984.000,00	0,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	129.885.891.401,23	130.649.018.485,23	763.127.084,00	100,59
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	114.642.548.458,61	114.642.548.458,61	0,00

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka (un audited), 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa target pendapatan daerah Kabupaten Bangka tahun 2020 sebesar Rp. 1.140.955.837.297,- yang terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar Rp. 126.497.504.000,- , dana perimbangan sebesar Rp.803.506.147.597,- dan lain – lain pendapatan yang sah sebesar Rp.210.952.185.700,-. Disisi pengeluaran, belanja daerah sebesar Rp.1.270.841.728.698,23 yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.643.701.661.090,01 dan belanja langsung sebesar Rp.627.140.067.608,22 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar (Rp. 129.885.891.401,23). Sedangkan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bangka tahun 2020 sebesar Rp.1.136.647.395.404,40 atau sebesar 99,62 persen. Belanja daerah terealisasi



hingga sebesar Rp. 1.152.653.865.431,02 atau sebesar 90,70 persen dan terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 114.642.548.458,61.

Memperhatikan kemampuan fiskal daerah tahun 2020, maka proporsi alokasi belanja daerah yang diprioritaskan untuk membiayai program prioritas sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka tahun 2019 – 2023 dianggarkan sebesar Rp. 1.270.841.728.698,23 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Dalam pencapaian sasaran kinerja Utama Pemerintah Daerah, tentunya diperlukan komitmen yang sangat kuat dan kerja sama antar elemen yang secara parsial berorientasi pada pembangunan daerah. Dalam mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Daerah tersebut, Perangkat Daerah memiliki peranan penting dalam tataran pelaksanaan rencana-rencana kerja yang telah disusun. Selain perencanaan yang matang, upaya dalam merealisasikan program-program prioritas tentu menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan daerah. Namun hal ini perlu dukungan finansial yang memadai yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dukungan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pencapaian sasaran kinerja daerah.

Alokasi anggaran belanja langsung Kabupaten Bangka tahun 2020 yang dianggarkan untuk mendukung program dan kegiatan prioritas yang memiliki dampak nyata terhadap pencapaian sasaran daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.93
Alokasi Anggaran Belanja Menurut Sasaran Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	%-TASE
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	166.850.377.462,00	26,60
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	16.024.040.400,00	2,56
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	237.112.358.941,00	37,81
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	86.452.716.233,00	13,79
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	20.142.571.245,00	3,21
6	Meningkatnya Kesetaraan Gender	145.068.000,00	0,02
7	Meningkatnya Perlindungan Pemenuhan Hak-hak Anak	3.667.082.000,00	0,58



8	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	29.735.565.755,00	4,74
9	Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	4.999.840.600,00	0,80
10	Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata Berbasis Sport Tourism. Kearifan dan Budaya Lokal serta Sumber Daya Alam Pariwisata	4.377.974.550,00	0,70
11	Meningkatnya pendapatan masyarakat	9.529.501.100,00	1,52
12	Menurunnya Angka Kemiskinan	3.273.968.000,00	0,52
13	Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah	34.398.933.000,00	5,49
14	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto	520.370.250,00	0,08
15	Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	9.909.700.072,22	1,58
Total Belanja Langsung		627.140.067.608,22	100,00

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas dan anggaran untuk belanja langsung program dan kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas, jumlah untuk program dan kegiatan prioritas sebesar Rp. 627.140.067.608,22

C. EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi belanja langsung tahun 2020 sebesar 15,99 persen dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan prioritas sebesar 15,99 persen. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran strategis, efisiensi anggaran terbesar pada program dan kegiatan di sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat” yaitu sebesar 37,28 persen, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program dan kegiatan yang menunjang sasaran “Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah” yaitu sebesar -5,43 persen.

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 3.94
Efisiensi Anggaran dan Efektifitas Sasaran Strategis
Kabupaten Bangka Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)			EFISIENSI ANGGARAN		EFEKTIVITAS (%)
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%-TASE	(Rp)	%-TASE	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	166.850.377.462,00	153.656.027.023,65	92,09	13.194.350.438,35	8,91	109,68
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	16.024.040.400,00	12.845.653.802,00	80,16	3.178.386.598,00	19,84	124,74
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	237.112.358.941,00	160.458.379.406,38	67,67	76.653.979.534,62	37,28	155,08
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	86.452.716.233,00	66.965.160.197,00	77,46	19.487.556.036,00	22,64	129,23
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	20.142.571.245,00	18.946.486.773,00	94,06	1.196.084.472,00	36,35	138,65
6	Meningkatnya Kesetaraan Gender	145.068.000,00	128.973.125,00	88,91	16.094.875,00	30,84	134,69
7	Meningkatnya Perlindungan Pemenuhan Hak-hak Anak	3.667.082.000,00	3.536.725.332,00	96,45	130.356.668,00	3,55	103,69
8	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	29.735.565.755,00	25.110.339.695,53	84,45	4.625.226.059,47	17,19	120,36
9	Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	4.999.840.600,00	4.734.229.339,00	94,69	265.611.261,00	5,92	106,25
10	Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata Berbasis Sport Tourism, Kearifan dan Budaya Lokal serta Sumber Daya Alam Pariwisata	4.377.974.550,00	3.525.783.229,30	80,53	852.191.320,70	8,14	110,11
11	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto	9.529.501.100,00	9.066.237.745,00	95,14	463.263.355,00	12,74	113,40
12	Meningkatnya pendapatan masyarakat	3.273.968.000,00	2.827.169.540,00	86,35	446.798.460,00	19,44	122,52
13	Menurunnya Angka Kemiskinan	34.398.933.000,00	31.572.436.227,00	91,78	2.826.496.773,00	13,12	114,29
14	Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah	520.370.250,00	516.120.000,00	99,18	4.250.250,00	-5,43	94,52
15	Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	9.909.700.072,22	8.926.721.260,42	90,08	982.978.811,80	9,25	110,26
Total Belanja Langsung		627.140.067.608,22	502.816.442.695,28	80,18	124.323.624.912,94	15,99	119,16

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangka diolah, 2021 (un audited)



BAB IV Penutup

Konsep akuntabilitas kinerja pada setiap instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka masih perlu dilakukan pendalaman dan pemahaman secara sistematis dan komprehensif, baik pada tingkat Pemerintah Kabupaten maupun pada setiap Perangkat Daerah serta semua jenjang manajemen yang terlibat dalam proses pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka, terutama pada jenjang *top* dan *middle management*, melalui *workshop*, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.

Penyusunan Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka ditetapkan sesuai dengan APBD dan Indikator Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka serta tujuandalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Pencapaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dilakukan melalui proses pengarahan melalui *focus group discussion* yang melibatkan seluruh pimpinan Perangkat Daerah. Proses ini dilakukan mulai dalam tahap perencanaan program dan kegiatan agar tetap mengarah pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang didukung indikator setingkat *outcome*, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian 15 (lima belas) sasaran yang mencakup 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja setingkat *outcome* diperoleh hasil : (i) 14 (empat belas) indikator kinerja utama atau sebesar 51,85 persen masuk dalam kategori *melebihi target*, (ii) 8 (delapan) indikator kinerja utama atau sebesar 29,63 persen termasuk dalam kategori *tercapai*, dan (iii) 5 (lima) indikator kinerja utama atau sebesar 18,52 persen termasuk kategori *tidak tercapai*.



- 2) Tingkat capaian kinerja akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 yang dituangkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :
 - a. Target Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.140.955.837.297,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.136.647.395.404,40 atau mencapai 99,62%.
 - b. Target Belanja Daerah sebesar Rp. 1.270.841.728.698,23 dengan realisasi sebesar Rp. 1.152.653.865.431,02 atau mencapai 90,70%.
- 3) Pencapaian kinerja pembangunan tahun anggaran 2020 yang dipresentasikan terhadap tingkat pencapaian sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bangka sudah berada di jalur yang benar (*on the right track*) dan terus mengalami peningkatan derajat pelayanan publik yang lebih baik. Lebih dari itu, pembangunan daerah juga sudah dilaksanakan dalam kerangka pencapaian sasaran yang sudah disesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penetapan kinerja yang berbasis pada penjangkaran potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangka.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka atas hasil pengukuran kinerja sasaran sebagai bentuk upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) **Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi** melalui upaya: (i) Penyempurnaan seluruh unsur-unsur kunci dalam perencanaan (tujuan, sasaran dan indikator kinerja) seluruh Perangkat Daerah serta keberlanjutan implemetasi manajemen kinerja, (ii) Perlu dilakukan terobosan-terobosan baru serta pembiasaan bekerja secara daring guna melaksanakan seluruh kerja dalam mencapai target kinerja serta menghambat penyebaran Covid-19, (iii) Memperdalam analisis refocusing program dan kegiatan yang telah disusun sehingga tidak hanya menghilangkan program dan kegiatan yang berulang tapi juga menggabungkan program-program dan memastikan fokus alokasi sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia hanya untuk program dan kegiatan yang secara langsung berpengaruh dalam pencapaian kinerja, (iv) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengolah data kinerja (SILAKIP) yang telah dibangun sehingga terpantau capaian kinerja



atas tiap-tiap Perangkat Daerah yang diikuti dengan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian kinerja tersebut, (v) Pengintegrasian Indikator Kinerja Individu dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang dikelola dengan baik dan diimplementasikan dalam laporan harian kinerja yang menggunakan aplikasi yang memerlukan validasi oleh atasan langsung masing-masing individu, sehingga monitoring kinerja bisa dilakukan setiap hari dan setiap bulan. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam kinerja maka pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja bulanan, (vi) Melakukan reviu peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ sinkron, dan (vii) memanfaatkan proses bisnis untuk melakukan restrukturisasi Perangkat Daerah dan evaluasi struktur organisasi yang efektif dan efisien, (viii) Arsitektur SPBE kedepan akan diperbaiki. Penjelasan tentang visi misi akan ditambahkan dan Kebijakan internal perencanaan dan penganggaran TIK akan disesuaikan dengan muatan rencana induk SPBE serta menyertakan kebijakan aplikasi umum berbagi pakai akan dilakukan guna meningkatkan nilai indeks domain tata kelola Kabupaten Bangka, dan (ix) Penerapan integrasi sistem aplikasi pada seluruh unit kerja/PD.

- 2) **Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel** melalui: (i) Mengintegrasikan sistem aplikasi pencatatan dan pengelolaan aset daerah dengan sistem pengelolaan keuangan yang sudah ada agar dapat bekerja secara optimal, (ii) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi siskeudes dan Festival Anggaran Desa, dan (iii) Melakukan *recruitment* intern APIP untuk memperkuat pengawasan intern pemerintah daerah.
- 3) **Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat** melalui : Meningkatkan transparansi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, baik prosedur dan persyaratan pelayanan agar memudahkan masyarakat mengakses layanan publik.
- 4) **Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat** melalui : (i) Mengoptimalkan kembali program perburuan anak putus sekolah (Bunaktuslah) dalam rangka menekan angka putus sekolah sampai ke level desa dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pendidikan yang dikoordinir langsung oleh Dinas Pendidikan dan



Kebudayaan Kabupaten Bangka, (ii) Melakukan pola kerjasama dengan pihak terkait terutama terkait upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan miskin, (iii) Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat melalui pemberdayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), (iv) Menyekolahkan semua tenaga pengajar ke jenjang pendidikan Strata I, (v) Bagi tenaga pengajar mata pelajaran prioritas yang telah berjenjang Strata I dilanjutkan dengan Strata II, (vi) Memberikan pelatihan kepada tenaga pengajar, (vii) Melakukan pengawasan secara berkala kepada tenaga tenaga pengajar dalam melaksanakan kurikulum sekolah,, (viii) Redistribusi tenaga pengajar antar wilayah, (ix) Pemberian insentif tenaga pengajar dengan pertimbangan jarak dan/atau daerah terpencil, dan (x) Pembukaan rute jalur transportasi umum menuju sarana pendidikan

- 5) **Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat** melalui upaya-upaya: (i) Penguatan pelaksanaan 3 T (Terlambat Mendeteksi, Terlambat Merujuk dan Terlambat Penanganan/Pemberian Pelayanan yang Adekuat) mulai dari level pelayanan di Bidan desa, Puskesmas PONEB dan RS Rujukan, peningkatan Kompetensi tenaga Kesehatan bidan baik di desa maupun di puskesmas, (ii) Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Bangka, (iii) Melakukan kerjasama dengan aparat desa setempat sehingga dapat menginformasikan melalui kantor desa maupun layanan publik pemerintahan terdekat, (iv) Peningkatan kapasitas layanan SPGDT, (v) Pendampingan ibu hamil oleh petugas kesehatan dan kader dapat menekan angka kematian ibu melahirkan, (vi) Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penyediaan gizi keluarga untuk mengurangi angka balita gizi buruk, (vii) Menggiatkan peran ibu-ibu PKK di desa dalam penyuluhan kesehatan ibu dan anak, (viii) Pemantapan implementasi inovasi SMS Bunda Cerdas, SI RESTI CIKAR dan SI DORA, (ix) Penambahan sarana NICU pada fasilitas kesehatan rujukan, dan (x) Penambahan tenaga dokter spesialis.
- 6) **Meningkatnya kesetaraan gender** melalui upaya: (i) Optimalisasi Program Perburuan Anak-anak putus sekolah ke sekolah kependidikan non formal pendidikan kesetaraan, (ii) Memperbanyak Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di setiap desa/ kelurahan, (iii) Peningkatan Akses dan pelayanan



Pendidikan bagi perempuan salah satunya dengan mencanangkan sekolah perempuan, (iv) Melakukan pelatihan keterampilan khusus perempuan, (v) Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga baik melalui usaha ekonomi mikro maupun dengan cara membuka peluang dan kesempatan kerja khusus perempuan, dan (vi) Mengoptimalkan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di setiap desa / kelurahan.

- 7) **Meningkatnya perlindungan pemenuhan hal-hak anak** melalui upaya: (i) Melakukan MoU Antara Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Kementerian Agama untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya untuk tidak menikah dalam usia anak, (ii) Mengembangkan Lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga, (iii) Sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat yang rentan, terkait dampak negatif pernikahan pada usia anak, (iv) Memperkuat peraturan terkait penyediaan Ruang Laktasi baik di fasilitas umum instansi pemerintah maupun dunia usaha, (v) Sosialisasi dan edukasi terkaitnya pentingnya ruang laktasi dan area bermain anak, (vi) Optimalisasi penyelenggaraan Sekolah Ramah anak, mulai dari tingkat PAUD, SD/MI, SMP/Mts, SMA/MAN di Kabupaten Bangka, (vii) Menyediakan fasilitas konseling di disekolah penanganan permasalahan anak, (viii) Menyediakan sarana yang dapat digunakan sebagai wadah anak berkumpul dan melakukan kreatifitas, (ix) Mengoptimalkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA), (x) Peningkatan pembentuk Forum Anak di setiap kecamatan dan Desa serta kelurahan, dan (xi) Sosialisasi dan edukasi terkait peran dan fungsi forum anak dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- 8) **Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas** melalui upaya: (i) Memetakan kegiatan pembangunan infrastruktur yang memiliki daya ungkit ekonomi yang baik dari sekian kegiatan yang sebelum refocusing telah ditetapkan, (ii) Memanfaatkan kerjasama dengan private sektor terkait pembangunan infrastruktur jalan khususnya pembangunan jalan di sentra pertanian, (iii) Tim Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) menjalankan fungsinya melalui pertemuan-pertemuan yang berkesinambungan untuk memastikan dan menyelesaikan permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan, (iv) Khusus untuk pembangunan yang didanai dari DAK, mengingat kewenangan penetapan anggaran DAK ada pada Pemerintah Pusat



maka harus disikapi dengan persiapan yang sangat baik untuk SDM teknis, jadwal kegiatan serta koordinasi antar PERANGKAT DAERAH yang intensif agar pembangunan dapat tepat waktu dan penyerapan DAK mencapai 100%, dan (v) Memastikan mulai dari tingkat perencanaannya bahwa lokasi pembangunan tidak pada kawasan hutan dan memastikan lahan *clean and clear* (C & C) dan atau memastikan kegiatan penyediaan lahan dilakukan setahun sebelumnya.

- 9) **Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas** melalui upaya: (i) memperbanyak akses perpipaan SPAM IKK di pedesaan dan membebaskan biaya pemasangan bagi masyarakat yang kurang mampu, dan (ii) Melakukan pemeliharaan terhadap sumber air minum agar bisa tetap terjaga volume maupun kualitas airnya serta keberlanjutannya.
- 10) **Meningkatnya pengembangan kepariwisataan berbasis *sport tourism*, kearifan dan budaya lokal serta sumber daya alam pariwisata** melalui upaya: (i) Inovasi layanan pariwisata yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, (ii) Melakukan promosi wisata daerah secara intensif baik melalui pendekatan teknologi informasi maupun pendekatan tradisional (pameran, expo, dsb), (iii) Melakukan pola kerjasama dengan pihak terkait terutama terkait event pariwisata tahunan yang berskala internasional (triathlon) sehingga lebih berdampak luas, (iv) Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan keterampilan/kerajinan, pegelaran seni budaya daerah sebagai representasi daya saing lokal, dan (v) Mendorong pengembangan produk –produk UKM berbasis kepariwisataan.
- 11) **Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap Profuk Domestik Regional Bruto** melalui: (i) Intensifikasi, ekstensifikasi dan penguatan teknologi budidaya untuk komoditas strategis daerah (lada, karet, dan ubi casesa) dan (ii) Memperbaiki tata niaga pertanian dalam rangka mengoptimalkan pasar domestik dan memperkuat daya saing produk pertanian.
- 12) **Meningkatnya pendapatan masyarakat** melalui: (i) Pemberian stimulus ekonomi sektor unggulan daerah, (ii) Refocussing dan realokasi anggaran, dan (iii) Pemberian insentif dan relaksasi pajak dan retribusi.



- 13) **Menurunnya angka kemiskinan** melalui (i) Kebijakan bantuan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, (ii) Pemulihan ekonomi sektor unggulan daerah, dan (iii) Pemberian insentif dan relaksasi pajak dan retribusi terhadap sektor pariwisata dan UMKM.
- 14) **Meningkatnya peran serta Desa dalam mendorong perekonomian daerah** melalui: (i) Pengembangan jaringan pemasaran produk dari desa berbasis online, (ii) Mendorong program *one village one product (OVOP)* sehingga setiap desa memiliki produk unggulan, (iii) Membuat jaringan pemasaran tingkat kecamatan maupun kabupaten untuk menampung produk-produk unggulan dari desa, (iv) Pelatihan kemampuan serta keterampilan (*soft skill*) yang sesuai dengan potensi ekonomi di desa tersebut, dan (v) Penggunaan dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan peningkatan ekonomi pedesaan.
- 15) **Meningkatnya upaya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup** melalui: (i) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terutama izin lingkungan dan izin PPLH terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Bangka, (ii) Meningkatkan luas areal tutupan lahan terutama di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lokasi eks tambang, (iii) Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk menjalankan amanah Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal sebesar 30% dari luas wilayah, (iv) Sosialisasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan dan tidak membuang sampah di daerah aliran sungai, (v) Mencegah dan memberikan informasi kepada masyarakat agar waspada terhadap kebakaran lahan dan hutan serta menghimbau tidak membuka lahan kebun dengan cara dibakar.



BUPATI BANGKA

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MULKAN

Jabatan : BUPATI BANGKA

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sungailiat, 22 Juli 2020

BUPATI BANGKA,



MULKAN

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Kategori	BB
		Indeks SPBE	Indeks	2,60
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65,97
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Opini	WTP
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	74,77
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	8,23
		Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	12,76
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	70,99
		Angka Stunting	Angka	3,82
6	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	73,90
7	Meningkatnya Perlindungan Pemenuhan Hak-hak Anak	Status Kabupaten Layak Anak	Status	Pratama
8	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)	%	74,59
		Proporsi Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	%	93,77
		Proporsi Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik (%)	%	98,91
9	Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	Persentase Masyarakat yang terlayani Sanitasi Dasar	%	95,12
		Persentase Masyarakat yang Memiliki Akses Air Bersih	%	98,71
		Persentase Masyarakat Miskin yang terlayani Rumah Layak Huni	%	32,38
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	%	97,40
		Persentase kecukupan luasan RTH Publik	%	0,016
10	Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata berbasis Sport Tourism, Kearifan dan Budaya Lokal serta Sumber Daya Alam Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	1,49
11	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto	% Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	%	19,79
12	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Peningkatan PDRB perkapita	%	-0,69
13	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan (%)	%	4,99
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,43
14	Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah	% Desa Swasembada	%	25,81
15	Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	63,07
		Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran (satpolpp)	Rp 710.594.800,00	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Perasarana Aparatur (satpolpp)	Rp 239.650.000,00	APBD
3	Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (satpolpp)	Rp -	APBD
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan (satpolpp)	Rp 14.700.000,00	APBD
5	Program Pembinaan, Penyuluhan dan	Rp 8.876.885.000,00	APBD
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dinkes)	Rp 1.658.347.300,00	APBD
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinkes)	Rp -	APBD
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dinkes)	Rp -	APBD
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dinkes)	Rp 15.000.000,00	APBD
10	Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dinkes)	Rp -	APBD
11	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dinpmp2kukm)	Rp 15.000.000,00	APBD
12	Pelayanan Administrasi Perkantoran (dinpmp2kukm)	Rp 1.126.340.000,00	APBD
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinpmp2kukm)	Rp 77.400.000,00	APBD
14	Peningkatan Disiplin Aparatur (dinpmp2kukm)	Rp -	APBD
15	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dinpmp2kukm)	Rp 6.825.000,00	APBD
16	Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dinpmp2kukm)	Rp -	APBD
17	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	Rp -	APBD
18	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda)	Rp 591.884.000,00	APBD
19	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (bappeda)	Rp 432.141.750,00	APBD
20	Program Pengembangan Data/Informasi (bappeda)	Rp 175.806.000,00	APBD
21	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (bappeda)	Rp -	APBD
22	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya (bappeda)	Rp 35.370.000,00	APBD
23	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam (bappeda)	Rp 126.876.000,00	APBD
24	Program Penelitian dan Pengembangan (bappeda)	Rp 65.400.000,00	APBD
25	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dinpanperten)	Rp 15.000.000,00	APBD
26	Pelayanan Administrasi Perkantoran (dindikpora)	Rp 5.808.386.500,00	APBD
27	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dindikpora)	Rp 501.749.800,00	APBD
28	Peningkatan Disiplin Aparatur (dindikpora)	Rp -	APBD
29	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur (dindikpora)	Rp -	APBD
30	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dindikpora)	Rp 30.610.000,00	APBD
31	Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dindikpora)	Rp -	APBD
32	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah (dkp)	Rp 24.000.000,00	APBD
33	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan (dkp)	Rp 10.435.000,00	APBD

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
34	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi (dkp)	Rp 12.175.000,00	APBD
35	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dinperkpp)	Rp 15.000.000,00	APBD
36	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dinperkan)	Rp 1.272.860.146,00	APBD
37	Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat (dinperkan)	Rp 2.600.000,00	APBD
38	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinperkan)	Rp -	APBD
39	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dinperkan)	Rp -	APBD
40	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dinperkan)	Rp -	APBD
41	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dinperkan)	Rp 15.000.000,00	APBD
42	Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dinperkan)	Rp -	APBD
43	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dinsos)	Rp 930.871.370,00	APBD
44	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinsos)	Rp 34.750.000,00	APBD
45	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dinsos)	Rp -	APBD
46	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dinsos)	Rp -	APBD
47	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dinsos)	Rp 15.000.000,00	APBD
48	Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dinsos)	Rp -	APBD
49	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran (dinakerperindag)	Rp 3.915.492.100,00	APBD
50	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinakerperindag)	Rp -	APBD
51	Peningkatan Disiplin Aparatur (dinakerperindag)	Rp -	APBD
52	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dinakerperindag)	Rp 20.145.700,00	APBD
53	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dinakerperindag)	Rp 15.000.000,00	APBD
54	Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dinakerperindag)	Rp -	APBD
55	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dkp)	Rp 1.221.694.475,00	APBD
56	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dkp)	Rp -	APBD
57	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dkp)	Rp -	APBD
58	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dkp)	Rp -	APBD
59	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikstisar Realisasi Kinerja OPD (dkp)	Rp 15.000.000,00	APBD
60	Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dkp)	Rp -	APBD
61	Program Administrasi Perkantoran (dinparbudaya)	Rp 1.556.174.950,00	APBD
62	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinparbudaya)	Rp 27.830.000,00	APBD
63	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Rp -	APBD
64	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dinpemdes)	Rp 644.154.000,00	APBD
65	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinpemdes)	Rp 87.554.200,00	APBD

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
66	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dinpemdes)	Rp -	APBD
67	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Dinpemdes)	Rp -	APBD
68	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja (dinpemdes)	Rp 15.000.000,00	APBD
69	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dinpemdes)	Rp -	APBD
70	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (bkpsdmd)	Rp 1.218.232.500,00	APBD
71	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bkpsdmd)	Rp -	APBD
72	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (bkpsdmd)	Rp -	APBD
73	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (bkpsdmd)	Rp -	APBD
74	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (bkpsdmd)	Rp 15.000.000,00	APBD
75	Program Peningkatan Pengembangan sistem	Rp 14.890.000,00	APBD
76	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dpupr)	Rp 578.390.000,00	APBD
77	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dpupr)	Rp -	APBD
78	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur (dpupr)	Rp 30.000.000,00	APBD
79	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan daerah (dpupr)	Rp -	APBD
80	Program Perencanaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pemerintahan Daerah (dpupr)	Rp 1.281.710.000,00	APBD
81	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dpupr)	Rp 2.484.628.725,00	APBD
82	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dinhub)	Rp 1.487.123.000,00	APBD
83	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinhub)	Rp 282.593.000,00	APBD
84	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dinhub)	Rp -	APBD
85	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur (dinhub)	Rp 8.625.219,00	APBD
86	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dinhub)	Rp 15.000.000,00	APBD
87	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan daerah (dinhub)	Rp -	APBD
88	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dinparbudaya)	Rp 15.000.000,00	APBD
89	Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dinparbudaya)	Rp -	APBD
90	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp -	APBD
91	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dinkominfo)	Rp 1.175.960.460,00	APBD
92	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinkominfo)	Rp 104.051.000,00	APBD
93	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dinkominfo)	Rp 21.400.000,00	APBD
94	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dinkominfo)	Rp -	APBD
95	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dinkominfo)	Rp -	APBD
96	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (mendobarat)	Rp 16.465.000,00	APBD
97	Pelayanan administrasi perkantoran (mendobarat)	Rp 1.103.474.300,00	APBD

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
98	Peningkatan disiplin aparatur (mendobarat)	Rp -	APBD
99	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (mendobarat)	Rp 24.590.000,00	APBD
100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Rp 19.690.000,00	APBD
101	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 49.070.000,00	APBD
102	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dp2kbp3a)	Rp 1.417.911.500,00	APBD
103	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dp2kbp3a)	Rp 1.143.930.000,00	APBD, DAK
104	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dp2kbp3a)	Rp -	APBD
105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dp2kbp3a)	Rp -	APBD
106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dp2kbp3a)	Rp 15.000.000,00	APBD
107	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dp2kbp3a)	Rp -	APBD
108	Program Pelayanan administrasi Perkantoran (kesbangpol)	Rp 364.175.800,00	APBD
109	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (kesbangpol)	Rp -	APBD
110	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (kesbangpol)	Rp -	APBD
111	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (kesbangpol)	Rp -	APBD
112	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja (kesbangpol)	Rp 15.000.000,00	APBD
113	Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (kesbangpol)	Rp -	APBD
114	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (sungailiat)	Rp 1.046.091.412,00	APBD
115	Program Peningkatan dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (sungailiat)	Rp 14.775.000,00	APBD
116	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (sungailiat)	Rp 4.436.960.000,00	APBD
117	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum (sungailiat)	Rp 5.742.150.888,00	APBD
118	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (sungailiat)	Rp 7.500.000,00	APBD
119	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (sungailiat)	Rp 42.860.000,00	APBD
120	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (bakam)	Rp 51.095.000,00	APBD
121	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (bakam)	Rp 33.100.000,00	APBD
122	Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (pudingbesar)	Rp -	APBD
123	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (pudingbesar)	Rp 38.540.000,00	APBD
124	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (belinyu)	Rp 920.331.100,00	APBD
125	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (sungailiat)	Rp 6.275.000,00	APBD
126	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (merawang)	Rp 38.443.500,00	APBD
127	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa (merawang)	Rp 20.145.000,00	APBD
128	Penyelenggaran Pemerintah Desa (merawang)	Rp 49.215.000,00	APBD
129	Pelayanan Administrasi Perkantoran (merawang)	Rp 1.025.480.500,00	APBD
130	Peningkatan Disiplin Aparatur (merawang)	Rp 7.150.000,00	APBD

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
131	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (merawang)	Rp 15.000.000,00	APBD
132	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (belinyu)	Rp 2.607.175.000,00	APBD
133	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum (belinyu)	Rp 3.101.957.400,00	APBD
134	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa (belinyu)	Rp 11.310.000,00	APBD
135	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (belinyu)	Rp 54.015.000,00	APBD
136	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (pudingbesar)	Rp 25.790.000,00	APBD
137	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (pudingbesar)	Rp 869.959.300,00	APBD
138	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (belinyu)	Rp 6.275.000,00	APBD
139	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (belinyu)	Rp 15.000.000,00	APBD
140	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (belinyu)	Rp -	APBD
141	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (bakam)	Rp 16.075.000,00	APBD
142	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (bakam)	Rp 676.025.000,00	APBD
143	Peningkatan Disiplin Aparatur (bakam)	Rp 6.275.000,00	APBD
144	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (bakam)	Rp 15.000.000,00	APBD
145	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (bappeda)	Rp 1.114.393.300,00	APBD
146	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bappeda)	Rp 90.750.000,00	APBD
147	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (bappeda)	Rp -	APBD
148	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (bappeda)	Rp 857.970.000,00	APBD
149	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (bappeda)	Rp -	APBD
150	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (pemali)	Rp 14.450.000,00	APBD
151	Pelayanan Administrasi Perkantoran (pemali)	Rp 935.116.000,00	APBD
152	Peningkatan Disiplin Aparatur (pemali)	Rp 8.150.000,00	APBD
153	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (pudingbesar)	Rp 12.950.000,00	APBD
154	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dinpanperten)	Rp 1.851.088.750,00	APBD
155	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dinpanperten)	Rp -	APBD
156	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dinpanperten)	Rp -	APBD
157	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (setwan)	Rp 40.598.282.500,00	APBD
158	Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (mendobarat)	Rp -	APBD
159	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (sungailiat)	Rp -	APBD
160	Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (merawang)	Rp -	APBD
161	Program Peningkatan Sistem Pengawasan	Rp 416.469.500,00	APBD

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
162	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (setda)	Rp 18.222.810.950,00	APBD
163	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah (setda)	Rp 3.988.327.300,00	APBD
164	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (setda)	Rp 6.287.122.000,00	APBD
165	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (setda)	Rp 25.600.000,00	APBD
166	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (setda)	Rp -	APBD
167	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Rp 51.373.500,00	APBD
168	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (setda)	Rp 186.299.000,00	APBD
169	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (setda)	Rp 387.283.600,00	APBD
170	Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (bakam)	Rp -	APBD
171	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dinkominfotik)	Rp 15.000.000,00	APBD
172	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (inspektorat)	Rp 853.626.500,00	APBD
173	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (inspektorat)	Rp 126.500.000,00	APBD
174	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (inspektorat)	Rp -	APBD
175	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (inspektorat)	Rp 104.434.000,00	APBD
176	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (inspektorat)	Rp 15.000.000,00	APBD
177	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (inspektorat)	Rp -	APBD
178	Pelayanan Administrasi Perkantoran (dinperkpp)	Rp 882.328.000,00	APBD
179	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinperkpp)	Rp 524.463.000,00	APBD
180	Peningkatan Disiplin Aparatur (dinperkpp)	Rp -	APBD
181	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (dinperkpp)	Rp 5.552.000,00	APBD
182	Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dinperkpp)	Rp -	APBD
183	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dinlh)	Rp 1.457.483.100,00	APBD
184	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinlh)	Rp 19.300.000,00	APBD
185	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dinlh)	Rp -	APBD
186	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dinlh)	Rp -	APBD
187	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dinlh)	Rp 15.000.000,00	APBD
188	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dinlh)	Rp -	APBD
189	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (setwan)	Rp 10.922.672.700,00	APBD
190	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (setwan)	Rp 2.512.733.000,00	APBD
191	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (setwan)	Rp 314.030.000,00	APBD
192	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan (setwan)	Rp 15.000.000,00	APBD
193	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (setwan)	Rp -	APBD
194	Program Peningkatan kapasitas sumber daya apratur (bakam)	Rp -	APBD

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
195	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (pudingbesar)	Rp 15.000.000,00	APBD
196	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (pudingbesar)	Rp 6.125.000,00	APBD
197	Program Peningkatan Pelayanan Publik (setda)	Rp -	APBD
198	Program Pengembangan wilayah Perbatasan (setda)	Rp 72.103.500,00	APBD
199	Program Pembakuan Rupabumi (setda)	Rp 151.466.000,00	APBD
200	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah (setda)	Rp 167.296.500,00	APBD
201	Program Penataan Daerah Otonomi Baru (setda)	Rp 6.390.000,00	APBD
202	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (setda)	Rp 3.650.000,00	APBD
203	Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (setda)	Rp 1.503.966.867,00	APBD
204	Program Peningkatan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance (setda)	Rp 251.327.500,00	APBD
205	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (dinkominfotik)	Rp 1.698.758.000,00	APBD
206	Program Pengembangan Persandian daerah (dinkominfotik)	Rp 35.072.000,00	APBD
207	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa (dinkominfotik)	Rp 2.131.451.700,00	APBD
208	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (bkpsdmd)	Rp 304.171.000,00	APBD
209	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (bkpsdmd)	Rp 218.970.000,00	APBD
210	Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (bkpsdmd)	Rp 931.179.000,00	APBD
211	Program Penataan Kelembagaan (setda)	Rp 219.097.500,00	APBD
212	Program Ketatalaksanaan (setda)	Rp 210.385.000,00	APBD
213	Program Penataan Peraturan Perundang-	Rp 718.288.000,00	APBD
214	Program Advokasi dan Bantuan Hukum (setda)	Rp 324.101.000,00	APBD
215	Program Reformasi Birokrasi (setda)	Rp 71.267.500,00	APBD
216	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BPBD)	Rp 611.815.000,00	APBD
217	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (BPBD)	Rp 126.055.000,00	APBD
218	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (BPBD)	Rp 49.700.000,00	APBD
219	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BPBD)	Rp -	APBD
220	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (BPBD)	Rp 14.600.000,00	APBD
221	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (BPBD)	Rp -	APBD
222	Program Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah (bppkad)	Rp 261.740.500,00	APBD
223	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (bppkad)	Rp 2.525.182.300,00	APBD
224	Program Optimalisasi Penerimaan Daerah dari Dana Perimbangan/ Transfer (bppkad)	Rp 290.017.500,00	APBD
225	Program Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah (bppkad)	Rp 2.004.910.700,00	APBD
226	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH (inspektorat)	Rp 1.628.322.000,00	APBD
227	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (bppkad)	Rp 3.352.716.700,00	APBD
228	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bppkad)	Rp 338.680.000,00	APBD
229	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (bppkad)	Rp -	APBD

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
230	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (bppkad)	Rp -	APBD
231	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (bppkad)	Rp 4.542.600.700,00	APBD
232	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (bppkad)	Rp 1.051.726.000,00	APBD
233	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (bppkad)	Rp 28.144.000,00	APBD
234	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (satpolpp)	Rp 538.900.000,00	APBD
235	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan (satpolpp)	Rp 9.170.000,00	APBD
236	Peningkatan Disiplin Aparatur (satpolpp)	Rp 382.812.000,00	APBD
237	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (satpolpp)	Rp 26.247.650,00	APBD
238	Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bencana Kebakaran (satpolpp)	Rp 1.591.112.200,00	APBD
239	Program Penanganan, Penanggulangan dan Rekonstruksi Bencana (BPBD)	Rp 40.950.000,00	APBD
240	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (BPBD)	Rp 6.824.960.000,00	APBD
241	Program Sumber Daya Kesehatan (dinkes)	Rp 72.597.781.274,00	APBD, DAK
242	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum Kesehatan (dinkes)	Rp 64.016.243.261,00	APBD
243	Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat (dinkes)	Rp 21.949.528.842,00	APBD
244	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Rp 5.700.000,00	APBD
245	Program Upaya Kesehatan Perorangan (dinkes)	Rp 31.606.875.790,00	APBD
246	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (dinkes)	Rp 6.447.973.400,00	APBD
247	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (dinkes)	Rp 13.272.840.789,00	APBD
248	Program Pengawasan Obat dan Makanan (dinkes)	Rp 237.781.000,00	APBD
249	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik (dinpmp2kukm)	Rp 211.750.000,00	APBD
250	Program Pembangunan Gedung dan Penataan (dpupr)	Rp 9.310.860.000,00	APBD
251	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (dinperkpp)	Rp 316.613.000,00	APBD
252	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan (dinperkpp)	Rp 164.996.000,00	APBD
253	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (dkp)	Rp 43.763.000,00	APBD
254	Program Revitalisasi Pengembangan Perpustakaan Umum (dkp)	Rp -	APBD
255	Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber daya Insani (setda)	Rp 1.774.196.000,00	APBD
256	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan (setda)	Rp 15.775.000,00	APBD
257	Program Peningkatan Pelayanan Publik (mendobarat)	Rp 23.975.000,00	APBD
258	Program Pengembangan Wawasan kebangsaan (kesbangpol)	Rp 34.673.000,00	APBD
259	Program Peningkatan Pelayanan Publik (sungailiat)	Rp 35.550.000,00	APBD
260	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (belinyu)	Rp 56.960.000,00	APBD
261	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (belinyu)	Rp -	APBD
262	Program Peningkatan Pelayanan Publik (PATEN) (belinyu)	Rp 20.174.000,00	APBD
263	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (sungailiat)	Rp 49.200.000,00	APBD

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
264	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (sungailiat)	Rp 17.115.900,00	APBD
265	Pelayanan Administrasi Perkantoran (dindukpencapil)	Rp 2.161.062.500,00	APBD
266	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dindukpencapil)	Rp 73.400.000,00	APBD
267	Penataan Administrasi Kependudukan (dindukpencapil)	Rp 1.691.122.000,00	APBD
268	Peningkatan Disiplin Aparatur (dindukpencapil)	Rp 8.950.000,00	APBD
269	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur (dindukpencapil)	Rp -	APBD
270	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja KEuangan (dindukpencapil)	Rp 15.000.000,00	APBD
271	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dindukpencapil)	Rp -	APBD
272	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bakam)	Rp 10.050.000,00	APBD
273	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (merawang)	Rp -	APBD
274	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur (merawang)	Rp -	APBD
275	Peningkatan Pelayanan Publik (merawang)	Rp 57.403.500,00	APBD
276	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik (pemali)	Rp 45.050.000,00	APBD
277	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (pemali)	Rp -	APBD
278	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (pemali)	Rp 11.300.000,00	APBD
279	Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (pemali)	Rp -	APBD
280	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (pemali)	Rp 35.410.000,00	APBD
281	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (pemali)	Rp 30.610.000,00	APBD
282	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa (pemali)	Rp 6.415.000,00	APBD
283	Pelayanan Administrasi Perkantoran (riausilip)	Rp 706.020.000,00	APBD
284	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (riausilip)	Rp 15.000.000,00	APBD
285	Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (riausilip)	Rp -	APBD
286	Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam (setda)	Rp 2.240.000,00	APBD
287	Peningkatan Pelayanan Publik (riausilip)	Rp 100.385.000,00	APBD
288	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (riausilip)	Rp 20.000.000,00	APBD
289	Peningkatan Disiplin Aparatur (riausilip)	Rp 5.875.000,00	APBD
290	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (riausilip)	Rp 5.000.000,00	APBD
291	Penyelenggaraan Pemerintah Desa (riausilip)	Rp 38.055.000,00	APBD
292	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Rp 41.060.000,00	APBD
293	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (riausilip)	Rp 10.000.000,00	APBD
294	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (setda)	Rp 134.228.685,00	APBD
295	Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur (mendobarat)	Rp -	APBD
296	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (mendobarat)	Rp 72.438.500,00	APBD
297	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah (dinkominfotik)	Rp 14.562.200,00	APBD

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
298	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan (satpolppl)	Rp 92.895.000,00	APBD
299	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan (kesbangpol)	Rp 4.745.750,00	APBD
300	Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) (kesbangpol)	Rp 2.733.700,00	APBD
301	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik (pudingbesar)	Rp 30.110.000,00	APBD
302	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (pudingbesar)	Rp 10.050.000,00	APBD
303	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (pudingbesar)	Rp 9.300.000,00	APBD
304	Program Peningkatan Pelayanan Publik (bakam)	Rp 27.410.000,00	APBD
305	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp 3.722.389.500,00	APBD
306	Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	Rp 61.165.756.283,00	APBD, DAK
307	Pendidikan Anak Usia Dini (dindikpora)	Rp 2.451.910.200,00	APBD, DAK
308	Pendidikan Non Formal (dindikpora)	Rp 1.337.297.000,00	APBD, DAK
309	Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar (dindikpora)	Rp 932.540.750,00	APBD
310	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya (dindikpora)	Rp -	APBD
311	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (dindikpora)	Rp 16.842.822.500,00	APBD
312	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak (dinkes)	Rp 60.125.000,00	APBD
313	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita (dinkes)	Rp 18.022.000,00	APBD
314	Program Pencegahan dan Penanggulangan	Rp 2.429.154.047,00	APBD
315	Program Pengembangan Lingkungan Sehat (dinkes)	Rp 148.161.811,00	APBD
316	Program Upaya Kesehatan Masyarakat (dinkes)	Rp 15.295.243.387,00	APBD
317	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (dinkes)	Rp 842.165.000,00	APBD
318	Program Perbaikan Gizi Masyarakat (dinkes)	Rp 1.280.135.000,00	APBD
319	Program Peningkatan Keamanan Pangan	Rp 1.825.000,00	APBD
320	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp 15.210.000,00	APBD
321	Program Pengembangan Pola Pangan (dinpanperten)	Rp 4.900.000,00	APBD
322	Program Peningkatan Bahan Makanan (dinpanperten)	Rp 47.630.000,00	APBD
323	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (dp2kbp3a)	Rp 21.945.000,00	APBD
324	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri (dp2kbp3a)	Rp 85.798.000,00	APBD
325	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan Konseling KRR (dp2kbp3a)	Rp -	APBD
326	Program Peningkatan peran serta dan	Rp 37.325.000,00	APBD
327	Program Keluarga Berencana (dp2kbp3a)	Rp 3.200.511.000,00	APBD
328	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (dp2kbp3a)	Rp 466.571.000,00	APBD
329	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 4.858.427.500,00	APBD, DAK
330	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (dpupr)	Rp 1.196.400.000,00	APBD
331	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (dpupr)	Rp 12.681.449.275,00	APBD, DAK
332	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan (dpupr)	Rp 617.831.000,00	APBD, DAK
333	Program Pembangunan sistem informasi/data base Jalan dan Jembatan (dpupr)	Rp 583.000.000,00	APBD
334	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya (dpupr)	Rp 3.150.927.000,00	APBD, DAK
335	program penataan , Pengusaan Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah (dpupr)	Rp 300.000.000,00	APBD

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
336	Program Pembangunan turap/talud/bronjong (dpupr)	Rp 172.705.000,00	APBD
337	Program Lingkungan Sehat Perumahan (dpupr)	Rp 150.000.000,00	APBD
338	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (dpupr)	Rp 340.000.000,00	APBD
339	Program Pengendalian Banjir (dpupr)	Rp 1.053.715.000,00	APBD
340	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (dinhub)	Rp 3.898.662.000,00	APBD
341	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (dinhub)	Rp 164.020.000,00	APBD
342	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (dinhub)	Rp 147.828.980,00	APBD
343	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas (dinhub)	Rp 420.600.000,00	APBD
344	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (dpupr)	Rp 1.263.302.500,00	APBD, DAK
345	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (dinperkpp)	Rp 1.921.466.300,00	APBD
346	Pengembangan Perumahan (dinperkpp)	Rp 123.265.000,00	APBD
347	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (dinperkpp)	Rp 8.900.000,00	APBD
348	Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (dinperkpp)	Rp 368.520.000,00	APBD
349	Program peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah (dinperkpp)	Rp 1.178.926.800,00	APBD, DAK
350	Pengembangan data/Informasi Permukiman (dinperkpp)	Rp 135.460.000,00	APBD
351	Pengembangan Nilai Budaya (dinparbudaya)	Rp 130.060.000,00	APBD
352	Pengelolaan Kekayaan Budaya (dinparbudaya)	Rp 186.175.750,00	APBD
353	Program Pengelolaan Keragaman Budaya (dinparbudaya)	Rp -	APBD
354	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (dinparbudaya)	Rp 428.969.800,00	APBD
355	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (dinparbudaya)	Rp 1.515.445.000,00	APBD
356	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan (dindikpora)	Rp 218.927.000,00	APBD
357	Program Pengembangan Kemitraan (dinparbudaya)	Rp 19.600.000,00	APBD
358	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (dinparbudaya)	Rp 179.821.065,00	APBD
359	Pengembangan Pariwisata (dinparbudaya)	Rp 190.885.935,00	APBD
360	Program Pembinaan dan Pemasarakatan	Rp 680.985.000,00	APBD
361	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan	Rp 19.685.000,00	APBD
362	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp 807.420.000,00	APBD
363	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (dinpmp2kukm)	Rp 37.600.000,00	APBD
364	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan (dinpanperten)	Rp 194.795.000,00	APBD
365	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak (dinpanperten)	Rp 381.955.000,00	APBD
366	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (dinpanperten)	Rp 3.092.136.000,00	APBD
367	Program Pengembangan Budidaya	Rp 786.288.000,00	APBD
368	Program Pengembangan Data/ Informasi (Dinperkan)	Rp 2.760.000,00	APBD
369	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan tangkap (Dinperkan)	Rp 1.852.945.000,00	APBD, DAK
370	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Perikanan (Dinperkan)	Rp 60.150.000,00	APBD

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
371	Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat Perikanan (Dinperkan)	Rp 4.745.000,00	APBD
372	Program Perlindungan Nelayan dan Permbudidaya Ikan (Dinperkan)	Rp 194.541.500,00	APBD
373	Program Optimalisasi Pemasaran Produksi Hasil Perikanan (Dinperkan)	Rp 67.229.100,00	APBD
374	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (dinpanperten)	Rp 72.085.000,00	APBD
375	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan (dinpanperten)	Rp 91.539.000,00	APBD
376	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (dinpanperten)	Rp 1.127.330.000,00	APBD
377	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan (dinpanperten)	Rp 718.942.500,00	APBD
378	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan (dinpanperten)	Rp 844.460.000,00	APBD
379	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha	Rp 2.808.260.000,00	APBD
380	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah (dinpmp2kukm)	Rp 207.615.000,00	APBD
381	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial (dinakerperindag)	Rp 35.000.000,00	APBD
382	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (dinpmp2kukm)	Rp 223.093.000,00	APBD
383	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (dinsos)	Rp 165.657.800,00	APBD
384	Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma (dinsos)	Rp 111.598.000,00	APBD
385	Program Pemberdayaan Panti asuhan/Panti Jompo (dinsos)	Rp 116.075.000,00	APBD
386	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (setda)	Rp 37.948.000,00	APBD
387	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (dinsos)	Rp 482.845.000,00	APBD
388	Program Penanganan, Penanggulangan dan Rekonstruksi Bencana (dinsos)	Rp 399.030.000,00	APBD
389	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (dinsos)	Rp 24.960.958.000,00	APBD
390	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (dinpemdes)	Rp 3.127.499.800,00	APBD
391	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (dinpemdes)	Rp 60.147.200,00	APBD
392	Program Pengembangan dan Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna (dinpemdes)	Rp 38.304.000,00	APBD
393	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (dinakerperindag)	Rp 46.480.000,00	APBD
394	Peningkatan Kesempatan Kerja (dinakerperindag)	Rp 41.590.000,00	APBD
395	Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi (dinakerperindag)	Rp 2.964.235.000,00	APBD
396	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (dinakerperindag)	Rp 371.215.000,00	APBD
397	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (dinakerperindag)	Rp 177.460.000,00	APBD
398	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (dinakerperindag)	Rp 1.246.825.000,00	APBD
399	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (dinakerperindag)	Rp 51.065.200,00	APBD
400	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (dinpemdes)	Rp 224.695.000,00	APBD
401	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (dinpemdes)	Rp 112.096.250,00	APBD
402	Program Penataan Desa (dinpemdes)	Rp 103.704.000,00	APBD

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
403	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (dinpemdes)	Rp 79.875.000,00	APBD
404	Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup (dinlh)	Rp 272.837.500,00	APBD
405	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (dinlh)	Rp 4.287.000,00	APBD
406	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (dinlh)	Rp 4.597.000,00	APBD
407	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (dinlh)	Rp 84.424.322,22	
408	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (dinlh)	Rp 7.149.851.800,00	APBD, DAK
409	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (dinlh)	Rp 1.415.312.450,00	APBD
410	Program Perencanaan Tata Ruang (dpupr)	Rp 289.690.000,00	APBD
411	Program Pemanfaatan Ruang (dpupr)	Rp 658.700.000,00	APBD
412	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang (dpupr)	Rp 30.000.000,00	APBD
TOTAL		Rp 27.140.067.608,22	



Anggailiat, 22 Juli 2020

BUPATI BANGKA,

MULKAN, SH, MH

MATRIK FORMULA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

Sasaran	No	Indikator	Cara Pengukuran	Kinerja			
				Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Bangka	BB	BB	BB	100,00
	2	Indeks SPBE	Hasil Evaluasi SPBE oleh Kemenpan RB	2,77	2,60	2,77	106,54
	3	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Standar Profesionalitas ASN yang terdiri dari 4 dimensi yakni a) Kualifikasi; b) Kompetensi; c) Disiplin; dan d) Kinerja	63,64	65,97	63,64	96,47
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	4	Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	100,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	78,47	74,77	78,47	104,95
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	6	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Hasil Pengukuran yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik	8,24	8,23	8,24	100,12
	7	Angka Harapan Lama Sekolah	Hasil Pengukuran yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik	12,77	12,76	12,77	100,08
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	8	Angka Harapan Hidup	Hasil Pengukuran yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik	71,06	70,99	71,06	100,10
	9	Angka Stunting	$= \frac{\text{Jumlah Baduta Stunting}}{\text{Jumlah Baduta}} \times 100\%$	$= \frac{145}{9.678} \times 100\%$	3,82	1,50	160,73
Meningkatnya Kesenjangan Gender	10	Indeks Pemberdayaan Gender	$IDG = \frac{I(per) + I(DM) + I(inc-dis)}{3}$	88,49	73,90	88,49	119,74
Meningkatnya Perlindungan Pemenuhan Hak-hak anak	11	Status Kabupaten Layak anak	Hasil Penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pratama	Pratama	Pratama	100,00
Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	12	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	$= \frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Baik}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$	$= \frac{574.877}{734.501} \times 100\%$	74,59	78,26	104,92
	13	Proporsi Panjang Jaringan Jembatan dalam Kondisi Baik	$= \frac{\text{Panjang Jembatan Kondisi Baik}}{\text{Panjang Jembatan Kabupaten}} \times 100\%$	$= \frac{888}{947} \times 100\%$	93,77	93,77	100,00
	14	Proporsi jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	$= \frac{\text{Luas Irigasi Kondisi Baik}}{\text{Luas Irigasi Kabupaten}} \times 100\%$	$= \frac{2.259}{2.284} \times 100\%$	98,91	98,91	100,00
Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	15	Persentase Masyarakat yang Terlayani Sanitasi Dasar	$= \frac{\text{Jumlah Rumah Tinggal yang Berakses Sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tinggal}} \times 100\%$	$= \frac{87.503}{90.998} \times 100\%$	95,12	96,16	101,09
	16	Persentase Masyarakat yang Memiliki Akses Air Bersih	$= \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	$= \frac{90.770}{90.998} \times 100\%$	98,71	99,75	101,05
	17	Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik	$= \frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten ber HGB/HGL}} \times 100\%$	$= \frac{98.073,60}{302.879,47} \times 100\%$	32,38	32,38	100,00
	18	Persentase Masyarakat Miskin yang Terlayani rumah Layak Huni	$= \frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$	$= \frac{78.289}{79.686} \times 100\%$	97,40	98,25	100,87
	19	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	$= \frac{\text{Luas Lingkungan Permukiman Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$	$= \frac{49,27}{302,069} \times 100\%$	0,016	0,016	100,00
Meningkatnya pengembangan kepariwisataan berbasis sport tourism, kearifan dan budaya lokal serta sumber daya alam pariwisata	20	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	$= \frac{(\text{Jumlah Wisatawan } (t+1) - \text{Jumlah Wisatawan } (t-1))}{\text{Jumlah Wisatawan } (t-1)} \times 100$	$= \frac{91.558 - 90.364}{90.364} \times 100\%$	1,49	1,32	88,68
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto	21	Persentase kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Hasil Pengukuran yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik	19,46	19,79	21,35	107,88
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	22	Peningkatan PDRB perkapita	Hasil Pengukuran yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik	-0,65	-0,69	-0,65	105,80
Menurunnya Angka Kemiskinan	23	Persentase Angka Kemiskinan	Hasil Pengukuran yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik	4,51	4,99	4,51	109,62
	24	Angka Pengangguran Terbuka	Hasil Pengukuran yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik	5,42	5,43	5,42	100,18
Meningkatnya peran serta Desa dalam mendorong perekonomian daerah	25	persentase desa swasembada	$= \frac{\text{Jumlah Desa Swasembada}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	$= \frac{15}{62} \times 100\%$	25,81	24,19	93,75
Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	26	Indeks Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	$IKLH\ 2020 = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	$IKLH = (0,376 \times 51,43) + (0,405 \times 86,67) + (0,219 \times 35,54)$	63,07	62,22	98,65
	27	Ketaatan terhadap RTRW	$= \frac{\text{Jumlah Advice Planning yang disetujui}}{\text{Jumlah Usulan Advice Planning}} \times 100\%$	$= \frac{9.668,67}{9.668,67} \times 100\%$	100,00	100,00	100,00
Rataan							103,75

MATRIKS PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%
							non program (dinkes)	0,00	49.622.174.878,80	
							non program (dindikpora)	0,00	11.316.748.104,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	BB	BB	BB	100,00	Pelayanan Administrasi Perkantoran (salpolog)	710.594.800,00	686.945.318,00	96,67
	2	Indeks SPBE	2,47	2,60	2,77	106,54	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (salpolog)	239.650.000,00	238.150.000,00	99,37
	3	Indeks Profesionalitas ASN	67,26	65,97	63,64	96,47	Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (astuhlon)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan (astuhlon)	14.700.000,00	13.500.000,00	91,84
							Program Pembinaan, Penyuluhan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (astuhlon)	8.876.885.000,00	8.860.523.503,00	99,82
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dinkes)	1.658.347.300,00	1.543.588.106,00	93,08
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dinkes)	15.000.000,00	14.995.800,00	99,97
							Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Rambangunan Daerah (dinkes)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
							Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dinkes)	1.126.340.000,00	1.067.840.889,00	94,81
							Pelayanan Administrasi Perkantoran (dinkes)	77.400.000,00	74.750.000,00	96,58
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan Disiplin Aparatur (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dinkes)	6.825.000,00	6.825.000,00	100,00
							Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Rambangunan Daerah (dinkes)	591.884.000,00	535.427.211,00	90,46
							Program Perencanaan Pembangunan Daerah (dinkes)	432.141.750,00	321.936.301,00	74,50
							Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (dinkes)	175.806.000,00	172.140.104,00	97,91
							Program Pengembangan Data/Informasi (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (dinkes)	35.370.000,00	21.506.800,00	60,81
							Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya (dinkes)	126.876.000,00	100.549.815,00	79,25
							Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam (dinkes)	65.400.000,00	59.095.200,00	90,36
							Program Penelitian dan Pengembangan (dinkes)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
							Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dinkes)	5.808.386.500,00	5.195.230.293,00	89,44
							Pelayanan Administrasi Perkantoran (dindikpora)	501.749.800,00	479.655.400,00	95,60
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dindikpora)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan Disiplin Aparatur (dindikpora)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dindikpora)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dindikpora)	30.610.000,00	30.520.000,00	99,71
							Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi (dindikpora)	0,00	0,00	0,00
							Rambangunan Daerah (dindikpora)	24.000.000,00	23.563.000,00	98,18
							Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Asip Daerah (dinkes)	10.435.000,00	10.052.500,00	96,33
							Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Keagamaan (dinkes)	12.175.000,00	11.846.500,00	97,30
							Program peningkatan kualitas pelayanan informasi (dinkes)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
							Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dinkes)	1.272.860.146,00	1.185.995.571,00	93,18
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dinkes)	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
							Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dinkes)	15.000.000,00	13.714.200,00	91,43
							Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Rambangunan Daerah (dinkes)	930.871.370,00	877.979.038,00	94,32
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dinkes)	34.750.000,00	33.887.000,00	97,52
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dinkes)	15.000.000,00	14.997.350,00	99,98
							Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Rambangunan Daerah (dinkes)	3.915.492.100,00	3.642.386.455,00	93,02
							Pelayanan Administrasi Perkantoran (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan Disiplin Aparatur (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dinkes)	20.145.700,00	20.145.679,00	100,00
							Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dinkes)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
							Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Rambangunan Daerah (dinkes)	1.221.694.475,00	1.172.271.090,00	95,95
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dinkes)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinkes)	0,00	0,00	0,00

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dka)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dka)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Dka) (dka)	15.000.000,00	14.757.500,00	98,38
							Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dka)	0,00	0,00	0,00
							Program Administrasi Perkantoran (dincabudaya)	1.556.174.950,00	1.529.943.972,00	98,31
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dincabudaya)	27.830.000,00	27.830.000,00	100,00
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dincabudaya)	0,00	0,00	0,00
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dinpemdes)	644.154.000,00	595.975.271,00	92,52
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinpemdes)	87.554.200,00	86.678.700,00	99,00
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dinpemdes)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dinpemdes)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja (dinpemdes)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
							Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dinpemdes)	0,00	0,00	0,00
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dkpsmd)	1.218.232.500,00	1.118.085.752,00	91,78
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dkpsmd)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dkpsmd)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dkpsmd)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dkpsmd)	15.000.000,00	14.968.400,00	99,79
							Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dkpsmd)	14.890.000,00	13.690.000,00	91,94
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dkpsmd)	578.390.000,00	564.377.500,00	97,58
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dkpsmd)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur (dkpsmd)	30.000.000,00	15.541.500,00	51,81
							Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dkpsmd)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Infrastruktur Pemerintahan Daerah (dkpsmd)	1.281.710.000,00	1.229.590.955,00	95,93
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dkpsmd)	2.484.628.725,00	2.061.976.021,00	82,99
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dkpsmd)	1.487.123.000,00	1.326.409.673,00	89,19
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dkpsmd)	282.593.000,00	275.749.600,00	97,58
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dkpsmd)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dkpsmd)	8.625.219,00	8.625.219,00	100,00
							Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dkpsmd)	15.000.000,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dkpsmd)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dkpsmd)	15.000.000,00	14.700.000,00	98,00
							Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dkpsmd)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan Disiplin Aparatur (dkpsmd)	0,00	0,00	0,00
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dkpsmd)	1.175.960.460,00	1.097.701.220,00	93,35
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dkpsmd)	104.051.000,00	87.407.000,00	84,00
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dkpsmd)	21.400.000,00	19.500.000,00	91,12
							Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dkpsmd)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dkpsmd)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (mendoharaji)	16.465.000,00	16.465.000,00	100,00
							Pelayanan administrasi perkantoran (mendoharaji)	1.103.474.300,00	1.087.863.551,00	98,59
							Peningkatan disiplin aparatur (mendoharaji)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (mendoharaji)	24.590.000,00	24.250.000,00	98,62
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa (mendoharaji)	19.690.000,00	19.685.000,00	99,97
							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (mendoharaji)	49.070.000,00	48.940.000,00	99,74
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dp2kba3a)	1.417.911.500,00	1.383.764.265,00	97,59
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dp2kba3a)	1.143.930.000,00	1.050.328.896,00	91,82
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dp2kba3a)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dp2kba3a)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dp2kba3a)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
							Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (dp2kba3a)	0,00	0,00	0,00
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (keshanopoli)	364.175.800,00	351.839.267,00	96,61
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (keshanopoli)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (keshanopoli)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (keshanopoli)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja (keshanopoli)	15.000.000,00	14.971.400,00	99,81
							Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (keshanopoli)	0,00	0,00	0,00

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (surpalliat)	1.046.091.412,00	990.610.822,00	94,70
							Program Peningkatan dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (surpalliat)	14.775.000,00	14.750.000,00	99,83
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (sungailiat)	4.436.960.000,00	4.230.707.421,00	95,35
							Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum (surpalliat)	5.742.150.888,00	5.535.080.001,00	96,39
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa (surpalliat)	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (surpalliat)	42.860.000,00	42.690.000,00	99,60
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (surpalliat)	51.095.000,00	50.975.000,00	99,77
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (bakam)	33.100.000,00	32.340.000,00	97,70
							Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (audiobasari)	0,00	0,00	0,00
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (audiobasari)	38.540.000,00	37.855.000,00	98,22
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (belinyu)	920.331.100,00	884.488.544,00	96,11
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (surpalliat)	6.275.000,00	6.275.000,00	100,00
							Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (merawano)	38.443.500,00	37.490.100,00	97,52
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa (merawano)	20.145.000,00	20.050.000,00	99,53
							Penyelenggaraan Pemerintah Desa (merawano)	49.215.000,00	49.155.000,00	99,88
							Pelayanan Administrasi Perkantoran (merawano)	1.025.480.500,00	983.791.334,00	95,93
							Peningkatan Disiplin Aparatur (merawano)	7.150.000,00	7.150.000,00	100,00
							Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (merawano)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (belinyu)	2.607.175.000,00	2.507.838.750,00	96,19
							Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum (belinyu)	3.101.957.400,00	3.051.357.951,00	98,37
							Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa (belinyu)	11.310.000,00	8.865.000,00	78,38
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (belinyu)	54.015.000,00	49.890.000,00	92,36
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (audiobasari)	25.790.000,00	25.758.000,00	99,88
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (audiobasari)	869.959.300,00	843.543.530,00	96,96
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (belinyu)	6.275.000,00	6.275.000,00	100,00
							Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (belinyu)	15.000.000,00	14.997.800,00	99,99
							Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (belinyu)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (bakam)	16.075.000,00	13.665.000,00	85,01
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (bakam)	676.025.000,00	642.812.147,00	95,09
							Peningkatan Disiplin Aparatur (bakam)	6.275.000,00	6.275.000,00	100,00
							Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (bakam)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (hanoedea)	1.114.393.300,00	951.571.564,00	85,39
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar (hanoedea)	90.750.000,00	73.672.000,00	81,18
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (hanoedea)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (hanoedea)	857.970.000,00	828.070.000,00	96,52
							Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (hanoedea)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (hanoedea)	14.450.000,00	13.950.000,00	96,54
							Pelayanan Administrasi Perkantoran (jemali)	935.116.000,00	880.403.614,00	94,15
							Peningkatan Disiplin Aparatur (jemali)	8.150.000,00	8.150.000,00	100,00
							Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (audiobasari)	12.950.000,00	12.920.000,00	99,77
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (minnaperdan)	1.851.088.750,00	1.801.080.227,00	97,30
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (minnaperdan)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (minnaperdan)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (adabeni)	40.598.282.500,00	34.361.762.449,00	84,64
							Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (amandoharati)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (surpalliat)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (merawano)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KPH (setlita)	416.469.500,00	395.414.999,00	94,94
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (setlita)	18.222.810.950,00	17.654.708.888,00	96,88
							Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah (setlita)	3.988.327.300,00	3.856.876.256,00	96,70
							Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (setlita)	6.287.122.000,00	5.905.999.619,00	93,94
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (setlita)	25.600.000,00	25.541.000,00	99,77
							Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (setlita)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan (setlita)	51.373.500,00	37.181.500,00	72,37
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (setlita)	186.239.000,00	131.496.950,00	70,58
							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (setlita)	387.283.600,00	386.126.556,00	99,70

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%
							Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi (Bantuanun Daerah (bakam))	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dikominfo)	15.000.000,00	14.750.000,00	98,33
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (inspektabr)	853.626.500,00	714.350.293,00	83,68
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (inspektabr)	126.500.000,00	124.479.999,99	98,40
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (inspektabr)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (inspektabr)	104.434.000,00	102.816.150,00	98,45
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (inspektabr)	15.000.000,00	14.378.000,00	95,85
							Program Peningkatan Pengembangan Potensi (Bantuanun Daerah (inspektabr))	0,00	0,00	0,00
							Pelayanan Administrasi Perkantoran (diperkop)	862.328.000,00	805.784.198,00	91,32
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (diperkop)	524.463.000,00	495.690.000,00	94,51
							Peningkatan Disiplin Aparatur (diperkop)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (diperkop)	5.552.000,00	5.552.000,00	100,00
							Peningkatan Pengembangan Potensi (Bantuanun Daerah (diperkop))	0,00	0,00	0,00
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (dirih)	1.457.483.100,00	1.430.339.610,66	98,14
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dirih)	19.300.000,00	18.825.000,00	97,54
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (dirih)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dirih)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dirih)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
							Program Peningkatan Pengembangan Potensi (Bantuanun Daerah (dirih))	0,00	0,00	0,00
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (satwan)	10.922.672.700,00	10.297.232.270,00	94,27
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (satwan)	2.512.733.000,00	2.322.430.580,00	92,43
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (satwan)	314.030.000,00	303.631.000,00	96,69
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (satwan)	15.000.000,00	13.940.000,00	92,93
							Program Peningkatan Pengembangan Potensi (Bantuanun Daerah (satwan))	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (bakam)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (sawidobesat)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (pudindobesat)	6.125.000,00	6.125.000,00	100,00
							Program Peningkatan Pelayanan Publik (setda)	72.103.500,00	67.815.079,00	94,05
							Program Pengembangan wilayah Kabupaten (setda)	72.103.500,00	67.815.079,00	94,05
							Program Pembakuan Rapabumi (setda)	151.466.000,00	124.699.685,00	82,33
							Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah (setda)	167.296.500,00	133.584.665,00	79,85
							Program Penataan Daerah Otonom Baru (setda)	6.390.000,00	6.390.000,00	100,00
							Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (setda)	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00
							Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (setda)	1.503.966.867,00	1.479.933.817,00	98,40
							Program Peningkatan dan Peningkatan Prinsip-Prinsip Good Governance (setda)	251.327.500,00	238.587.873,00	94,93
							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (dikominfo)	1.698.758.000,00	1.601.823.719,00	94,29
							Program Pengembangan Peningkatan dan Pengembangan (dikominfo)	35.072.000,00	32.691.600,00	93,21
							Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa (dikominfo)	2.131.451.700,00	1.901.465.832,00	89,21
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (bkesdmd)	304.171.000,00	106.245.037,00	34,93
							Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (bkesdmd)	218.970.000,00	213.182.438,00	97,36
							Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (bkesdmd)	931.179.000,00	814.139.714,00	87,43
							Program Penataan Kelembagaan (setda)	219.097.500,00	218.908.572,00	99,91
							Program Ketelaaksanaan (setda)	210.385.000,00	198.877.413,00	94,53
							Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (setda)	718.288.000,00	660.777.330,00	91,99
							Program Advokasi dan Bantuan Hukum (setda)	324.101.000,00	265.590.800,00	81,95
							Program Reformasi Birokrasi (setda)	71.267.500,00	71.218.483,00	99,93
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (RPRD)	611.815.000,00	551.429.048,00	90,13
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (RPRD)	126.055.000,00	121.036.000,00	96,02
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (RPRD)	49.700.000,00	49.210.000,00	98,01
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (RPRD)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (RPRD)	14.600.000,00	13.100.000,00	89,73
							Program Peningkatan Pengembangan Potensi (Bantuanun Daerah (RPRD))	0,00	0,00	0,00
							Rata-rata sasaran	166.850.377.462,00	153.656.027.023,65	92,09
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	4	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	WTP	WTP	WTP	100,00	Program Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah (bopkad)	261.740.500,00	163.346.024,00	62,41
							Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (bopkad)	2.525.182.300,00	1.864.809.423,00	73,85
							Program Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Dana Perimbangan/ Transfer (bopkad)	290.017.500,00	186.513.636,00	64,31
							Program Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah (bopkad)	2.004.910.700,00	1.859.160.653,00	92,73
							Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH (bopkad)	1.628.322.000,00	1.215.708.100,00	74,66
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (bopkad)	3.352.716.700,00	2.762.938.410,00	82,41
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bopkad)	338.680.000,00	269.422.000,00	79,55

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur (bopkadi)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (hinkatl)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (hinkatl)	4.542.600.700,00	3.595.820.956,00	79,16
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (hinkatl)	1.051.726.000,00	913.100.900,00	86,82
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (bopkadi)	28.144.000,00	14.833.700,00	52,71
		Rataan Sasaran						16.024.040.400,00	12.845.653.802,00	80,16
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat	5	Indeks kepuasan masyarakat	74,07	74,77	78,47	104,95	Pemeliharaan Kantaribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (satpolpp)	538.900.000,00	421.590.803,00	78,23
							Pembertayaan Masyarakat untuk Menjaga Keterlibatan dan Keamanan (satpolinn)	9.170.000,00	9.170.000,00	100,00
							Peningkatan Disiplin Aparatur (satpolinn)	382.812.000,00	382.544.979,00	99,93
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (satpolinn)	26.247.650,00	26.247.650,00	100,00
							Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bencana Kebakaran (satpolinn)	1.591.112.200,00	1.588.787.806,00	99,85
							Program Penanganan, Penanggulangan dan Rekonstruksi Bencana (RBBN)	40.950.000,00	12.427.000,00	30,35
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (RBBN)	6.824.960.000,00	6.392.268.783,00	93,66
							Program Sumber Daya Kesehatan (dinkes)	72.597.781.274,00	67.773.549.797,99	93,35
							Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum Kesehatan (dinkes)	64.016.243.261,00	0,00	0,00
							Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat (dinkes)	21.949.528.842,00	19.442.922.563,90	88,58
							Program Pengembangan Obat Asli Indonesia (dinkes)	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00
							Program Upaya Kesehatan Perorangan (dinkes)	31.606.875.790,00	28.363.793.174,09	89,74
							Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (dinkes)	6.447.973.400,00	5.820.107.012,00	90,26
							Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (dinkes)	13.272.840.789,00	13.221.107.387,00	99,61
							Program Pengawasan Obat dan Makanan (dinkes)	237.781.000,00	213.494.000,00	89,79
							Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik (dinnom/dukum)	211.750.000,00	207.305.000,00	97,90
							Program Pembangunan Gedung dan Bangunan (dinnom)	9.310.860.000,00	9.177.559.986,40	98,57
							Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (dinnom)	316.613.000,00	294.405.000,00	92,99
							Penyelesaian Konflik-konflik Masyarakat (dinnom)	164.996.000,00	154.328.500,00	93,53
							Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (dtkn)	43.763.000,00	41.554.100,00	94,95
							Program Revisulasi Pengembangan Perpustakaan Umum (dtkn)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber daya (kebang)	1.774.196.000,00	1.506.577.137,00	84,92
							Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan (kebang)	15.775.000,00	15.625.500,00	99,05
							Program Peningkatan Pelayanan Publik (mendobagat)	23.975.000,00	23.900.000,00	99,69
							Program Pengembangan Wawasan kebangsaan (kebangpol)	34.673.000,00	34.056.500,00	98,22
							Program Peningkatan Pelayanan Publik (kebangpol)	35.550.000,00	35.550.000,00	100,00
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (balinnu)	56.960.000,00	49.850.000,00	87,52
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (balinnu)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pelayanan Publik (PALS) (balinnu)	20.174.000,00	20.052.000,00	99,40
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (sunqallat)	49.200.000,00	48.177.000,00	97,92
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (sunqallat)	17.115.900,00	17.115.900,00	100,00
							Pelayanan Administrasi Perkantoran (indukkecapai)	2.161.062.500,00	2.046.900.590,00	94,72
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (indukkecapai)	73.400.000,00	71.700.000,00	97,68
							Penataan Administrasi (indukkecapai)	1.691.122.000,00	1.563.535.572,00	91,86
							Peningkatan Disiplin Aparatur (indukkecapai)	8.950.000,00	8.950.000,00	100,00
							Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur (indukkecapai)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja KEuangan (indukkecapai)	15.000.000,00	14.300.000,00	95,33
							Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (indukkecapai)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bakam)	10.050.000,00	10.050.000,00	100,00
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (merawano)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (merawano)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan Pelayanan Publik (merawano)	57.403.500,00	57.390.000,00	99,98
							Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik (jemali)	45.050.000,00	45.030.000,00	99,96
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (jemali)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (jemali)	11.300.000,00	0,00	0,00
							Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (jemali)	0,00	0,00	0,00
							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (jemali)	35.410.000,00	35.370.000,00	99,89
							Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (jemali)	30.610.000,00	29.470.000,00	96,28
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa (jemali)	6.415.000,00	6.415.000,00	100,00
							Pelayanan Administrasi Perkantoran (jauwili)	706.020.000,00	690.040.242,00	97,74
							Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (jauwili)	15.000.000,00	14.800.000,00	98,67
							Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (jauwili)	0,00	0,00	0,00
							Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam (selita)	2.240.000,00	2.215.000,00	98,88
							Peningkatan Pelayanan Publik (jauwili)	100.385.000,00	99.908.736,00	99,53
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (jauwili)	20.000.000,00	19.350.000,00	96,75
							Peningkatan Disiplin Aparatur (jauwili)	5.875.000,00	5.875.000,00	100,00

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (rauslilo)	5.000.000,00	4.550.000,00	91,00
							Penyelenggaraan Pemerintah Desa (rauslilo)	38.055.000,00	38.040.000,00	99,96
							Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (rauslilo)	41.060.000,00	40.965.000,00	99,77
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (rauslilo)	10.000.000,00	9.915.000,00	99,15
							Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Peningkatan Pemantauan (seltra)	134.228.685,00	123.290.785,00	91,85
							Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur (mendobakar)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (mendobakar)	72.438.500,00	72.093.500,00	99,52
							Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah (mendobakar)	14.562.200,00	14.562.200,00	100,00
							Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan (satrolniti)	92.895.000,00	62.671.500,00	67,46
							Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan (kesbangpol)	4.745.750,00	4.745.000,00	99,98
							Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PRKATI) (kesbangpol)	2.733.700,00	2.733.700,00	100,00
							Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik (udimobesar)	30.110.000,00	30.110.000,00	100,00
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (udimobesar)	10.050.000,00	10.050.000,00	100,00
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (udimobesar)	9.300.000,00	6.175.000,00	66,40
							Program Peningkatan Pelayanan Publik (rakam)	27.410.000,00	27.410.000,00	100,00
		Rataan Sasaran						237.112.358.941,00	180.458.379.406,38	67,67
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	6	angka rata-rata lama sekolah	8,23	8,23	8,24	104,12	Manajemen Pelayanan Pendidikan (dindikpora)	3.722.389.500,00	3.354.102.374,00	90,11
	7	angka harapan lama sekolah	12,76	12,76	12,77	100,08	Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun (dindikpora)	61.165.756.283,00	43.165.847.884,00	70,57
							Pendidikan Anak Usia Dini (dindikpora)	2.451.910.200,00	2.348.593.336,00	95,79
							Pendidikan Non Formal (dindikpora)	1.337.297.000,00	1.256.552.633,00	93,89
							Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar (dindikpora)	932.540.750,00	905.519.260,00	97,10
							Pengembangan Kejasama Pengelolaan Kekayaan Budaya (dindikpora)	0,00	0,00	0,00
							Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (dindikpora)	16.842.822.500,00	15.935.544.710,00	94,61
		Rataan Sasaran						86.452.716.233,00	66.965.160.197,00	77,46
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	8	Angka harapan hidup	70,99	70,99	71,06	100,10	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak (dinkes)	60.125.000,00	59.598.216,00	99,12
	9	Angka stunting	3,82	3,82	1,50	160,73	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita (dinkes)	18.022.000,00	17.148.750,00	95,15
							Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (dinkes)	2.429.154.047,00	2.401.690.787,00	98,87
							Program Pengembangan Lingkungan Sehat (dinkes)	148.161.611,00	140.740.851,00	94,99
							Program Upaya Kesehatan Masyarakat (dinkes)	15.295.243.387,00	14.180.759.799,00	92,71
							Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (dinkes)	842.165.000,00	820.167.470,00	97,39
							Program Perbaikan Gizi Masyarakat (dinkes)	1.280.135.000,00	1.259.517.150,00	98,39
							Program Peningkatan Keamanan Pangan Segar (dinampertan)	1.825.000,00	1.375.000,00	75,34
							Program Peningkatan Ketahanan Pangan (dinampertan)	15.210.000,00	13.890.000,00	91,32
							Program Pengembangan Pola Pangan (dinampertan)	4.900.000,00	4.250.000,00	86,73
							Program Peningkatan Bahan Makanan (dinampertan)	47.630.000,00	47.348.750,00	99,41
		Rataan Sasaran						20.142.571.245,00	18.946.486.773,00	94,06
Meningkatnya kesetaraan gender	10	indeks pemberdayaan gender	72,07	73,90	88,49	119,74	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (dtk2kn3a)	21.945.000,00	12.171.885,00	55,47
							Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KB yang mandiri (dtk2kn3a)	85.798.000,00	82.907.550,00	96,63
							Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KB (dtk2kn3a)	0,00	0,00	0,00
							Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan (dtk2kn3a)	37.325.000,00	33.893.690,00	90,81
		Rataan Sasaran						145.068.000,00	128.973.125,00	88,91
Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	11	Status kabupaten layak anak	Pratama	Pratama	Pratama	100,00	Program Keluarga Berencana (dtk2kn3a)	3.200.511.000,00	3.131.010.716,00	97,83
							Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (dtk2kn3a)	468.571.000,00	405.714.616,00	86,56
		Rataan Sasaran						3.667.082.000,00	3.536.725.332,00	96,45
Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas	12	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	74,59	74,59	78,26	104,92	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (dpuur)	4.858.427.500,00	4.692.055.481,57	96,58
	13	Proporsi Panjang jembatan dalam Kondisi Baik	93,77	93,77	93,77	100,00	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (dpuur)	1.196.400.000,00	1.182.353.108,96	98,83
	14	Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik	98,91	98,91	98,91	100,00	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (dpuur)	12.681.449.275,00	12.462.050.780,00	98,27
							Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan (dpuur)	617.831.000,00	0,00	0,00
							Program Pembangunan sistem informasi/data base Jalan dan Jembatan (dpuur)	583.000.000,00	438.024.338,00	75,13
							Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya (dpuur)	3.150.927.000,00	244.006.250,00	7,74
							program penataan , Pengusahaan Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah (dpuur)	300.000.000,00	0,00	0,00
							Program Pembangunan (uratlal)/bromono (dpuur)	172.705.000,00	164.390.000,00	95,19
							Program Lingkungan Sehat Pemukiman (dpuur)	150.000.000,00	146.446.000,00	97,63
							Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (dpuur)	340.000.000,00	333.496.400,00	98,09
							Program Pengendalian Banjir (dpuur)	1.053.715.000,00	1.045.971.340,00	99,27
							Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (dirhub)	3.898.662.000,00	3.882.255.820,00	99,58
							Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (dirhub)	164.020.000,00	161.082.200,00	98,21
							Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (dirhub)	147.828.980,00	139.967.595,00	94,68
							Program Peningkatan dan Pemertanran Lalu Lintas (dirhub)	420.600.000,00	218.240.382,00	51,89
		Rataan Sasaran						29.735.565.755,00	25.110.339.695,53	84,45
Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas	15	Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar	95,12	95,12	96,16	101,09	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Air Minum dan Air Limbah (dirair)	1.263.302.500,00	1.228.486.879,00	97,24
	16	persentase masyarakat yang memiliki akses air bersih	98,71	98,71	99,75	101,05	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (dirair)	1.921.466.300,00	1.739.999.760,00	90,56
	17	Persentase kecukupan luasan RTH publik	32,38	32,38	32,38	100,00	Pengembangan Perumahan (dirpenda)	123.265.000,00	119.575.000,00	97,01
	18	Persentase masyarakat miskin yang terlayani rumah layak huni	97,40	97,40	98,25	100,87	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (dirperkkp)	8.900.000,00	7.000.000,00	78,65
	19	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	0,016	0,016	0,016	100,00	Pengembangan Kemiskinan Perkotaan (dirperkkp)	368.520.000,00	368.195.000,00	99,91

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%
							Program peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah (dinapknk)	1.178.926.800,00	1.162.310.800,00	98,59
							Pengembangan data/informasi Pemukiman (dinapknk)	135.460.000,00	108.661.900,00	80,22
Rataan Sasaran							100,60	4.999.840.600,00	4.734.229.339,00	94,69
Meningkatnya pengembangan kepariwisataan berbasis sport tourism, kearifan dan budaya lokal serta sumber daya alam pariwisata	20	peringkatan kunjungan wisatawan	17,91	1,49	1,32	88,68	Pengembangan Nilai Budaya (dinapbudaya)	130.060.000,00	128.619.613,00	98,89
							Pengelolaan Kelayaan Budaya (dinapbudaya)	186.175.750,00	179.401.021,00	96,36
							Program Pengelolaan Keragaman Budaya (dinapbudaya)	0,00	0,00	0,00
							Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (dinapbudaya)	428.969.800,00	386.406.718,00	90,08
							Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (dinapbudaya)	1.515.445.000,00	1.001.593.220,00	66,09
							Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat (dinapknk)	218.927.000,00	182.501.160,00	83,36
							Program Pengembangan Kemitraan (dinapbudaya)	19.600.000,00	19.449.000,00	99,23
							Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (dinapbudaya)	179.821.065,00	176.214.600,00	97,99
							Pengembangan Pariwisata (dinapbudaya)	190.885.935,00	173.593.000,00	90,94
							Program Pembinaan dan Pemasaran Olahraga (dinapknk)	680.985.000,00	655.589.300,00	96,27
							Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (dinapknk)	19.685.000,00	19.622.400,00	99,68
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (dinapknk)	807.420.000,00	602.793.197,30	74,66
Rataan Sasaran							88,68	4.377.974.550,00	3.525.783.229,30	80,53
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto	21	persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	19,55	19,79	21,35	107,88	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (dinapknk)	37.600.000,00	37.394.500,00	99,45
							Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan (dinapknk)	194.795.000,00	193.800.169,00	99,49
							Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak (dinapknk)	381.955.000,00	379.455.167,00	99,35
							Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (dinapknk)	3.092.136.000,00	3.067.765.330,00	99,21
							Program Pengembangan Budidaya Perikanan (dinapknk)	786.288.000,00	688.904.638,00	87,61
							Program Pengembangan Data/Informasi (dinapknk)	2.760.000,00	2.760.000,00	100,00
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan (dinapknk)	1.852.945.000,00	1.610.904.900,00	86,94
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Perikanan (dinapknk)	60.150.000,00	42.143.700,00	70,06
							Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat Perikanan (dinapknk)	4.745.000,00	4.745.000,00	100,00
							Program Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan (dinapknk)	194.541.500,00	193.984.500,00	99,71
							Program Optimalisasi Pemasaran Produk Hasil Perikanan (dinapknk)	67.229.100,00	65.168.624,00	96,94
							Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (dinapknk)	72.085.000,00	63.781.545,00	88,48
							Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan (dinapknk)	91.539.000,00	91.240.824,00	99,67
							Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (dinapknk)	1.127.330.000,00	1.110.713.731,00	98,53
							Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan (dinapknk)	718.942.500,00	684.837.512,00	95,26
							Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (dinapknk)	844.460.000,00	828.637.605,00	98,13
Rataan Sasaran							107,88	9.529.501.100,00	9.066.237.745,00	95,14
Meningkatnya pendapatan masyarakat	22	Peningkatan PDRB perkapita	1,45	-0,69	-0,65	105,80	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (dinapknk)	2.808.260.000,00	2.387.735.840,00	85,03
							Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetensi Usaha Kecil Menengah (dinapknk)	207.615.000,00	197.937.000,00	95,34
							Program pengembangan sentra-sentra industri potensial (dinapknk)	35.000.000,00	34.865.000,00	99,61
							Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (dinapknk)	223.093.000,00	206.631.700,00	92,62
Rataan Sasaran							105,80	3.273.968.000,00	2.827.169.540,00	86,35
Menurunnya angka kemiskinan	23	Persentase angka kemiskinan	4,97	4,99	4,51	109,62	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (dinapknk)	165.657.800,00	140.799.931,00	84,99
	24	Angka pengangguran terbuka	3,80	5,43	5,42	100,18	Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma (dinapknk)	111.598.000,00	111.024.580,00	99,49
							Program Pemberdayaan Pantas (dinapknk)	116.075.000,00	104.243.000,00	89,81
							Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (dinapknk)	37.948.000,00	30.612.600,00	80,67
							Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (dinapknk)	482.845.000,00	454.854.353,00	94,20
							Program Penanganan, Penanggulangan dan Rekonstruksi Bencana (dinapknk)	399.030.000,00	398.958.500,00	99,98
							Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (dinapknk)	24.960.958.000,00	22.386.464.910,00	89,69
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (dinapknk)	3.127.459.800,00	3.086.951.647,00	98,70
							Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (dinapknk)	60.147.200,00	60.051.900,00	99,84
							Program Pengembangan dan Pemasaran Teknologi Tepat Guna (dinapknk)	38.304.000,00	37.991.200,00	99,14
							Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Kewirausahaan (dinapknk)	46.480.000,00	46.265.000,00	99,54
							Peningkatan Kesempatan Kerja (dinapknk)	41.590.000,00	40.820.000,00	98,15
							Peningkatan Kapasitas P/TEK Sistem Produksi (dinapknk)	2.964.235.000,00	2.862.674.506,00	96,57
							Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (dinapknk)	371.215.000,00	362.868.700,00	97,75
							Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (dinapknk)	177.460.000,00	174.495.200,00	98,33
							Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (dinapknk)	1.246.825.000,00	1.226.002.000,00	98,33
							Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (dinapknk)	51.065.200,00	47.758.200,00	93,52
Rataan Sasaran							104,90	34.398.933.000,00	31.572.436.227,00	91,78
Meningkatnya peran serta desa dalam mendorong perekonomian	25	persentase desa swasembada	25,81	25,81	24,19	93,75	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (dinapknk)	224.695.000,00	224.542.800,00	99,93
							Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (dinapknk)	112.096.250,00	111.105.900,00	99,12

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%
							Program Perataan Desa (dincampdes)	103.704.000,00	101.150.700,00	97,54
							Program Penyelenggaraan Pemertintahan Desa (dincampdes)	79.875.000,00	79.320.600,00	99,31
Rataan Sasaran						93,75		520.370.250,00	516.120.000,00	99,18
Meningkatnya upaya kelestarian dan kualitas lingkungan hidup	26	Indeks kualitas Lingkungan Hidup Daerah	63,07	63,07	62,22	98,65	Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup (dinh)	272.837.500,00	229.871.271,44	84,25
	27	Ketaatan terhadap RTRW	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (dinh)	4.287.000,00	4.182.466,66	97,56
							Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (dinh)	4.597.000,00	4.593.822,22	99,93
							Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (dinh)	84.424.322,22	75.764.322,22	89,74
							Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah (dinh)	7.149.861.800,00	6.746.044.222,88	94,35
							Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (dinh)	1.415.312.450,00	1.294.372.249,00	91,45
							Program Perencanaan Tata Ruang (dour)	289.690.000,00	215.963.643,00	74,55
							Program Pemanfaatan Ruang (dour)	658.700.000,00	327.779.263,00	49,76
							Program Pengendalian dan Pemanfaatan Buaru (dour)	30.000.000,00	28.150.000,00	93,83
	Rataan Sasaran						99,33		9.909.700.072,22	8.926.721.260,42
						103,92		627.140.067.608,22	563.755.365.678,08	89,89



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				Rp	%
1	PENDAPATAN	1.140.955.837.297,00	1.136.647.395.404,40	-4.308.441.892,60	99,62
1. 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	126.497.504.000,00	155.729.845.760,46	29.232.341.760,46	123,11
1. 1. 1	Pendapatan Pajak Daerah	51.960.117.000,00	60.672.648.246,45	8.712.531.246,45	116,77
1. 1. 2	Hasil Retribusi Daerah	7.542.425.000,00	8.218.105.256,00	675.680.256,00	108,96
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.427.500.000,00	4.806.743.535,90	379.243.535,90	108,57
1. 1. 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	62.567.462.000,00	82.032.348.722,11	19.464.886.722,11	131,11
1. 2	DANA PERIMBANGAN	803.506.147.597,00	761.255.023.545,00	-42.251.124.052,00	94,74
1. 2. 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	134.191.261.900,00	102.749.364.619,00	-31.441.897.281,00	76,57
1. 2. 2	Dana Alokasi Umum	500.682.611.000,00	498.137.263.000,00	-2.545.348.000,00	99,49
1. 2. 3	Dana Alokasi Khusus	168.632.274.697,00	160.368.395.926,00	-8.263.878.771,00	95,10
1. 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	210.952.185.700,00	219.662.526.098,94	8.710.340.398,94	104,13
1. 3. 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	50.082.355.700,00	59.568.265.950,94	9.485.910.250,94	118,94
1. 3. 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.311.400.000,00	4.843.925.000,00	-467.475.000,00	91,20
1. 3. 6	Dana Desa	61.490.333.000,00	61.490.333.000,00	0,00	100,00
1. 3. 7	Dana Insentif Daerah	50.257.407.000,00	50.257.407.000,00	0,00	100,00
1. 3. 8	Pendapatan Hibah	43.810.690.000,00	43.502.595.148,00	-308.094.852,00	99,30
2	BELANJA	1.270.841.728.698,23	1.152.653.865.431,02	-118.187.863.267,21	90,70
2. 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	643.701.661.090,01	588.898.499.752,94	-54.803.161.337,07	91,49
2. 1. 1	Belanja Pegawai	467.116.629.510,01	419.504.819.957,94	-47.611.809.552,07	89,81
2. 1. 3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 1. 4	Belanja Hibah	37.660.587.200,00	35.015.292.795,00	-2.645.294.405,00	92,98
2. 1. 5	Belanja Bantuan Sosial	4.310.000.000,00	3.026.653.000,00	-1.283.347.000,00	70,22
2. 1. 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.950.254.200,00	5.950.254.200,00	0,00	100,00
2. 1. 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	124.027.785.400,00	124.027.785.400,00	0,00	100,00
2. 1. 8	Belanja Tidak Terduga	4.636.404.780,00	1.373.694.400,00	-3.262.710.380,00	29,63
2. 2	BELANJA LANGSUNG	627.140.067.608,22	563.755.365.678,08	-63.384.701.930,14	89,89
2. 2. 1	Belanja Pegawai	142.643.545.721,00	136.578.149.464,00	-6.065.396.257,00	95,75
2. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	338.322.573.449,02	293.542.394.766,56	-44.780.178.682,46	86,76
2. 2. 3	Belanja Modal	146.173.948.438,20	133.634.821.447,52	-12.539.126.990,68	91,42
SURPLUS / DEFISIT		-129.885.891.401,23	-16.006.470.026,62	113.879.421.374,61	12,32
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3. 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	130.393.875.401,23	131.157.002.485,23	763.127.084,00	100,59
3. 1. 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	130.393.875.401,23	130.393.865.708,23	-9.693,00	100,00
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	763.136.777,00	763.136.777,00	0,00
3. 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	507.984.000,00	507.984.000,00	0,00	100,00
3. 2. 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
3. 2. 3	Pembayaran Pokok Utang	7.984.000,00	7.984.000,00	0,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO		129.885.891.401,23	130.649.018.485,23	763.127.084,00	100,59
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		0,00	114.642.548.458,61	114.642.548.458,61	0,00

Sumber : BPPKAD Kab. Bangka, LRA Tahun 2020 (Non Audited)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

INSPEKTORAT

Jalan Pemuda No. 50 Sungailiat, Telp. / Fax. (0717) 92403

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS REVIU LAPORAN CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2020**

NOMOR : 700/23 /INSPEKTORAT/2021

Kami telah mereviu Laporan Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Capaian Pembangunan Daerah menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Capaian Pembangunan Daerah telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Capaian Pembangunan Daerah ini.

Sungailiat, 29 Maret 2021

INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA



**DARIUS, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.197006171998031004**

PENGHARGAAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020



PPD NASIONAL

PIALA PENGHARGAAN IGA DES 2020



INDOHCFC AWARD
PLATINUM AWARD PSC
SPGDT

INDOHCFC AWARD
JUARA FAVORIT PSC
SPGDT

PENGHARGAAN BPJS RSU DEPATI BAHRAIN 2020



PENGHARGAAN DJPK
PROV KINERJA
PENYALURAN DAK
TERBAIK

PENGHARGAAN DUKAPIL
JUARA I PENGELOLAAN
KEARSIPAN TK PROV

PENGHARGAAN KSWP



PENGHARGAAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020



PENGHARGAAN IRSA FINALIS DAN PRA PASCA EXCELENT CITY DES 2019



PENGHARGAAN IGA



PENGHARGAAN IRSA PSC DAN MANEJEMEN KESELAMATAN JLN



PENGHARGAAN JUARA II DESTINASI KREATIF TERPOPULER



PENGHARGAAN JUARA I FESTIVAL PARIWISATA TERPOPULER



PENGHARGAAN JUARA I FESTIVAL KREATIF PARIWISATA TERPOPULER



PENGHARGAAN MENPANRB DUKCAPIL ROLE MODEL PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KATEGORI SANGAT BAIK



PENGHARGAAN MENPANRB ROLE MODEL PELAYANAN PUBLIK RSUD



PENGHARGAAN KEMENKES PESERTA KKS



PENGHARGAAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020



PENGHARGAAN NASIONAL
SWASTI SABA WISTARA



PENGHARGAAN
NASIONAL SWASTI SABA
WISATARA



PENGHARGAAN NASIONAL
PERPUSTAKAAN DESA TERBAIK
DES 2019



PENGHARGAAN
PERDULI HAM



PENGHARGAAN SAKIP BB



PENGHARGAAN PROV
ADIKARYA PANGAN
NUSANTARA



PENGHARGAAN SINOVIK
PROV TOP 45 BUDISA



PENGHARGAAN WTP



PENGHARGAAN TOP 30
PEMERINTAH PENYELENGGARA
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK



LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN MISI 1

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi"

TUJUAN

MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI

INDIKATOR TUJUAN

INDEKS REFORMASI BIROKRASI

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI

MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA SEMUA LAPISAN MASYARAKAT

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten

Indeks SPBE

Indeks Profesionalitas ASN

Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya

Indeks Kepuasan Masyarakat

PROGRAM STRATEGIS

PROGRAM FOLLOW RESULT

Prog Pera Daer
MONEY FOLLOW PROGRAM

Program Pengembangan Data/Informasi (BAPPEDA)	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (BAPPEDA)	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah (BP2RD)	Program sumber daya kesehatan (DINKES)	Program upaya kesehatan masyarakat (DINKES)	Program peningkatan kualitas pelayanan umum kesehatan (RSUD)
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA (BAPPEDA)	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya (BAPPEDA)	Program Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA)	Program Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Insani (SETDA, KECAMATAN)	Program perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah (BP2RD)	Program kebijakan manajemen kesehatan masyarakat (DINKES)	Program pengembangan obat asli Indonesia (DINKES)	Program standarisasi pelayanan kesehatan (RSUD)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (INSPEKTORAT, SETDA)	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kada/Wakada (SETDA)	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan (SETDA)	Program Peningkatan Kerja sama antar Pemda (SETDA)	Program optimalisasi dana perimbangan/ transfer (BP2RD)	Program obt dan perbekalan kesehatan (DINKES)	Program pengawasan obat dan makanan (DINKES)	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal (SATPOL PP)
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan (SETDA)	Program Penataan Daerah Otonomi Baru (SETDA)	Program Penataan Kelembagaan (SETDA)	Program Advokasi dan Bantuan Hukum (SETDA)	Program pelayanan pajak daerah (BP2RD)	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban masyarakat (SATPOLPP)	Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana (SATPOLPP)	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bencana kebakaran (SATPOLPP)
Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (SETDA)	Program Ketatalaksanaan (SETDA)	Program Peningkatan dan Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance (SETDA)	Program Reformasi Birokrasi (SETDA)	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (BPKAD)	Program penataan administrasi kependudukan (DINDUKENCAPIL)	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik (DINPMP@KUKM)	Program Pengembangan data dan informasi (DINPERKAN)
Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, Pemilu DPRD dan Pemilukada (SETDA)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (SELURUH PD)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Seluruh PD)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (SELURUH PD)	Program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan perikanan dan kelautan (DINPERKAN)	Program peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan perikanan dan kelautan (DINPERKAN)	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan (DKP)	Program pemberdayaan kesejahteraan sosial (DINSOSPEMDES)
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (SELURUH PD)	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (SELURUH PD)	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah (DINKOMINFOTIK, DPUPRRP)	Program Pengembangan Persandian Daerah (DINKOMINFOTIK)	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (KESBANGPOL)	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (KESBANGPOL)	Program kelancaran dukungan pemilu (KESBANGPOL)	Program Pemberantasan PEKAT (KESBANGPOL, SATPOL PP)
Program Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa (DINKOMINFOTIK)	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang kominfo (DINKOMINFOTIK)	Program kerja sama informasi dengan media massa	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (BKPSDMD)	Program peningkatan pelayanan publik (SETDA)	Program peningkatan pelayanan publik (DINPMP2KUKM, SETDA, KECAMATAN)		
Program penataan sistem manajemen SDM aparatur (BKPSDMD)	Program peningkatan disiplin aparatur (SELURUH PD)	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah (DKP)	Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana rumah sakit (RSUD)	Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS (RSUD)	Program pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur pemerintah daerah (DPUPRRP)		
Program peningkatan pelayanan publik (SETDA)	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah (SETWAN)	Program peningkatan pelayanan umum (KECAMATAN)	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan (KECAMATAN)	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (KECAMATAN)	Program penyelenggaraan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminalitas (KECAMATAN)		
Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS (RSUD)	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit (RSUD)	Program perencanaan sarana dan prasarana infrastruktur pemerintah daerah (DPUPRRP)	Program pengawasan dan pengendalian pos dan telekomunikasi (DPUPRRP)				
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (KECAMATAN)	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (KECAMATAN)	Program penyelenggaraan pemerintahan desa (KECAMATAN)	Program penyelenggaraan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminalitas (KECAMATAN)				

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN MISI 2

"Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berintegritas"

TUJUAN

MENINGKATKAN TARAF PENDIDIKAN MASYARAKAT

MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

INDIKATOR TUJUAN

INDEKS PENDIDIKAN

INDEKS KESEHATAN MASYARAKAT

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT

MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT

MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER

MENINGKATNYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Hidup

Angka Stunting

Indeks Pemberdayaan Gender

Status Kabupaten Layak Anak

PROGRAM STRATEGIS

Program Pendidikan Anak Usia Dini (DINDIKBUD)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (DINDIKBUD)

Program Pendidikan Non Formal (DINDIKBUD)

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak (DINKES)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat (DINKES)

Program Peningkatan Keamanan Pangan Segar (DINPAN)

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (DP2KBP3A)

Program Keluarga Berencana (DP2KBP3A)

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (DP2KBP3A)

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya (DINDIKBUD)

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (DINDIKBUD)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (DINDIKBUD)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita (DINKES)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (DINKES)

Program Pengembangan Pola Pangan (DINPAN)

Program Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar (DINDIKBUD)

Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular (DINKES)

Program Perbaikan Gizi Masyarakat (DINKES)

Program Peningkatan Bahan Makanan (DINPAN)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat (DINKES)

PROGRAM FOLLOW RESULT

Program Peringkat Daerah

MONEY FOLLOW PROGRAM

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN MISI 3

"Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah"

TUJUAN

MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

INDIKATOR TUJUAN

INDEKS KETIMPANGAN INFRASTRUKTUR

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR EKONOMI YANG BERKUALITAS

MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG BERKUALITAS

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

PROPORSI PANJANG
JARINGAN JALAN
DALAM KONDISI BAIK

PROPORSI PANJANG
JEMBATAN DALAM
KONDISI BAIK

PROPORSI JARINGAN
IRIGASI DALAM
KONDISI BAIK

PERSENTASE
MASYARAKAT YANG
TERLAYANI SANITASI
DASAR

PERSENTASE
MASYARAKAT YANG
MEMILIKI AKSES AIR
BERSIH

PERSENTASE
KECUKUPAN
LUASAN RTH
PUBLIK

PERSENTASE
MASYARAKAT MISKIN
YANG TERLAYANI
RUMAH LAYAK HUNI

PERSENTASE
PENURUNAN LUASAN
KAWASAN KUMUH

PROGRAM STRATEGIS

Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
(DPUPRP)

Program Pembangunan
Saluran Drainase dan
Gorong-gorong (DPUPRP)

Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan (DPUPRP)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah (DPUPRP)

Program Pengembangan Perumahan
(DINPERKPP)

Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
(DINPERKPP)

Program Penataan,
Penguasaan Pemilikan dan
Pemanfaatan Tanah
(DPUPRP)

Program Lingkungan Sehat
Perumahan (DPUPRP)

Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan
(DPUPRP)

Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan
(DINPERKPP)

Program Pengembangan
Data/Informasi Permukiman
(DINPERKPP)

Program Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, dan Jaringan
Pengairan Lainnya
(DPUPRP)

Program Pengendalian
Banjir (DPUPRP)

Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan (DPUPRP)

Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
(DPUPRP)

Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
(DPUPRP)

Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas
Perhubungan (DPUPRP)

PROGRAM FOLLOW RESULT
Program perangkat daerah

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN MISI 4

"Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional"

TUJUAN

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

INDIKATOR TUJUAN

SPENDING OF MONEY

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN BERBASIS SPORT TOURISM, KEARIFAN DAN BUDAYA LOKAL SERTA SUMBER DAYA ALAM PARIWISATA

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN

PROGRAM STRATEGIS

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (dinparpora)

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (dinparpora)

Program Pengembangan Kemitraan (dinparpora)

Pengembangan Nilai Budaya (dindikbud)

Pengelolaan Kekayaan Budaya (dindikbud)

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan (dinparpora)

Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga (dinparpora)

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (dinparpora)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (dinparpora)

PROGRAM FOLLOW RESULT

MONET FOLLOW PROGRAM

Program Perangkat Daerah

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN MISI 5

"Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan"

TUJUAN

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKUALITAS

INDIKATOR TUJUAN

LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN (%)

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

INDEKS KINERJA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT

MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN

MENINGKATNYA PERAN SERTA DESA DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN DAERAH

MENINGKATNYA UPAYA KELESTARIAN DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN TERHADAP PDRB

PENINGKATAN PDRB PERKAPITA

% Angka Kemiskinan

ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA

PERSENTASE DESA SWASEMBADA

Indeks Kinerja Lingkungan Hidup Daerah

Ketaatan Terhadap RTRW (%)

PROGRAM STRATEGIS

PROGRAM FOLLOW RESULT

Program Perangkat Daerah

MONEY FOLLOW PROGRAM

